

**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MANAJEMEN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN**



**DIAJUKAN OLEH
CB HAGANA RESMIPUTRA
NIM: 041411233068**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2018

SKRIPSI

**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

DIAJUKAN OLEH

CB HAGANA RESMIPUTRA

NIM: 041411233068

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



CHORRY SULIATYOWATI SE., M.Sc.
NIP: 198504102008122001

TANGGAL ²⁶⁻⁷⁻²⁰¹⁸.....

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. MASMIRA KURNIAWATI, SE., M.Si.
NIP: 19750323.2006042001

TANGGAL ²⁷⁻⁷⁻²⁰¹⁸.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (CB Hagana Resmiputra, 041411233068), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Juni 2018



CB Hagana Resmiputra

NIM. 041411233068

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Allah Bapa segala puji dan rasa syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kami anugerah terindah dan kasihnya sehingga mampu menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang juga menjadi awal dalam perjalanan hidup untuk berjuang menggapai cita cita dan membahagiakan kedua orang tua. Tanpa kuasa dan kasih-Mu saya tidak akan bisa sampai pada titik ini , dan kiranya Engkau senantiasa membimbing , memberkati dan mengasihi hamba-Mu ini .

Tidaklah mudah menyelesaikan tugas akhir ini , oleh karena itu saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tulisan ini tidak akan terselesaikan, dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu perkenankan saya untuk mengucapkan beriburibu terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu saya selama proses penulisan ini dan semasa menjalankan studi sebagai mahasiswa.

Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada ibu Chorry Sulistyowat , M.sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada seluruh dosen program studi manajemen Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga telah banyak menginspirasi saya hingga saat ini dan terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Antonius Haribowo

Resmipoetro S.H dan Ibu Anastasia Evy Roosiany S.Ak yang telah mendukung dan mendoakan saya hingga sampai pada titik ini.

Ucapa terimakasih juga saya berikan kepada teman teman grup KAMPRET, teman teman seperjuangan di kontrakan Kertajaya, dan terutama sahabat sahabat saya Angga, yoga, eky, dito yang telah banyak membantu saya dalam berbagai macam hal, baik dukungan materiil maupun inmateriil yang sangat membantu saya dalam menjalankan studi dan proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saya memohon saran , kritik dan masukan yang membangun agar bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Saya sebagai penulis memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan , kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata , semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak pihak yhang membutuhkan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non Performing Loan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel makro (*Gross Domestic Product* dan Kurs), variabel rasio spesifik bank (Pertumbuhan kredit, Kualitas aktiva produktif, profitabilitas, efisiensi operasional bank) terhadap rasio *Non Performing Loan* pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan publikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resmi OJK dan situs resmi Badan Pusat Statistik. Periode penelitian dimulai dari bulan Desember 2006 sampai dengan Desember 2016. Hasil studi penelitian menunjukkan secara individual variabel *Gross Domestic Product*, Kurs dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya NPL, sedangkan variabel kualitas aktiva produktif, inefisiensi operasional, dan pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh yang signifikan pada level signifikansi 5%.

Kata kunci : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, Determinan NPL

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the factors that influence the occurrence of Non Performing Loan in the Group of Regional Development Banks in Indonesia. Hypothesis testing is done by multiple regression analysis technique to know the effect of macro variable (Gross Domestic Product and Kurs), Bank's Specific Loan to Deposit Ratio, Earning Asset Quality, Return on Asset, Operational Revenue Operating Expense) to Non Performing Loan ratio at Regional Development Banks in Indonesia The source of data used in this study comes from publication reports available in the Financial Services Authority through the official website of the Financial Services Authority and the official website of the Central Bureau of Statistics. The research period starts from December 2006 to December 2016 The result of research study showed individually variable of Gross Domestic Product, Kurs and profitability variable did not have significant effect to NPL, while credit quality, operation inefficiency, and credit growth variable have significant influence to non performing loan at 5% significant level

Key-words : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, NPL Determinant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank.....	10
2.1.2 Pengertian kredit	14
2.1.3 Determinan non-performing loan.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.3 Hipotesis dan Model Analisis	26
2.3.1 Hipotesis.....	26
2.3.2 Model analisis	26
2.4 Kerangka berpikir	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan penelitian	28

3.2	Identifikasi variabel	28
3.3	Definisi Operasional	28
3.4	Jenis dan sumber data	29
3.5	Prosedur penentuan sampel.....	30
3.6	Prosedur pengumpulan data.....	30
3.7	Teknik analisis	31
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
4.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	39
4.4	Analisis Model dan Pengujian Hipotesis	41
4.5	Pembahasan.....	42
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1	Simpulan	47
5.2	Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL		HAL
Tabel 1.1 :	Tabel Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016	3
Tabel 1.2 :	Tabel Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD tahun 2012 s/d 2016.....	6
Tabel 4.1 :	Deskripsi Statistik Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.2 :	Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).....	41

DAFTAR GAMBAR	HAL
Gambar 1.1: Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial tahun 2012 s/d 2016.....	2
Gambar 1.2 : Grafik NPL Bank Umum dan BPD Tahun 2012 s/d 2016.....	5
Gambar 1.3 : Grafik Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis dan Orientasi Penggunaan tahun 2012 s/d 2016.....	6
Gambar 1.4 : Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016.....	7
Gambar 2.1 : Kerangka berpikir penelitian.....	7

BAB 1

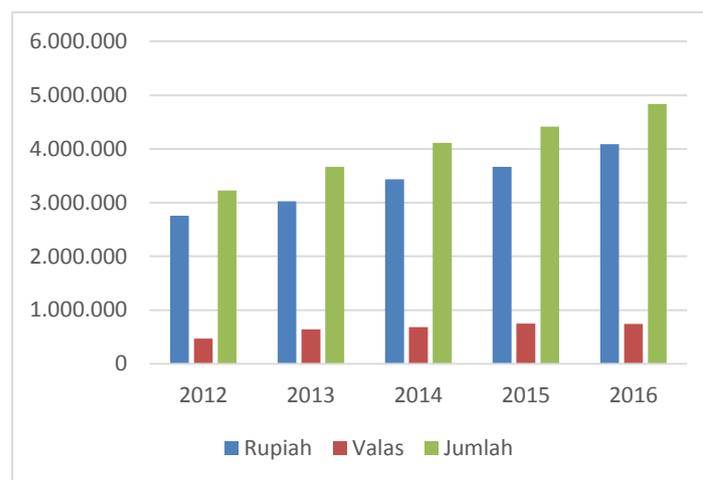
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia berjalan sangat cepat, hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah bank, jumlah transaksi, jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat, ragam layanan dan beragam aspek yang terdapat pada bisnis perbankan dimasa sekarang ini. Pada tahun 2012 jumlah dana yang telah disalurkan oleh perbankan di Indonesia mencapai 3.225.198 miliar rupiah. Terus mengalami peningkatan tiap tahun-nya hingga pada awal tahun 2016 dana yang telah disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat mencapai 4.836.758 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh perbankan untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan sektor pembangunan dan pergerakan perkonomian di Indonesia. Disamping itu harapan masyarakat akan ketersediaan dana dan kualitas pelayan perbankan menjadi prioritas sehingga diperlukannya lingkungan bisnis sektor perbankan yang sehat, kuat dan tangguh sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (*Commercial Bank*), Bank Syariah (*Sharia Bank*), dan Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia, 2016). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Dana pihak ketiga yang dihimpun bank mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh sektor perbankan membuat bank harus menanggung biaya penyimpanan dana yang cukup besar pula jika dana tersebut tidak dimanfaatkan dan disalurkan ke pihak ketiga yang membutuhkan. Oleh karena itu bank menyalurkan kembali dana simpanan tersebut dalam bentuk kredit untuk memperoleh *spread* (selisih bunga) sehingga beban biaya penyimpanan dana dapat tergantikan. Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun sektor perbankan Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan Desember 2016.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Milliar)

Gambar 1.1

Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial dari tahun 2012 s/d 2016

Tuntutan yang sedemikian besar membuat bank sering terlalu fokus untuk melakukan kegiatan ekspansi kredit namun mengabaikan prinsip pemberian kredit yang sehat dan baik. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka

tingkat kesehatan bank akan menurun dan menuntun-nya pada likuidasi. Kredit yang disalurkan perbankan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016
(Miliar)

Tahun	Kepada pihak ketiga	Kepada bank lain	Jumlah
2012	2.707.862	17.812	2.725.674
2013	3.292.874	26.968	3.319.842
2014	3.674.308	32.192	3.706.501
2015	4.057.904	34.200	4.092.104
2016	4.377.195	36.220	4.413.414

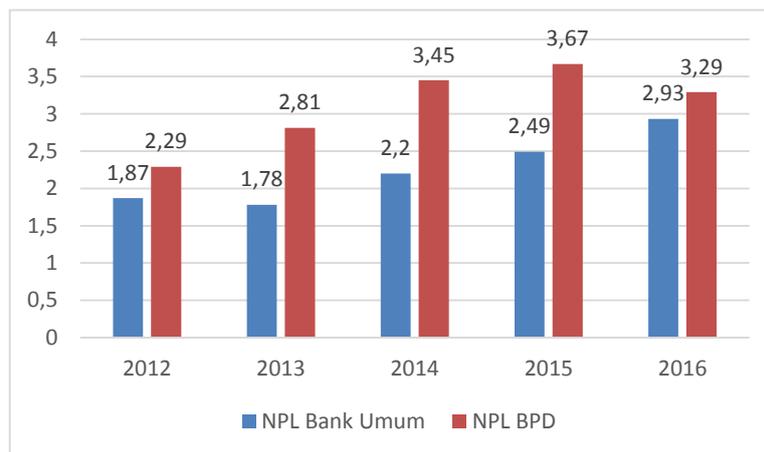
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2017

Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari tahun 2012 sebesar Rp. 2.725.674 miliar menjadi Rp 4.377.195 pada Januari 2016, jika dihubungkan dengan tabel sebelumnya tentu kenaikan jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di bank akan mengakibatkan kenaikan jumlah penyaluran dana oleh bank . Jika melihat komposisi penyaluran dana oleh bank dari tahun 2012 s/d Desember 2016 komposisi terbesar dari kegiatan penyaluran dana sektor perbankan di Indonesia adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank. Dari jumlah kredit tersebut merupakan kredit yang sehat namun sebagian diantaranya tentu terdapat kredit yang buruk. Kredit bermasalah atau macet dalam dunia perbankan sering disebut sebagai *Non Performing Loan (NPL)*, sebenarnya

merupakan hal yang biasa dalam bisnis perbankan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan lepas dari fungsi penyaluran dana melalui kredit, namun jika jumlah *NPL* mencapai angka yang melebihi tingkat kemampuan bank tentu akan mengakibatkan bencana bagi bank tersebut, hal itu dikarenakan terlalu besarnya tingkat *NPL* suatu bank akan menurunkan tingkat profitabilitas bank, selain itu tingkat likuiditas juga akan menurun dan dapat menyebabkan kondisi bank tidak sehat yang berujung pada kebangkrutan (likuidasi).

Dalam Surat Keputusan Direksi No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menilai kredit bermasalah atas dasar kualitasnya, dibagi menjadi lima golongan yaitu kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Masing masing kelompok diukur dengan kriteria utama yaitu prospek usaha, kemampuan membayar dan kondisi keuangan debitur. Beberapa tahun terakhir rata-rata tingkat *NPL* bank umum di Indonesia mengalami kenaikan. Dikutip dari media pemberitaan dalam bidang perbankan Infobank, tingkat *NPL* perbankan sendiri berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat *NPL* sebesar 2,49%, mengalami peningkatan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan Maret 2017 *NPL* kembali mengalami peningkatan menjadi 3,04% (Statistik Perbankan Indonesia). Namun diantara beberapa kelompok bank umum komersial di Indonesia, kelompok Bank Pembangunan Daerah atau BPD merupakan kelompok bank yang mempunyai rata-rata rasio *NPL* yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok bank secara umum yang mencakup semua jenis bank.

Pada akhir tahun 2016 rasio NPL Bank Pembangunan Daerah (BPD) berada di posisi 3,29% sedangkan rasio NPL pada bank secara umum berada di posisi 2,93% selain itu rasio NPL perbankan tertinggi di Indonesia pada saat ini dimiliki oleh salah satu BPD yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua yang mencapai 15,3%. Menurut Sukanto kepala Otoritas Jasa Keuangan regional 4 dalam paparannya di indonesia banking expo di Jakarta, hal ini merupakan efek dari keinginan dari kelompok Bank Pembangunan Daerah untuk mulai mengembangkan penyaluran kredit produktif ke masyarakat.(kontan.co.id – 24/9/17).

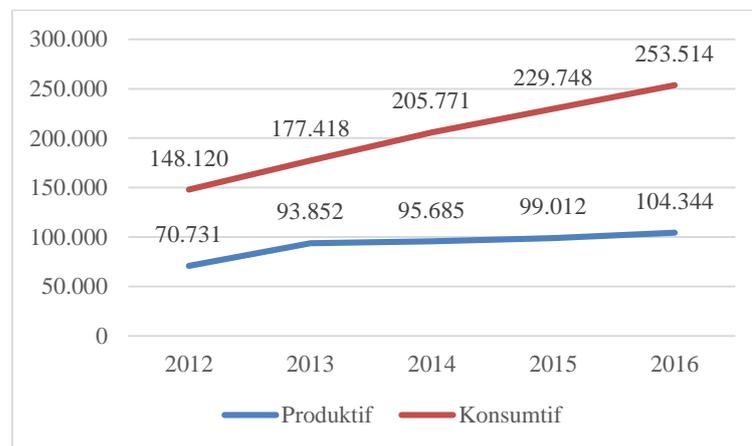


Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Persen)

Gambar 1.2
Grafik NPL Bank Umum dan BPD

Sejauh ini BPD masih menggantungkan penyaluran kredit ke sektor konsumsi sebesar 60-90% dari total penyaluran kredit. Keputusan untuk mengembangkan penyaluran kredit ke bidang produktif oleh BPD bukan malah memperbaiki kinerja namun malah memperburuk kinerja BPD sendiri. Hal tersebut

dipercaya disebabkan oleh ketidaksiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh BPD dalam mengelola atau mengidentifikasi risiko kredit sektor produktif .



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Miliar)

Gambar 1.3
Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Orientasi Penggunaan

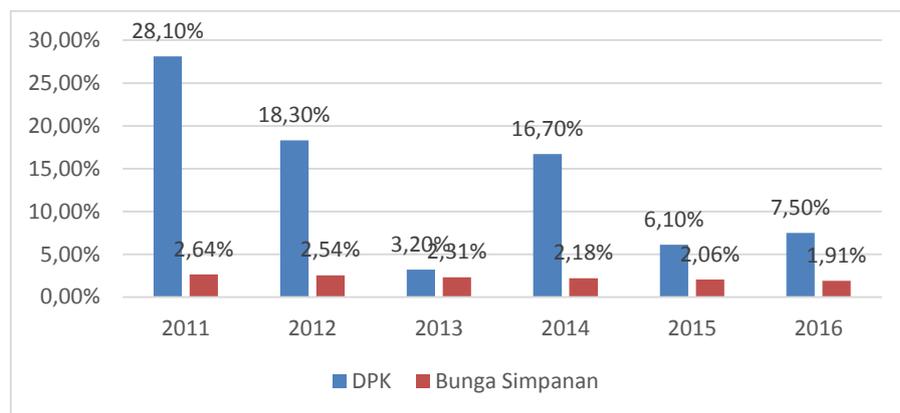
Tabel : 1.2
Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD dari tahun 2012 s/d 2016
(Miliar)

	2012	2013	2014	2015	2016
Total Kredit	218.851	264.541	301.456	328.759	357.859
NPL	5.025	7.444	10.406	12.070	11.801
Rasio NPL	2.2%	2,4%	3.4%	3.67%	3.29%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Perkembangan penyaluran kredit BPD terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun . Dapat dilihat dari Tabel 1.2 jumlah penyaluran kredit oleh BPD kepada pihak ketiga bukan bank dari tahun ketahun mengalami peningkatan ,

namun sejalan dengan itu jumlah NPL pun juga semakin meningkat, hanya pada tahun 2016 yang berlaku sebaliknya. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPD tidak lepas dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok bank BPD yang juga mengalami peningkatan meskipun prosentase pertumbuhannya mengalami tren negatif dari tahun ke tahun akibat dari penurunan rata rata suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD. Dari gambar 1.4 dapat dilihat tren negatif dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok BPD pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dimana hal tersebut disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 1.4

Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016

Kredit bermasalah yang besar dalam industri perbankan membawa dampak yang luas. Besarnya tingkat NPL dari sisi mikro dapat merugikan dan menghambat perkembangan usaha selain itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dilihat dari sudut pandang makro, mengingat dana yang dihimpun oleh bank digunakan

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk membuka kredit baru dan menutup kemungkinan bagi debitur lain untuk mendapatkan kredit. Peningkatan NPL dapat dipengaruhi oleh factor makro ekonomi, faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor eksternal baik bank maupun debitur. Jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, kondisi ekonomi nasional memiliki peran yang cukup besar terhadap tingkat risiko gagal bayar. Kondisi ekonomi yang lesu karena penurunan kemampuan sektor usaha untuk menghasilkan barang dan jasa akibat dari menurunnya konsumsi masyarakat tentu akan mempengaruhi pendapatan sektor usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kemampuan sektor usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari sisi intern bank tentunya faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya NPL adalah kelemahan pengelolaan kredit, agresifitas bank dalam menyalurkan kredit, jaminan yang tidak memadai atau tidak mencover kredit dan lain lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan guna memperoleh jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah faktor makro ekonomi (*Gross Domestic Product (GDP)* dan tingkat kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi operasional bank) berpengaruh terhadap NPL pada bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian - penelitian sebelumnya berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia adalah untuk mengetahui pengaruh factor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product (GDP)*, tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (tingkat pertumbuhan kredit, kualitas kredit , profitabilitas , dan efisiensi operasional bank) terhadap NPL

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan temuan dan bukti empiris yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai faktor internal bank yang secara signifikan dapat mempengaruhi arah hubungan terjadinya NPL pada bank perusahaan daerah di Indonesia
2. Memberikan penjelasan yang relevan kepada setiap pengambil kebijakan yang dalam hal ini para manajer keuangan bank dalam melakukan tugasnya dan menjaga nilai NPL dari bank tertentu untuk menjaga tingkat kesehatan bank
3. Menjadi acuan analisis bagi para akademisi untuk mendorong penelitian penelitian berikutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank

Menurut Grosse dan Hemple (2013:1) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber - sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu menurut F.E. Perry (2013:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Menurut Stuart (2013:1) , bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit , baik dengan alat - alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi memperlancar lalu lintas giro.
2. *Agent of Trust* , bank merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya dengan cara memelihara kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang cukup
3. *Agent of Development* , yaitu berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi
4. *Agent of Service* , bank turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*) ,jasa penagihan atau inkaso (*collection*) dan jasa kotak pengamanan (*safe deposit box*).

Menurut Rivai,dkk (2013:2), dalam bukunya *Bank and financial institution management*, Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua berikut ini :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan “menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk membangun koperasi,

pengembangan pengusaha golongan kecil, pengembangan ekspor non-migas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. (Rivai, 2007:322)

Menurut Hendro dan Rahardja (2014:123) berdasarkan kepemilikannya bank dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Bank Pemerintah

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat baik sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Bank swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya adalah milik swasta nasional dan swasta asing.

3. Bank Koperasi

Bank yang sebagian besarnya atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi

4. Bank asing

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing.

5. Bank campuran

Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Klasifikasi bank menurut kepemilikan di Indonesia berbeda dengan negara negara lain pada umumnya .Bank milik negara dibagi menjadi 2 jenis yaitu BUMN dan BPD. BPD adalah salah satu bank bentukan pemerintah yang pada awalnya di fokuskan dalam bidang pembangunan daerah. Pada 25 Mei 1960 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah (BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959

menjadi 22 bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang (1959) menjadi 17 cabang (1965).

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas ketentuan Bank Pembangunan Daerah menyatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan . Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. Sampai saat ini ada 26 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi.

2.1.2 Pengertian kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:1) perkataan kredit sesungguhnya berasal dari kata *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya jika seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Kredit diberikan

atas dasar kepercayaan , artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Pada dasarnya tujuan kredit adalah *profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur dan tujuan *safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU Perbankan No.10 th 1998)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dan mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan pemberian tingkat bunga yang berbeda beda sesuai risiko yang terkandung.

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. (Rivai, 2013:198)

Menurut Rivai (2013:211) kriteria kualitas kredit perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Pembayaran angsuran pokok dana atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutase rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

Kredit digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum lebih 90 hari
- b. Kadang kadang terjadi cerukan
- c. Mutase rekening relative aktif
- d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. didukung oleh pinjaman baru

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana tau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- d. Terjadi pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria berikut

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan tau bunga yang telah melampaui 270hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam Menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai risiko minimal dengan kata lain kredit dapat dikembalikan sepenuhnya, tepat waktu dan tidak menjadi kredit bermasalah. Namun dalam praktek bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan tidak semuanya lancar dan sehat, dan ketika bank gagal dalam mengelola risiko tersebut maka akan timbul

kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. *Non-performing loan (NPL)* adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi (latumaerissa,1996)

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004). *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004). Agar kinerja berapor biru maka setiap bank harus menjaga *NPL*-nya dibawah 5% (Infobank, 2017), hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. *NPL* dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Akibat tingginya *NPL* perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian kredit dengan membentuk cadangan kerugian kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis, sedangkan modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit dan dapat mempengaruhi kemampuan bank memperoleh

keuntungan dari pendapatan bunga. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Kredit macet dalam jumlah besar dalam industri perbankan membawa dampak yang cukup luas. Secara makro dampak dari besarnya tingkat NPL dapat memperlambat perekonomian negara mengingat peran bank sebagai salah satu penyalur sumber dana kepada masyarakat, jika kredit macet jumlahnya besar membuat bank akan lebih berhati-hati dan selektif untuk memberikan pinjaman sehingga standarisasi pinjaman meningkat, disisi lain jika kredit macet membuat likuiditas bank berkurang maka menghambat bank untuk membuka penyaluran kredit baru kepada masyarakat sehingga perekonomian menjadi lambat. Secara mikro besarnya kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena jumlah kredit macet yang terlalu besar akan menurunkan likuiditas bank yang kemudian mengurangi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.3 Determinan *non-performing loan*

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya non performing loan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor makroekonomi dan factor spesifik bank (Ghost, 2015) (Dimitros *et. al.*, 2016). Faktor makro ekonomi mempunyai dampak cukup signifikan terhadap NPL. Berikut adalah beberapa yang dapat mempengaruhi NPL.

Faktor makroekonomi

1. Tingkat *Gross Domestic Product*

Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara adalah *Gross Domestic Product* (GDP). Menurut (Sudremi 2007:103) “*Gross Domestic Product* merupakan nilai seluruh barang dan jasa akhir yang

diproduksi oleh seluruh input, baik faktor produksi milik warga negara Indonesia maupun milik warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia dalam periode tertentu”. Penurunan konsumsi masyarakat yang diikuti dengan penurunan tingkat investasi sektor usaha dan penurunan *GDP* riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara sehingga kegiatan perekonomian menjadi melambat . Hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya dari industri perbankan dengan kata lain menurunnya *GDP* dapat meningkatkan *NPL* .

2. Kurs

Kurs dalam hubungannya dengan *non-performing loan* digunakan sebagai proxy dari kebijakan moneter, kurs yang terdepresiasi mengakibatkan memburuknya kemampuan sektor usaha yang kemudian pada gilirannya akan meningkatkan kredit bermasalah bagi sistem perbankan . Nilai tukar yang terdepresiasi mengakibatkan penurunan neraca perusahaan sehingga melemahkan kemampuan investasi perusahaan di masa depan terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Fluktuasi nilai tukar mengakibatkan bank devisa mengalami kesulitan. Kewajiban dalam bentuk valas sering tidak dilindungnilaikan. Bank juga sering memberikan kredit dalam bentuk valas kepada perusahaan perusahaan yang tidak mendapatkan devisa. Akibatnya depresiasi nilai tukar rupiah akan menggelembungkan *non-performing loan* perbankan (Sugema, 2013) . Faktor kurs nilai tukar semakin besar dampaknya

kepada debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dan memasarkan produknya di dalam negeri dengan menggunakan mata uang nasional. Hal ini menyebabkan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk menanggungnya (Sutojo, 2000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin menurunnya nilai tukar mata uang, maka membuat kemampuan untuk membayar kewajiban dalam bentuk kredit beserta bunganya juga lemah, sehingga pada akhirnya meningkatkan NPL.

KURS = LN (Rata-rata kurs tengah tahunan terhadap US dollar).....(2.2)

Faktor spesifik bank

1. Pertumbuhan kredit

Ketika bank memutuskan untuk menaikkan jumlah penyaluran kredit maka bank akan menurunkan suku bunga pinjaman dan menurunkan standard pemberian kredit sehingga hal itu dapat menyebabkan penyaluran kredit kepada pihak yang berisiko tinggi untuk terjadinya gagal bayar atau *default* (Keeton,1999). Faktor ini diukur dengan menggunakan *loan to Deposit Ratio* sesuai dengan penelitian Dimitros (2016). Dengan nilai LDR yang tinggi tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 110% maka bank dianggap sehat, hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk kredit secara maksimal yang dinilai sebagai aset paling produktif. LDR yang tinggi berarti adanya penyaluran kredit yang tinggi pula. Dengan demikian risiko terjadinya NPL tinggi pula. Perhitungan LDR juga

menggambarkan risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank itu sendiri, semakin tinggi LDR maka semakin tinggi risiko likuiditas bank karena hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Variabel ini dihitung dengan rumus Total kredit dibandingkan dengan Total dana Pihak Seimpanan Pihak III :

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.3)$$

Dengan meningkatnya rasio ini diharapkan akan meningkatkan NPL bank

2. Kualitas Aktiva Produktif

Besarnya rasio kualitas aktiva produktif menggambarkan kualitas kredit bank dan perilaku bank dalam mengatasi risiko kredit. Teori yang mendasari variabel ini adalah teori '*moral hazard*' oleh Keeton dan Morris (1987). Dalam penelitiannya mereka berpendapat bahwa bank dengan kualitas kredit yang lemah memiliki anggota yang cenderung melakukan tindakan bersifat *moral hazard* dengan meningkatkan risiko dari portofolio kredit mereka dan tentu akan meningkatkan risiko terjadinya *NPL*, kualitas kredit diukur menggunakan rasio KAP, semakin buruk kualitas kredit bank maka semakin tinggi rasio KAP yang pada akhirnya meningkatkan *NPL*. Pengukuran dari variabel ini dihitung dengan rumus :

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif diklasifikasikan}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

3. Profitabilitas bank

Tingkat profitabilitas bank adalah tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari berbagai jenis kegiatan bisnisnya. Bank yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tentu saja cenderung tidak

melakukan berbagai aktivitas yang memiliki resiko tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas bank akan menurunkan kecenderungan bank dalam mengambil tindakan berisiko dalam kebijakan kredit dan tentu menurunnya NPL . Hal ini sesuai dengan teori *bad management* oleh (Berger dan DeYoung, 1997). Di lain pihak meningkatnya profitabilitas juga dapat meningkatkan NPL hal tersebut dikemukakan oleh (Rajan, 1994) ketika kebijakan kredit bank tidak semata mata difokuskan untuk memaksimalkan laba, namun kebijakan kredit juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen bank untuk memperbaiki reputasi dan kinerja mereka dengan menerapkan kebijakan kredit liberal. Manajemen berusaha untuk meyakinkan pasar atau pemangku kepentingan mengenai kinerja kredit yang dilakukan oleh bank dengan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas saat ini namun hal tersebut akan berdampak pada peningkatan *NPL* di masa depan. Profitabilitas bank dapat dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.5)$$

4. Inefisiensi kegiatan operasional bank

Dampak dari efisiensi biaya operasional masih belum terlalu jelas, jika mengacu dari penelitian Berger dan DeYoung (1987), bank yang menggunakan sumber dana seminimal mungkin dalam melakukan pengawasan risiko pinjaman akan meningkatkan efisiensi biaya. Tingkat inefisiensi biaya operasional bank diukur menggunakan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini mengukur kualitas

manajemen bank dalam melakukan kegiatan operasional. Kualitas manajemen bank yang baik terlihat pada kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko yang muncul melalui kebijakan yang diterapkan. Semakin kecil rasio BOPO, menunjukkan bank mengalami peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan efisiensi kegiatan operasional bank karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya operasional dengan pendapatan operasional (Rivai,2013). BOPO dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.6)$$

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *NPL* sebagai berikut:

1. Ghosh (2015) meneliti mengenai faktor bank specific dan faktor ekonomi tingkat negara bagian yang mempengaruhi *NPL* di 50 negara bagian di Amerika. Sampel yang digunakan adalah seluruh bank yang terdaftar di setiap negara bagian yang tersedia di FDIC. Model analisis yang digunakan adalah *Fixed effect* dan *system-GMM estimation*. Hasil dari penelitian menunjukkan makin tingginya tingkat kapitalisasi bank, risiko likuiditas, lemahnya kualitas kredit, ketidakefisienan biaya dan ukuran industri perbankan secara signifikan meningkatkan *NPL* namun meningkatnya tingkat profitabilitas bank menurunkan tingkat *NPL* . Meningkatnya nilai *GDP* riil , pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara bagian

menurunkan *NPL*. sedangkan tingkat inflasi, tingkat pengangguran negara bagian dan tingkat hutang nasional secara signifikan meningkatkan *NPL*.

2. Dimitros *et. al.* (2016) meneliti mengenai determinan makroekonomi dan kinerja spesifik bank ,di negara negara Eropa periode 1990- 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan dan makroekonomi 15 negara eropa . Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *GMM estimation*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel makroekonomi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan *GDP* riil menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap *NPL*. Faktor spesifik bank terkait dengan kemampuan manajemen dan manajemen risiko menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan *NPL* dimasa depan, dan variabel pengaruh pajak pada pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*
3. Soebagio 2004 meneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya *non-performing loan* pada bank umum komersial di Indonesia periode 2000 – 2004. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan faktor makro ekonomi yang terdiri dari kurs, inflasi, dan GDP dimana kurs dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap *NPL* sedangkan GDP tidak berpengaruh signifikan. Faktor mikro yang terdiri dari CAR,KAP,tingkat bunga pinjaman, LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Tingkat pertumbuhan *GDP* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 2 : Tingkat Kurs berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 3 : Pertumbuhan kredit berpegaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 4 : Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 5 : Profitabilitas bank berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 6 : Inefisiensi operasional bank berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

2.3.2 Model analisis

Untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi (tingkat *GDP* dan tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (Pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank) terhadap *NPL*, maka akan digunakan model analisis regresi berganda sebagai metode estimasi dengan persamaan berikut:

$$(NPL_s)_{it} = \beta_1(RGDP)_t + \beta_2(KURS)_t + \beta_3(LDR)_{i,t} + \beta_4(KAP)_{i,t} + \beta_5(PROFIT)_{i,t} + \beta_6(BOPO)_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan :

$(NPL_s)_{it}$ = Prosentase dari *NPL* pada bank *i* periode *t*

$\beta_1(RGDP)_t$ = Pertumbuhan *GDP* riil pada periode *t*

$\beta_2(\text{KURS})_t =$ Tingkat kurs tengah pada periode t

$\beta_3(\text{LDR})_{i,t} =$ Tingkat loan to deposit ratio pada bank i periode t

$\beta_4(\text{KAP})_{i,t} =$ Tingkat kualitas aktiva produktif pada bank i periode t

$\beta_5(\text{PROFIT})_{i,t} =$ Tingkat return on asset ratio pada bank i periode t

$\beta_6(\text{BOPO})_{i,t} =$ Tingkat rasio beban operasional pada pendapatan operasional pada bank i periode t

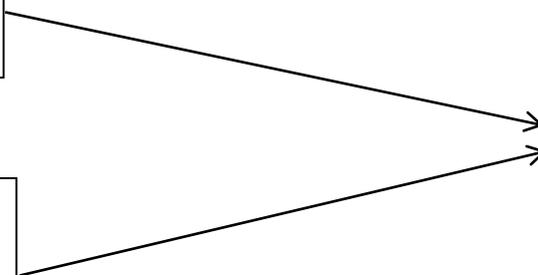
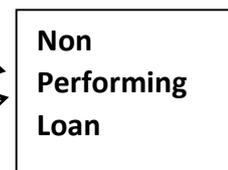
2.4 Kerangka berpikir

Sesuai dengan teori dan penelitian penelitian terdahulu dengan disesuaikan oleh kondisi yang ada di Indonesia maka variable-variabel yang mempengaruhi terjadinya NPL dapat digambarkan dengan pengembangan model sebagai berikut:

Faktor makroekonomi



Faktor spesifik bank



Gambar 2.1

Kerangka berpikir penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data-data yang terukur. Dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi variabel, definisi operasional dan teknik analisis.

3.2 Identifikasi variabel

Berdasarkan metode analisis penelitian dan hipotesis penelitian maka dapat diketahui variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen : faktor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product* dan Kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank)
2. Variabel dependen : *non-performing loan*

3.3 Definisi Operasional

Untuk memberi penjelasan mengenai gambaran variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi negara adalah mengukur *Gross domestic product* (GDP). Data *GDP* menggunakan data

laju pertumbuhan GDP menurut harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan merupakan data yang bersifat tahunan.

2. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Data kurs menggunakan rata rata kurs tengah terhadap US dollar tiap tahun. Tingkat kurs diperoleh menggunakan persamaan (2.2)
3. Pertumbuhan kredit dinilai dari total pinjaman dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh bank, rasio ini dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.3)
4. Kualitas aktiva produktif dinilai dari besarnya aktiva produktif yang diklasifikasikan atau dalam kategori (kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total aktiva produktif, rasio ini dapat diukur dengan rumus persamaan (2.4)
5. Profitabilitas bank dinilai menggunakan rasio profitabilitas *return on asset (ROA)* yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.5)
6. Inefisiensi operasional bank dinilai menggunakan rasio BOPO yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.6)
7. *Non-performing loan*, adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus persamaan (2.1)

3.4 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia berupa laporan keuangan perbankan yang terdapat dalam Laporan publikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan ojk.go.id dan data makroekonomi yang diperoleh melalui sumber website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia bps.go.id dan website resmi Bank Indonesia bi.go.id. Periode penelitian adalah tahun 2006 – 2016

3.5 Prosedur penentuan sampel

Sampel penelitian yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu, yang terdiri dari:

1. Bank yang diteliti adalah seluruh bank pembangunan daerah yang terdapat dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2006 – 2016.
2. Bank pembangunan daerah yang melaporkan laporannya pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2006-2016

3.6 Prosedur pengumpulan data

Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini serta penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik penelitian ini. Studi ini dilakukan

untuk memahami permasalahan dan mengetahui hasil penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebelumnya.

2. Survey lapangan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber dan diambil melalui berbagai webstie resmi yang menyangkut data yang diperlukan dalam penelitian.

3.7 Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Mengumpulkan variabel-variabel dalam penelitian untuk masing-masing bank pembangunan daerah selama periode tahun yang telah ditentukan yaitu tahun 2006-2016
2. Melakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah uji regresi berganda layak untuk dilakukan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain :

- a. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independennya.

Deteksi bebas adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan dua cara yaitu :

1. Besaran VIF (Variance Inflation Faktor) disekitar angka 1 dan angka Tolerance mendekati 1, dengan catatan bahwa angka Tolerance = $1 / \text{VIF}$ atau bisa juga $\text{VIF} = 1 / \text{Tolerance}$
2. Besaran koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas

b. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada prinsipnya menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Santoso, 2004). Selanjutnya dengan menggunakan Scatterplot Diagram, dapat dilakukan deteksi untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004). Untuk mendeteksi uji asumsi ini, dapat dilihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik Normal P-P Plof. Dasar pengambilan keputusannya adalah antara lain :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka bisa dikatakan terdapat problem autokorelasi. Deteksi untuk autokorelasi dengan cara :

1. Angka Durbin Watson dibawah -2 = tidak ada autokorelasi
 2. Angka Durbin Watson antara -2 sampai $+2$ = tidak ada autokorelasi
 3. Angka Durbin Watson diatas $+2$ = ada autokorelasi negatif
3. Melakukan analisis regresi kepada masing-masing variabel yang ditunjukkan pada persamaan (2.6) menggunakan aplikasi SPSS

4. Melakukan uji hipotesis menggunakan koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang dikehendaki adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_1 = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_1 : \beta_1 \neq 0$. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tahap pengujian uji t adalah sebagai berikut :

1. Menentukan formula *null hypothesis* statistik yang akan diuji dalam bentuk :

$H_{01} : \beta_1 \geq 0$; artinya tingkat GDP tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{11} : \beta_1 < 0$; artinya tingkat GDP berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{02} : \beta_1 \leq 0$; artinya kurs nilai tukar tidak berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{12} : \beta_1 > 0$; artinya kurs nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{03} : \beta_1 \leq 0$; artinya pertumbuhan kredit tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₃: $\beta_1 > 0$; artinya pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL

H0₄: $\beta_1 \leq 0$; artinya kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₄ : $\beta_1 > 0$; artinya kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap NPL

H0₅ : $\beta_1 \geq 0$; artinya profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

H1₅ : $\beta_1 < 0$; artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap NPL

H0₆ : $\beta_1 \leq 0$; artinya inefisiensi manajemen bank tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₆ : $\beta_1 > 0$; artinya inefisiensi manajemen bank berpengaruh positif terhadap NPL .

2. Merumuskan besar tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 5%, maka H₀ diterima. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 5% maka H₀ ditolak.
3. Menentukan koefisien determinan (R^2) yang menggambarkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin besar (mendekati 1) maka semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua bank pembangunan daerah (BPD) yang tercatat dalam Direktori Perbankan Indonesia tahun 2006-2016. Jumlah observasi dalam penelitian ini dalam jangka waktu 2006-2016 sebanyak 264. Data observasi lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian, akan dijabarkan hasil analisis data berdasarkan pengamatan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian dengan model analisis regresi linier berganda yang meliputi, jumlah observasi (N), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel *non-performing loan* dalam penelitian ini merupakan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas aktiva produktif (KAP), tingkat profitabilitas (PROFIT), tingkat efektifitas operasional (BOPO), tingkat pertumbuhan kredit (LDR), tingkat GDP (GDP), nilai tukar (KURS). Deskripsi statistik variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09 %	15,03 %	2,51 %	2,14470
GDP	264	4,63 %	6,49 %	5,64 %	,64307
KURS	264	9,08	9,51	9,25	,15150
LDR	264	36,50 %	241,54 %	95,84 %	28,62980
KAP	264	,06 %	10,99 %	1,76 %	1,54908
PROFIT	264	,01 %	13,86 %	4,15 %	2,02094
BOPO	264	54,45 %	180,09 %	91,05 %	33,14668

Sumber :Data Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai *NPL* terendah dalam sampel sebesar 0.09% hal ini mengindikasikan bahwa BPD telah mampu mengelola penyaluran dana dalam bentuk kredit secara baik dan selektif sehingga kredit bermasalah dapat diminimalisir. Nilai *NPL* tertinggi sebesar 15,03% mengindikasikan bahwa terdapat BPD yang dikategorikan tidak sehat dalam penyaluran kredit akibat dari tingginya nilai kredit macet yang dimiliki oleh BPD. Rata rata *NPL* BPD sebesar 2,51% yang berarti rata rata BPD telah mampu mengelola kredit secara baik karena rasio *NPL* berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Nilai GDP terendah sebesar 4,63% yang berarti menurunnya kinerja ekonomi Indonesia seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Nilai GDP tertinggi sebesar 6,49% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan didorong oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri. Rata-rata GDP

sebesar 5,64% yang mengindikasikan bahwa rata rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong rendah.

Nilai tukar mata uang terendah sebesar 9,08 tertinggi sebesar 9,51 dan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar 9,25. Semakin tinggi nilai tukar, maka rupiah sedang mengalami depresiasi nilai, hal itu dapat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengurangi kegiatan konsumsinya yang pada akhirnya ekonomi negara menjadi lesu. Kemampuan sektor usaha untuk mendapatkan hasil usaha menurun yang diikuti dengan menurunnya kemampuan sektor usaha untuk membayar hutang kembali .

Nilai LDR terendah sebesar 36,50% hal ini menunjukkan kemampuan BPD dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dalam kondisi baik. Nilai tertinggi LDR sebesar 241,54% , yang menunjukkan jumlah kredit yang diberikan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah deposito yang disimpan di BPD. Rata rata LDR BPD adalah 95,84 % yang mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola likuiditasnya dengan baik .

Nilai KAP terendah sebesar 0,06%, tertinggi adalah 10,99% . Tingginya rasio ini menggambarkan lemahnya kemampuan BPD dalam mengelola komposisi kreditnya sehingga tingkat kualitas kredit yang diklasifikasikan (kurang lancar, diragukan dan macet) tinggi. Rata rata komposisi kualitas kredit sebesar 1,76% hal ini mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola kualitas kredit mereka dengan baik.

Nilai profitabilitas terendah sebesar 0,01% dan tertinggi sebesar 13,86% semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besarnya tingkat profitabilitas bank, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk mendapat keuntungan. Rata-rata profitabilitas BPD sebesar 4,11% .

Nilai BOPO terendah sebesar 54,45% menunjukkan bahwa bank memiliki pendapatan melalui kegiatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban operasionalnya. Nilai BOPO tertinggi yaitu sebesar 180,09%, yang berarti bank menanggung beban operasional yang sangat tinggi. Rata-rata BOPO sebesar 91,05%.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Identifikasi statistik yang dapat dilakukan untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan menghitung *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*. Pada model regresi, apabila nilai *tolerance value* kurang dari 0,10 dan *VIF* lebih dari 10 dapat dikatakan bahwa telah terjadi multikolinieritas. Berdasarkan lampiran 4, menunjukkan bahwa nilai *tolerance value* lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti bergelombang atau meleber kemudian menyempit, maka terjadi Heterokedastisitas. Jika data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 6, titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil output statistik pada lampiran 5, diperoleh hasil perhitungan *Durbin-Watson (D-W)* sebesar 1,441. Nilai tersebut berada diantara nilai $-2 < dw < +2$. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal

atau mendekati normal ketika data menyebar disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dari grafik Normal P-P Plot. Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 3, model penelitian memenuhi uji normalitas.

4.4 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Analisa dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda yang dilakukan untuk melihat pengaruh faktor makroekonomi yang diprosikan dengan tingkat pertumbuhan GDP dan Kurs, serta faktor spesifik bank yang diukur dengan LDR, KAP, PROFIT, dan BOPO. Data diolah menggunakan program *IBM Statistic version 23*, dan hasil analisis regresi dijabarkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Variabel	Unstandardized Coeficient		Standardized Coeficient	Sig. t
	B	Std. Error	Beta	
Konstanta	3,871	3,183		0,225
GDP	-0,116	0,067	-0,035	0,086
KURS	-0,306	0,311	-0,022	0,326
LDR	-0,017	0,001	-0,227	0,000*
KAP	1,344	0,018	0,971	0,000*
PROFIT	0,020	0,018	0,018	0,273
BOPO	0,014	0,001	0,222	0,000*
R Square	0,960			

Keterangan : *Signifikan jika sig.t < 0,05

Sumber : Data hasil output spss

Berdasarkan penjabaran pada tabel 4.2, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel KAP, PROFIT, KURS dan BOPO memiliki pengaruh yang positif terhadap NPL, artinya semakin tinggi nilai KAP, PROFIT, KURS dan BOPO maka semakin meningkat pula NPL dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel KAP dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 ; sedangkan variabel PROFIT dan KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Variabel LDR dan GDP memiliki pengaruh negatif terhadap NPL artinya semakin tinggi nilai LDR, dan GDP maka akan menurunkan nilai NPL. Variabel GDP dan tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan sedangkan variabel LDR memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikan kurang dari 0,05.

Nilai R Square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R square pada hasil analisis ini adalah 0,961, artinya 96% variabel NPL dapat dijelaskan oleh variabel GDP , KURS, LDR, KAP, PROFIT, BOPO dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dijabarkan pada tabel 4.2 , variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional yang mengalami peningkatan akan berdampak menurunkan risiko kredit perbankan yang diukur menggunakan NPL. Pertumbuhan GDP akan meningkatkan aktivitas ekonomi , pendapatan masyarakat mengalami peningkatan , penjualan oleh perusahaan juga akan

mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kredit di bank sehingga menurunkan rasio NPL. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimitrios *et. al.* (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini disebabkan oleh data GDP yang sedikit dan tidak berfluktuasi menyebabkan GDP kurang berpengaruh signifikan.

Variabel KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan NPL pada Bank Pembangunan Daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Soebagio (2005) yang menyatakan perubahan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat NPL pada perbankan terutama bagi debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dikarenakan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk memikulnya. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur.

Variabel LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Rasio LDR menunjukkan preferensi risiko yang dimiliki bank dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rivai, 2013). LDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sesuai dengan hasil penelitian Soebagio (2005) mengutip analisis Kadarusman *et. al.* (2004), terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.

Variabel KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Sebagaimana dikutip oleh Ghosh (2015) penelitian Keeton & Morris (1987) Komposisi kualitas kredit memiliki peran penting sebagai indikator gambaran risiko bank. Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan NPL bank. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik komposisi atau kualitas dari portofolio kredit yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio KAP, maka semakin mengurangi terjadinya NPL.

Variabel PROFIT memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi NPL pada BPD. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian (Ghosh,2015) dan (Dimitrios; *et. al.* 2016) yang menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL bank, namun sesuai dengan model dari (Rajan, 1994) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap NPL ketika penentuan kebijakan kredit bank tidak

berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba. Manajemen bank dapat meningkatkan profitabilitas masa kini dengan mengorbankan kualitas kredit dimasa mendatang dengan cara memperpanjang waktu kredit sehingga debitur yang menunggak pada periode yang seharusnya memasuki kategori diklasifikasikan tidak masuk dalam perhitungan, memberi kredit baru pada debitur yang tidak mampu membayar sehingga mereka seakan akan mampu membayar kredit mereka secara lancar (Rajan, 1994).

Variabel BOPO memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. (Rivai, 2013). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya NPL dapat dihindarkan. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai BOPO, semakin rendah pula NPL yang dimiliki BPD.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 264 observasi penelitian pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada tahun 2006 – 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Gros domestic product* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *NPL*, karena peningkatan sektor ekonomi pada suatu negara akan meningkatkan kemampuan debitur dalam melunasi pembayaran kredit pada bank sehingga dapat menurunkan *NPL*
2. Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *NPL*. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan terhadap hasil ini adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur..
3. Variabel kualitas aktiva produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPL* Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan *NPL* bank.
4. Variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi *NPL* pada BPD sehingga terdapat indikasi

pengambilan keputusan oleh manajemen dalam penentuan kebijakan kredit bank tidak berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba

5. Variabel pertumbuhan kredit yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.
6. Variabel inefisiensi operasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL karena semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya berdampak pada penurunan NPL.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pada bank khususnya BPD yang tentu memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai.
2. Manajemen BPD harus lebih baik dalam menentukan kebijakan kredit bank dan aspek ke hati-hatian dalam penyaluran kredit kepada calon debitur selalu dikedepankan sehingga kredit macet dapat dihindarkan.
3. Bagi BPD harus lebih meningkatkan kemampuan manajemen jika ingin merubah prioritas aktivitas kredit pada sektor produktif yang tentu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor konsumtif, sehingga risiko gagal bayar oleh debitur dapat dihindarkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto agar lebih spesifik dalam mengukur kondisi perekonomian daerah sebagai faktor *non-performing loan* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., T., 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, M., 2004. Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Gramedia
- Berg, T., Koziol, P., 2015. An analysis of the consistency of banks' internal ratings
- Darmawan., 2004. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan. Keputusan Jangka Panjang, Edisi III, Cetakan I. Yogyakarta :Liberty
- Dimitros. A.O., Helen. L., Mike. T., 2016. Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries
- Firdaus dan Ariyanti. 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Cetakan Kelima, Bandung : Alfabeta
- Ghosh, A., 2015. Banking-industry spesific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states
- Hendro, R., 2014. Bank dan Institusi keuangan non-bank di Indonesia, Jakarta : UPP STIM YKPN
- Keeton, W., 1999. Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses? Federal Reserve Bank of Kansas City Econ Rev., Second Quarter., pp. 57–75.
- Keeton, W., Morris, C., 1987. Why do banks' loan losses differ ? Federal Reserve Bank of Kansas City. Econ. Rev.,3-21
- Latumaerissa., 1996. Esensi-Esensi Perbankan Internasional Cetakan Pertama., Jakarta : Bumi Aksara
- Mohamad, K., 2017. “Omong Besar Pertumbuhan Kredit”, Majalah InfoBank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta
- Rajan, R., 1994. Why bank policies fluctuate: a theory and some evidence. Q. J. Econ. 109, 399-411
- Rivai., B., Sudarto., veithzal., 2013. Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Santoso, S., 2004. Buku Latihan : SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Siamat, D.,1995. Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta
- Soebagio, H., 2005. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank mum Komersial, Universitas Diponegoro , Semarang
- Sudremi, Y., 2007. Pengetahuan Sosial Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta
- Wirjosukarto, D., 2017. “Menilai Jeroan Bank Dengan Empat Pendekatan”, Majalah Infobank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Perhitungan Seluruh Variabel Penelitian Periode 2006-2016

No	Nama	Tahun	NPL	KAP	ROA	BOPO	LDR	GDP	KURS
1	BPD Jatim	2006	1,04	0,44	8,21	143,26	83,88	5,50	9,123
2	BPD Jatim	2007	1,12	0,47	7,62	137,63	80,86	6,35	9,120
3	BPD Jatim	2008	1,41	0,66	7,49	135,62	96,15	6,01	9,178
4	BPD Jatim	2009	1,05	0,76	3,75	66,04	69,67	4,63	9,249
5	BPD Jatim	2010	0,65	0,51	5,57	59,38	80,70	6,22	9,114
6	BPD Jatim	2011	0,97	0,77	4,97	60,02	80,11	6,49	9,080
7	BPD Jatim	2012	2,95	2,21	3,34	68,89	83,55	6,26	9,147
8	BPD Jatim	2013	3,44	2,95	3,82	70,28	84,98	5,73	9,255
9	BPD Jatim	2014	3,31	2,64	3,52	69,63	86,54	5,06	9,382
10	BPD Jatim	2015	4,29	3,59	2,67	76,11	82,92	4,88	9,507
11	BPD Jatim	2016	4,77	3,70	2,98	72,22	90,48	5,03	9,508
12	BPD Jabar	2006	0,86	0,61	6,48	152,58	163,00	5,50	9,123
13	BPD Jabar	2007	1,11	0,73	7,52	159,58	154,69	6,35	9,120
14	BPD Jabar	2008	1,48	0,99	5,80	154,15	168,46	6,01	9,178
15	BPD Jabar	2009	1,97	1,25	3,24	77,30	82,47	4,63	9,249
16	BPD Jabar	2010	1,86	1,11	3,15	76,60	71,14	6,22	9,114
17	BPD Jabar	2011	1,21	0,73	2,65	80,02	72,95	6,49	9,080
18	BPD Jabar	2012	2,07	1,27	2,46	80,02	74,09	6,26	9,147
19	BPD Jabar	2013	2,83	2,21	2,61	79,41	96,47	5,73	9,255
20	BPD Jabar	2014	4,15	3,35	1,94	85,94	93,18	5,06	9,382
21	BPD Jabar	2015	2,91	2,22	2,04	83,31	88,13	4,88	9,507
22	BPD Jabar	2016	1,69	1,26	2,22	82,70	86,70	5,03	9,508
23	BPD Jateng	2006	1,13	0,72	8,43	142,14	127,54	5,50	9,123
24	BPD Jateng	2007	1,00	0,66	3,04	145,71	136,07	6,35	9,120
25	BPD Jateng	2008	0,65	0,56	8,35	148,18	178,21	6,01	9,178
26	BPD Jateng	2009	0,26	0,27	4,04	71,33	89,18	4,63	9,249
27	BPD Jateng	2010	0,53	0,41	2,83	79,61	74,13	6,22	9,114
28	BPD Jateng	2011	1,04	0,72	2,67	79,11	70,17	6,49	9,080
29	BPD Jateng	2012	0,80	0,67	2,73	76,35	82,26	6,26	9,147
30	BPD Jateng	2013	0,72	0,59	3,01	72,88	86,96	5,73	9,255
31	BPD Jateng	2014	0,93	0,79	2,84	75,67	88,57	5,06	9,382
32	BPD Jateng	2015	1,26	1,09	2,60	76,05	90,54	4,88	9,507

33	BPD Jateng	2016	1,45	1,26	2,60	76,18	95,05	5,03	9,508
34	BPD DKI	2009	5,76	2,76	1,41	88,46	57,25	4,63	9,249
35	BPD DKI	2010	3,73	1,89	2,24	83,02	70,48	6,22	9,114
36	BPD DKI	2011	3,12	2,22	2,32	79,74	73,03	6,49	9,080
37	BPD DKI	2012	3,20	2,19	1,87	81,43	73,50	6,26	9,147
38	BPD DKI	2013	2,38	1,77	3,15	74,99	92,50	5,73	9,255
39	BPD DKI	2014	4,38	3,08	2,10	80,26	92,57	5,06	9,382
40	BPD DKI	2015	7,96	5,23	0,89	90,99	91,14	4,88	9,507
41	BPD DKI	2016	5,35	4,14	2,29	77,82	87,41	5,03	9,508
42	BPD DIY	2006	2,50	1,46	6,99	148,68	121,10	5,50	9,123
43	BPD DIY	2007	2,65	1,47	5,85	154,96	104,12	6,35	9,120
44	BPD DIY	2008	2,50	1,58	5,78	154,78	129,06	6,01	9,178
45	BPD DIY	2009	1,36	0,82	3,23	75,15	79,33	4,63	9,249
46	BPD DIY	2010	1,39	0,97	2,79	73,53	70,24	6,22	9,114
47	BPD DIY	2011	1,19	0,91	2,69	74,96	78,71	6,49	9,080
48	BPD DIY	2012	0,84	0,69	2,56	74,85	71,89	6,26	9,147
49	BPD DIY	2013	0,90	0,67	2,71	72,75	73,67	5,73	9,255
50	BPD DIY	2014	1,23	0,94	2,88	72,64	80,34	5,06	9,382
51	BPD DIY	2015	1,05	0,78	2,94	71,89	80,99	4,88	9,507
52	BPD DIY	2016	3,40	2,33	3,05	70,15	80,84	5,03	9,508
53	BPD Aceh	2006	2,30	0,55	5,12	147,52	44,10	5,50	9,123
54	BPD Aceh	2007	1,63	0,43	6,13	138,74	50,42	6,35	9,120
55	BPD Aceh	2008	1,98	0,67	6,16	139,25	69,59	6,01	9,178
56	BPD Aceh	2009	1,69	0,83	3,06	71,39	61,79	4,63	9,249
57	BPD Aceh	2010	7,02	5,17	1,80	92,98	81,74	6,22	9,114
58	BPD Aceh	2011	3,69	2,90	2,91	77,36	91,42	6,49	9,080
59	BPD Aceh	2012	3,30	2,64	3,66	71,51	89,89	6,26	9,147
60	BPD Aceh	2013	2,78	2,15	3,44	70,72	86,80	5,73	9,255
61	BPD Aceh	2014	2,58	1,98	3,13	74,11	92,38	5,06	9,382
62	BPD Aceh	2015	2,30	1,64	2,48	76,07	84,05	4,88	9,507
63	BPD Aceh	2016	1,39	0,93	2,83	83,05	84,59	5,03	9,508
64	BPD Sumut	2006	6,94	3,79	6,98	158,21	100,47	5,50	9,123
65	BPD Sumut	2007	4,63	2,58	6,82	154,92	99,94	6,35	9,120
66	BPD Sumut	2009	2,47	2,19	4,42	69,86	97,87	4,63	9,249
67	BPD Sumut	2010	3,02	2,72	4,55	68,65	91,04	6,22	9,114
68	BPD Sumut	2011	2,56	1,93	3,26	75,99	78,56	6,49	9,080
69	BPD Sumut	2012	2,81	2,47	2,99	77,76	101,90	6,26	9,147
70	BPD Sumut	2013	3,83	3,47	3,37	74,22	107,31	5,73	9,255
71	BPD Sumut	2014	5,47	4,73	2,60	80,30	95,89	5,06	9,382

72	BPD Sumut	2015	5,00	4,28	2,31	82,16	94,08	4,88	9,507
73	BPD Sumut	2016	4,70	4,03	2,74	79,54	93,89	5,03	9,508
74	BPD Sumsel	2006	5,80	2,86	2,85	175,75	79,96	5,50	9,123
75	BPD Sumsel	2007	4,75	1,68	2,86	171,44	79,21	6,35	9,120
76	BPD Sumsel	2008	4,28	1,49	3,52	165,53	97,72	6,01	9,178
77	BPD Sumsel	2009	2,42	1,75	2,51	78,09	79,03	4,63	9,249
78	BPD Sumsel	2010	1,33	1,17	2,71	80,81	71,17	6,22	9,114
79	BPD Sumsel	2011	1,46	1,27	2,56	80,64	75,19	6,49	9,080
80	BPD Sumsel	2012	6,82	5,25	1,90	82,28	75,98	6,26	9,147
81	BPD Sumsel	2014	7,10	5,86	2,13	81,54	85,97	5,06	9,382
82	BPD Sumsel	2015	6,17	3,75	2,18	81,44	95,43	4,88	9,507
83	BPD Riau	2007	3,04	0,75	6,21	135,48	47,11	6,35	9,120
84	BPD Riau	2008	2,86	0,97	5,38	141,23	73,24	6,01	9,178
85	BPD Riau	2009	1,38	0,91	2,68	73,83	88,24	4,63	9,249
86	BPD Riau	2010	2,45	1,63	3,98	68,93	75,42	6,22	9,114
87	BPD Riau	2011	2,57	1,79	2,62	75,15	65,74	6,49	9,080
88	BPD Riau	2012	2,95	1,85	2,95	75,07	66,49	6,26	9,147
89	BPD Riau	2013	2,81	1,92	3,00	69,12	87,60	5,73	9,255
90	BPD Riau	2014	2,79	1,80	3,37	70,59	77,72	5,06	9,382
91	BPD Riau	2015	4,12	3,56	1,69	83,86	112,61	4,88	9,507
92	BPD Riau	2016	4,16	3,39	2,75	75,44	125,19	5,03	9,508
93	BPD Sumbar	2006	8,08	5,90	7,38	149,16	165,14	5,50	9,123
94	BPD Sumbar	2007	7,70	5,34	5,94	154,61	144,98	6,35	9,120
95	BPD Sumbar	2008	7,66	5,91	6,00	153,07	168,71	6,01	9,178
96	BPD Sumbar	2009	3,30	2,59	2,71	79,85	87,72	4,63	9,249
97	BPD Sumbar	2010	3,31	2,47	3,51	76,34	84,41	6,22	9,114
98	BPD Sumbar	2011	2,76	2,23	2,68	78,82	91,69	6,49	9,080
99	BPD Sumbar	2012	2,69	2,31	2,65	77,62	100,35	6,26	9,147
100	BPD Sumbar	2013	2,29	1,91	2,64	78,27	99,13	5,73	9,255
101	BPD Sumbar	2014	2,52	2,06	1,94	84,51	98,34	5,06	9,382
102	BPD Sumbar	2015	2,74	2,24	2,28	81,75	99,24	4,88	9,507
103	BPD Sumbar	2016	3,07	2,48	2,19	81,75	98,02	5,03	9,508
104	BPD Jambi	2006	2,01	1,01	8,13	133,08	91,03	5,50	9,123
105	BPD Jambi	2007	1,32	0,76	6,88	144,84	97,75	6,35	9,120
106	BPD Jambi	2008	0,89	0,68	8,31	133,71	149,49	6,01	9,178
107	BPD Jambi	2009	0,56	0,46	5,16	62,94	97,64	4,63	9,249
108	BPD Jambi	2010	0,40	0,33	5,21	57,55	84,09	6,22	9,114
109	BPD Jambi	2011	0,36	0,24	3,28	61,16	66,55	6,49	9,080
110	BPD Jambi	2012	0,33	0,24	3,58	63,32	82,29	6,26	9,147

111	BPD Jambi	2013	0,41	0,35	4,14	62,07	110,13	5,73	9,255
112	BPD Jambi	2014	0,48	0,35	3,14	71,45	100,83	5,06	9,382
113	BPD Jambi	2015	1,10	0,77	2,43	77,26	106,00	4,88	9,507
114	BPD Jambi	2016	0,40	0,26	2,92	71,89	103,09	5,03	9,508
115	BPD Bengkulu	2006	4,24	3,69	6,54	147,24	122,97	5,50	9,123
116	BPD Bengkulu	2007	3,57	3,00	5,32	151,21	122,31	6,35	9,120
117	BPD Bengkulu	2008	2,47	2,02	6,39	146,90	167,39	6,01	9,178
118	BPD Bengkulu	2009	1,52	1,13	3,14	75,16	129,59	4,63	9,249
119	BPD Bengkulu	2010	1,66	1,51	4,60	70,24	89,20	6,22	9,114
120	BPD Bengkulu	2011	0,67	0,64	3,17	78,12	75,14	6,49	9,080
121	BPD Bengkulu	2012	0,22	0,18	3,41	73,27	93,27	6,26	9,147
122	BPD Bengkulu	2013	0,38	0,32	4,01	68,99	105,04	5,73	9,255
123	BPD Bengkulu	2014	0,39	0,29	3,70	72,41	86,06	5,06	9,382
124	BPD Bengkulu	2015	0,39	0,31	2,88	77,06	91,38	4,88	9,507
125	BPD Bengkulu	2016	0,33	0,24	2,78	77,72	93,95	5,03	9,508
126	BPD Lampung	2006	2,36	1,71	5,83	159,10	129,93	5,50	9,123
127	BPD Lampung	2007	2,32	1,97	5,26	159,06	174,04	6,35	9,120
128	BPD Lampung	2009	1,47	1,18	3,26	76,32	99,36	4,63	9,249
129	BPD Lampung	2010	1,20	0,68	5,18	66,13	89,46	6,22	9,114
130	BPD Lampung	2011	0,87	0,46	3,13	73,69	80,23	6,49	9,080
131	BPD Lampung	2012	0,74	0,40	2,80	75,05	91,73	6,26	9,147
132	BPD Lampung	2013	0,76	0,60	1,89	80,86	110,56	5,73	9,255
133	BPD Lampung	2014	1,06	0,86	3,89	112,96	112,96	5,06	9,382
134	BPD Lampung	2015	1,12	0,74	3,25	68,73	87,66	4,88	9,507
135	BPD Lampung	2016	1,25	0,92	2,85	74,08	101,06	5,03	9,508
136	BPD Kalbar	2006	1,46	0,63	6,87	160,67	89,42	5,50	9,123
137	BPD Kalbar	2007	0,78	0,32	3,88	169,26	85,34	6,35	9,120
138	BPD Kalbar	2008	0,34	0,17	4,69	164,62	114,64	6,01	9,178
139	BPD Kalbar	2009	0,09	0,06	3,80	81,35	87,76	4,63	9,249
140	BPD Kalbar	2010	0,13	0,06	4,17	70,23	84,34	6,22	9,114
141	BPD Kalbar	2011	0,15	0,11	3,45	76,97	77,51	6,49	9,080
142	BPD Kalbar	2012	0,17	0,13	3,33	71,33	86,80	6,26	9,147
143	BPD Kalbar	2013	0,35	0,29	3,42	70,12	87,20	5,73	9,255
144	BPD Kalbar	2014	0,48	0,42	3,19	71,77	87,09	5,06	9,382
145	BPD Kalbar	2015	0,56	0,46	2,91	73,20	82,70	4,88	9,507
146	BPD Kalbar	2016	0,70	0,57	2,88	72,80	86,69	5,03	9,508
147	BPD Kalsel	2006	5,76	3,02	5,97	149,65	68,45	5,50	9,123
148	BPD Kalsel	2007	5,07	2,02	5,82	146,89	65,42	6,35	9,120
149	BPD Kalsel	2008	3,48	1,58	5,67	152,55	89,58	6,01	9,178

150	BPD Kalsel	2009	1,21	0,80	3,77	65,87	67,96	4,63	9,249
151	BPD Kalsel	2010	1,12	0,75	4,68	68,74	77,32	6,22	9,114
152	BPD Kalsel	2011	0,96	0,62	2,81	74,68	63,30	6,49	9,080
153	BPD Kalsel	2012	1,83	0,62	1,27	79,40	55,77	6,26	9,147
154	BPD Kalsel	2013	1,80	1,52	2,33	76,00	85,38	5,73	9,255
155	BPD Kalsel	2014	3,86	2,83	2,68	75,15	91,44	5,06	9,382
156	BPD Kalsel	2015	4,33	3,32	2,20	79,62	100,55	4,88	9,507
157	BPD Kalsel	2016	4,23	3,69	2,60	79,91	106,53	5,03	9,508
158	BPD Kaltim	2006	2,88	0,55	6,88	132,46	40,84	5,50	9,123
159	BPD Kaltim	2007	3,24	0,65	6,63	133,31	41,95	6,35	9,120
160	BPD Kaltim	2008	3,55	0,93	7,89	120,16	57,73	6,01	9,178
161	BPD Kaltim	2009	1,37	0,93	3,81	63,69	69,11	4,63	9,249
162	BPD Kaltim	2010	3,30	2,36	5,23	55,29	81,69	6,22	9,114
163	BPD Kaltim	2011	2,90	2,24	3,70	63,86	59,95	6,49	9,080
164	BPD Kaltim	2012	7,45	4,93	2,50	68,19	56,78	6,26	9,147
165	BPD Kaltim	2013	6,74	4,56	2,78	71,30	90,77	5,73	9,255
166	BPD Kaltim	2014	10,36	6,54	2,60	80,39	78,54	5,06	9,382
167	BPD Kaltim	2015	10,35	7,23	1,56	85,30	103,54	4,88	9,507
168	BPD Kaltim	2016	8,46	7,08	2,99	78,97	101,17	5,03	9,508
169	BPD Kalteng	2009	1,82	1,05	2,34	68,47	85,13	4,63	9,249
170	BPD Kalteng	2010	1,12	0,97	3,89	64,24	88,72	6,22	9,114
171	BPD Kalteng	2011	0,81	0,72	3,88	63,31	68,74	6,49	9,080
172	BPD Kalteng	2012	0,84	0,77	3,41	69,93	71,88	6,26	9,147
173	BPD Kalteng	2013	0,81	0,67	3,52	64,63	77,45	5,73	9,255
174	BPD Kalteng	2014	0,82	0,70	4,09	61,07	79,82	5,06	9,382
175	BPD Kalteng	2015	0,47	0,47	4,34	59,52	106,34	4,88	9,507
176	BPD Kalteng	2016	0,41	0,39	4,24	64,04	99,63	5,03	9,508
177	BPD Sulsel	2006	4,27	2,28	10,45	115,15	134,10	5,50	9,123
178	BPD Sulsel	2007	3,11	3,37	11,24	116,67	144,02	6,35	9,120
179	BPD Sulsel	2009	2,40	1,90	5,56	57,09	114,79	4,63	9,249
180	BPD Sulsel	2010	2,02	1,68	5,58	65,81	109,98	6,22	9,114
181	BPD Sulsel	2011	2,06	1,75	4,49	70,65	87,37	6,49	9,080
182	BPD Sulsel	2012	2,09	1,55	4,36	63,56	78,73	6,26	9,147
183	BPD Sulsel	2013	1,19	1,05	4,20	68,06	113,69	5,73	9,255
184	BPD Sulsel	2014	0,86	0,75	4,71	65,25	108,63	5,06	9,382
185	BPD Sulsel	2015	0,65	0,58	4,90	63,82	117,17	4,88	9,507
186	BPD Sulsel	2016	0,51	0,47	4,96	60,13	103,00	5,03	9,508
187	BPD Sultra	2007	3,34	3,21	13,86	102,10	110,06	6,35	9,120
188	BPD Sultra	2010	5,75	3,64	6,62	64,75	97,52	6,22	9,114

189	BPD Sultra	2011	2,24	1,31	7,44	54,45	83,68	6,49	9,080
190	BPD Sultra	2012	1,33	0,75	5,10	59,56	92,02	6,26	9,147
191	BPD Sultra	2013	1,64	1,26	4,43	62,60	96,71	5,73	9,255
192	BPD Sultra	2014	2,86	2,35	4,13	71,67	111,84	5,06	9,382
193	BPD Sultra	2015	2,90	2,50	3,41	76,41	94,44	4,88	9,507
194	BPD Sultra	2016	2,30	1,78	3,87	73,42	97,72	5,03	9,508
195	BPD Sulteng	2009	8,81	6,05	4,34	65,13	100,44	4,63	9,249
196	BPD Sulteng	2012	4,49	2,88	1,59	80,60	107,27	6,26	9,147
197	BPD Sulteng	2013	2,92	2,12	3,39	65,87	128,43	5,73	9,255
198	BPD Sulteng	2014	1,40	1,18	3,73	69,27	120,44	5,06	9,382
199	BPD Sulteng	2015	1,71	1,12	3,10	71,60	80,62	4,88	9,507
200	BPD Sulteng	2016	1,36	0,94	2,91	72,82	91,11	5,03	9,508
201	BPD Sulut	2006	2,13	1,04	11,62	147,66	125,93	5,50	9,123
202	BPD Sulut	2007	2,37	1,36	7,61	162,04	133,28	6,35	9,120
203	BPD Sulut	2008	2,94	1,83	5,57	166,82	163,24	6,01	9,178
204	BPD Sulut	2009	0,51	0,37	1,89	89,84	104,98	4,63	9,249
205	BPD Sulut	2010	0,98	0,77	3,04	85,09	100,25	6,22	9,114
206	BPD Sulut	2011	1,26	0,98	2,01	84,96	99,78	6,49	9,080
207	BPD Sulut	2012	0,81	0,72	2,95	77,45	109,62	6,26	9,147
208	BPD Sulut	2013	0,54	0,46	2,16	75,56	112,94	5,73	9,255
209	BPD Sulut	2014	1,29	1,07	3,48	83,76	90,10	5,06	9,382
210	BPD Sulut	2015	0,97	0,86	1,56	87,35	95,09	4,88	9,507
211	BPD Sulut	2016	0,94	0,85	2,00	86,68	103,68	5,03	9,508
212	BPD Bali	2006	2,88	2,20	9,80	134,85	167,53	5,50	9,123
213	BPD Bali	2007	2,82	2,19	9,11	138,57	161,94	6,35	9,120
214	BPD Bali	2008	2,24	1,83	8,65	143,49	170,96	6,01	9,178
215	BPD Bali	2009	0,68	0,66	4,26	66,72	103,75	4,63	9,249
216	BPD Bali	2010	0,57	0,44	3,98	68,96	93,31	6,22	9,114
217	BPD Bali	2011	0,57	0,45	3,54	69,74	82,73	6,49	9,080
218	BPD Bali	2012	0,45	0,34	4,28	62,82	80,60	6,26	9,147
219	BPD Bali	2013	0,33	0,26	3,97	63,03	87,87	5,73	9,255
220	BPD Bali	2014	0,35	0,28	3,92	64,89	96,41	5,06	9,382
221	BPD Bali	2015	1,96	1,59	3,33	69,67	97,32	4,88	9,507
222	BPD Bali	2016	1,47	1,22	3,76	66,51	102,75	5,03	9,508
223	BPD NTT	2006	1,19	1,11	9,43	131,72	140,74	5,50	9,123
224	BPD NTT	2007	1,48	1,31	8,77	133,81	152,58	6,35	9,120
225	BPD NTT	2008	2,08	1,86	8,98	134,41	198,05	6,01	9,178
226	BPD NTT	2009	1,50	1,36	4,05	70,68	122,79	4,63	9,249
227	BPD NTT	2010	2,49	1,84	4,30	72,10	91,77	6,22	9,114

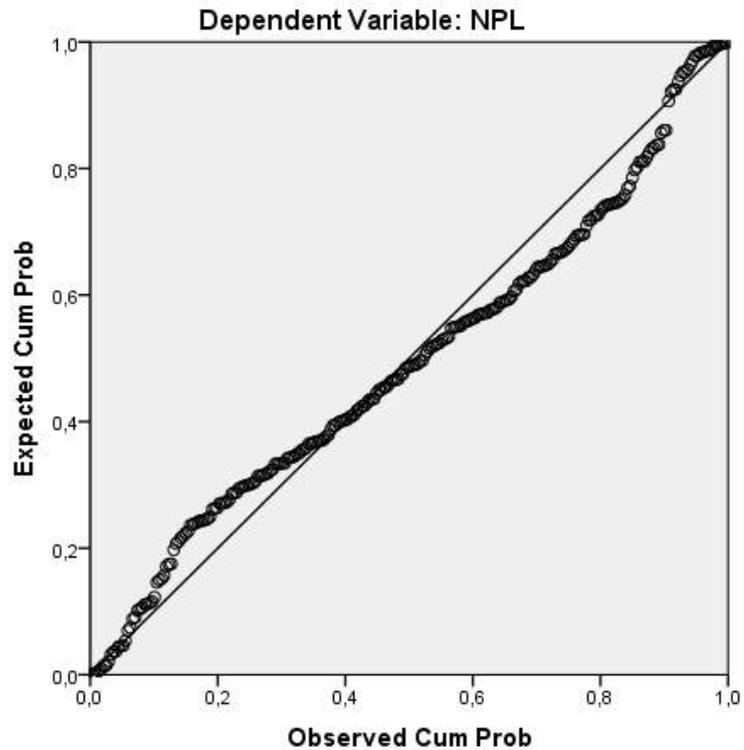
228	BPD NTT	2011	1,20	0,93	4,19	71,04	92,95	6,49	9,080
229	BPD NTT	2012	1,20	0,87	3,65	71,57	93,45	6,26	9,147
230	BPD NTT	2013	1,30	1,00	3,96	67,13	96,36	5,73	9,255
231	BPD NTT	2014	1,52	1,16	3,72	69,24	87,68	5,06	9,382
232	BPD NTT	2015	2,32	1,87	3,44	69,28	90,09	4,88	9,507
233	BPD NTT	2016	2,34	2,11	2,94	75,72	107,39	5,03	9,508
234	BPD NTB	2006	2,84	2,49	6,03	160,28	189,11	5,50	9,123
235	BPD NTB	2007	5,46	4,72	5,22	170,44	200,74	6,35	9,120
236	BPD NTB	2008	7,02	5,83	7,48	161,15	241,54	6,01	9,178
237	BPD NTB	2009	4,07	3,83	4,39	75,02	115,50	4,63	9,249
238	BPD NTB	2010	2,92	2,41	6,27	72,43	102,23	6,22	9,114
239	BPD NTB	2011	2,17	2,01	5,71	68,81	101,45	6,49	9,080
240	BPD NTB	2012	1,98	1,75	5,62	64,32	108,41	6,26	9,147
241	BPD NTB	2013	1,73	1,50	5,10	64,19	105,56	5,73	9,255
242	BPD NTB	2014	1,46	1,14	4,61	66,00	99,78	5,06	9,382
243	BPD NTB	2015	1,31	1,19	4,27	67,19	100,87	4,88	9,507
244	BPD NTB	2016	1,20	1,11	3,95	68,69	97,66	5,03	9,508
245	BPD Maluku	2006	9,68	6,15	2,46	180,09	101,78	5,50	9,123
246	BPD Maluku	2008	7,31	4,08	4,84	162,54	113,17	6,01	9,178
247	BPD Maluku	2009	3,00	2,41	3,78	73,88	94,56	4,63	9,249
248	BPD Maluku	2010	3,62	2,89	3,63	75,30	102,68	6,22	9,114
249	BPD Maluku	2011	2,48	1,60	4,52	70,14	82,44	6,49	9,080
250	BPD Maluku	2012	2,67	1,61	3,25	73,90	78,61	6,26	9,147
251	BPD Maluku	2013	2,46	1,73	3,34	72,78	90,86	5,73	9,255
252	BPD Maluku	2014	2,38	1,97	0,01	99,56	92,26	5,06	9,382
253	BPD Maluku	2015	2,37	1,69	3,56	70,98	85,28	4,88	9,507
254	BPD Maluku	2016	1,95	1,27	3,15	71,84	86,87	5,03	9,508
255	BPD Papua	2006	3,96	0,95	6,22	156,44	52,44	5,50	9,123
256	BPD Papua	2007	3,91	0,78	5,98	147,93	40,69	6,35	9,120
257	BPD Papua	2008	3,38	0,79	6,44	141,31	49,99	6,01	9,178
258	BPD Papua	2009	1,81	0,56	3,23	69,72	36,50	4,63	9,249
259	BPD Papua	2010	0,95	0,33	2,86	70,67	43,88	6,22	9,114
260	BPD Papua	2011	1,09	0,45	3,01	69,44	48,01	6,49	9,080
261	BPD Papua	2012	0,84	0,51	2,81	74,15	71,65	6,26	9,147
262	BPD Papua	2013	1,14	0,78	2,86	72,01	84,48	5,73	9,255
263	BPD Papua	2014	7,33	5,13	1,02	91,38	80,12	5,06	9,382
264	BPD Papua	2016	15,03	10,99	1,28	91,14	85,76	5,03	9,508

Lampiran 2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09	15,03	2,5094	2,14470
GDP	264	4,63	6,49	5,6372	,64307
LnKURS	264	9,08	9,51	9,2469	,15150
LDR	264	36,50	241,54	95,8415	28,62980
KAP	264	,06	10,99	1,7560	1,54908
ROA	264	,01	13,86	4,1052	2,02094
BOPO	264	54,45	180,09	91,0494	33,14668
Valid N (listwise)	264				

Lampiran 3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,871	3,183		1,216	,225		
GDP	-,116	,067	-,035	-1,725	,086	,375	2,664
LnKURS	-,306	,311	-,022	-,984	,326	,318	3,144
LDR	-,017	,001	-,227	-15,062	,000	,671	1,490
KAP	1,344	,018	,971	73,046	,000	,866	1,155
ROA	,020	,018	,018	1,099	,273	,540	1,853
BOPO	,014	,001	,222	14,070	,000	,612	1,633

a. Dependent Variable: NPL

Lampiran 5**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,960	,43025	1,433

a. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

b. Dependent Variable: NPL

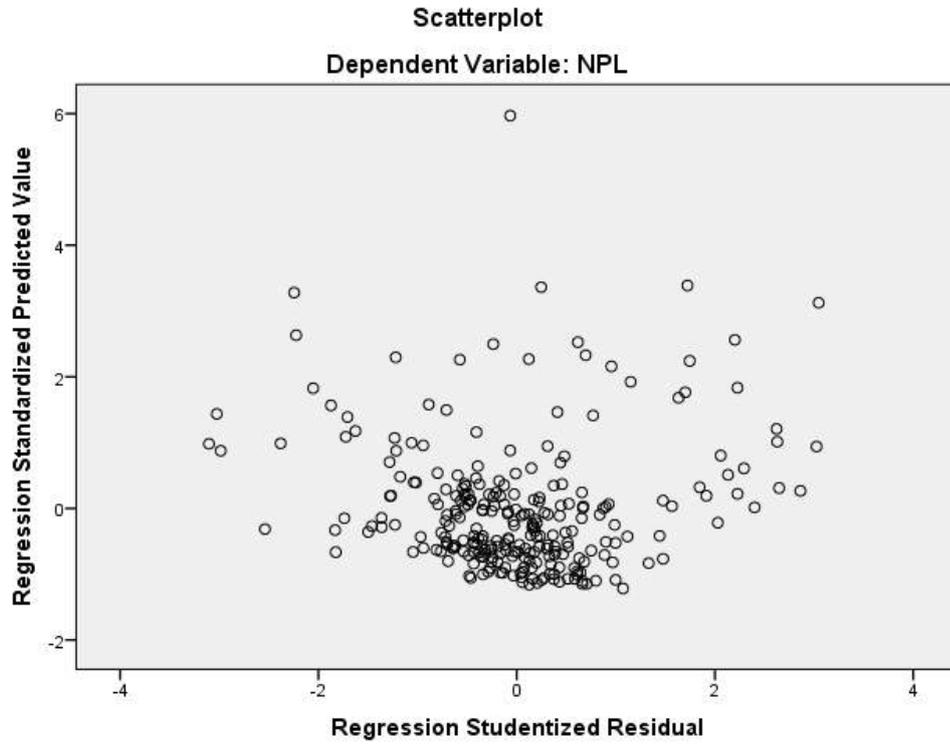
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1162,154	6	193,692	1046,343	,000 ^b
	Residual	47,574	257	,185		
	Total	1209,728	263			

a. Dependent Variable: NPL

b. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

Lampiran 6



**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MANAJEMEN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN**



**DIAJUKAN OLEH
CB HAGANA RESMIPUTRA
NIM: 041411233068**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2018

SKRIPSI

**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

DIAJUKAN OLEH

CB HAGANA RESMIPUTRA

NIM: 041411233068

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



CHORRY SULIATYOWATI SE., M.Sc.
NIP: 198504102008122001

TANGGAL ²⁶⁻⁷⁻²⁰¹⁸

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. MASMIRA KURNIAWATI, SE., M.Si.
NIP: 19750323.2006042001

TANGGAL ²⁷⁻⁷⁻²⁰¹⁸

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (CB Hagana Resmiputra, 041411233068), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Juni 2018

CB Hagana Resmiputra

NIM. 041411233068

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Allah Bapa segala puji dan rasa syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kami anugerah terindah dan kasihnya sehingga mampu menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang juga menjadi awal dalam perjalanan hidup untuk berjuang menggapai cita cita dan membahagiakan kedua orang tua. Tanpa kuasa dan kasih-Mu saya tidak akan bisa sampai pada titik ini , dan kiranya Engkau senantiasa membimbing , memberkati dan mengasihi hamba-Mu ini .

Tidaklah mudah menyelesaikan tugas akhir ini , oleh karena itu saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tulisan ini tidak akan terselesaikan, dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu perkenankan saya untuk mengucapkan beriburibu terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu saya selama proses penulisan ini dan semasa menjalankan studi sebagai mahasiswa.

Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada ibu Chorry Sulistyowat , M.sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada seluruh dosen program studi manajemen Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga telah banyak menginspirasi saya hingga saat ini dan terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Antonius Haribowo

Resmipoetro S.H dan Ibu Anastasia Evy Roosiany S.Ak yang telah mendukung dan mendoakan saya hingga sampai pada titik ini.

Ucapa terimakasih juga saya berikan kepada teman teman grup KAMPRET, teman teman seperjuangan di kontrakan Kertajaya, dan terutama sahabat sahabat saya Angga, yoga, eky, dito yang telah banyak membantu saya dalam berbagai macam hal, baik dukungan materiil maupun inmateriil yang sangat membantu saya dalam menjalankan studi dan proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saya memohon saran , kritik dan masukan yang membangun agar bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Saya sebagai penulis memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan , kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata , semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak pihak yhang membutuhkan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non Performing Loan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel makro (*Gross Domestic Product* dan Kurs), variabel rasio spesifik bank (Pertumbuhan kredit, Kualitas aktiva produktif, profitabilitas, efisiensi operasional bank) terhadap rasio *Non Performing Loan* pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan publikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resmi OJK dan situs resmi Badan Pusat Statistik. Periode penelitian dimulai dari bulan Desember 2006 sampai dengan Desember 2016. Hasil studi penelitian menunjukkan secara individual variabel *Gross Domestic Product*, Kurs dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya NPL, sedangkan variabel kualitas aktiva produktif, inefisiensi operasional, dan pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh yang signifikan pada level signifikansi 5%.

Kata kunci : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, Determinan NPL

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the factors that influence the occurrence of Non Performing Loan in the Group of Regional Development Banks in Indonesia. Hypothesis testing is done by multiple regression analysis technique to know the effect of macro variable (Gross Domestic Product and Kurs), Bank's Specific Loan to Deposit Ratio, Earning Asset Quality, Return on Asset, Operational Revenue Operating Expense) to Non Performing Loan ratio at Regional Development Banks in Indonesia The source of data used in this study comes from publication reports available in the Financial Services Authority through the official website of the Financial Services Authority and the official website of the Central Bureau of Statistics. The research period starts from December 2006 to December 2016 The result of research study showed individually variable of Gross Domestic Product, Kurs and profitability variable did not have significant effect to NPL, while credit quality, operation inefficiency, and credit growth variable have significant influence to non performing loan at 5% significant level

Key-words : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, NPL Determinant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank.....	10
2.1.2 Pengertian kredit	14
2.1.3 Determinan non-performing loan.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.3 Hipotesis dan Model Analisis	26
2.3.1 Hipotesis.....	26
2.3.2 Model analisis	26
2.4 Kerangka berpikir	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan penelitian	28

3.2	Identifikasi variabel	28
3.3	Definisi Operasional	28
3.4	Jenis dan sumber data	29
3.5	Prosedur penentuan sampel.....	30
3.6	Prosedur pengumpulan data.....	30
3.7	Teknik analisis	31
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
4.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	39
4.4	Analisis Model dan Pengujian Hipotesis	41
4.5	Pembahasan.....	42
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1	Simpulan	47
5.2	Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL		HAL
Tabel 1.1 :	Tabel Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016	3
Tabel 1.2 :	Tabel Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD tahun 2012 s/d 2016.....	6
Tabel 4.1 :	Deskripsi Statistik Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.2 :	Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).....	41

DAFTAR GAMBAR	HAL
Gambar 1.1: Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial tahun 2012 s/d 2016.....	2
Gambar 1.2 : Grafik NPL Bank Umum dan BPD Tahun 2012 s/d 2016.....	5
Gambar 1.3 : Grafik Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis dan Orientasi Penggunaan tahun 2012 s/d 2016.....	6
Gambar 1.4 : Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016.....	7
Gambar 2.1 : Kerangka berpikir penelitian.....	7

BAB 1

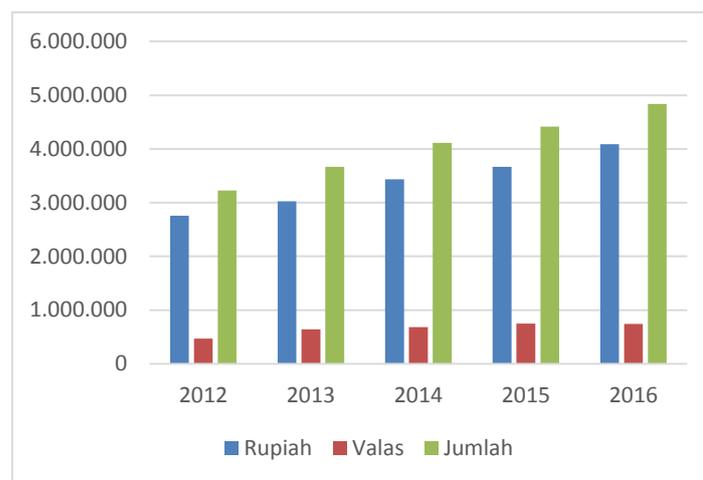
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia berjalan sangat cepat, hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah bank, jumlah transaksi, jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat, ragam layanan dan beragam aspek yang terdapat pada bisnis perbankan dimasa sekarang ini. Pada tahun 2012 jumlah dana yang telah disalurkan oleh perbankan di Indonesia mencapai 3.225.198 miliar rupiah. Terus mengalami peningkatan tiap tahun-nya hingga pada awal tahun 2016 dana yang telah disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat mencapai 4.836.758 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh perbankan untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan sektor pembangunan dan pergerakan perkonomian di Indonesia. Disamping itu harapan masyarakat akan ketersediaan dana dan kualitas pelayan perbankan menjadi prioritas sehingga diperlukannya lingkungan bisnis sektor perbankan yang sehat, kuat dan tangguh sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (*Commercial Bank*), Bank Syariah (*Sharia Bank*), dan Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia, 2016). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Dana pihak ketiga yang dihimpun bank mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh sektor perbankan membuat bank harus menanggung biaya penyimpanan dana yang cukup besar pula jika dana tersebut tidak dimanfaatkan dan disalurkan ke pihak ketiga yang membutuhkan. Oleh karena itu bank menyalurkan kembali dana simpanan tersebut dalam bentuk kredit untuk memperoleh *spread* (selisih bunga) sehingga beban biaya penyimpanan dana dapat tergantikan. Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun sektor perbankan Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan Desember 2016.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Milliar)

Gambar 1.1

Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial dari tahun 2012 s/d 2016

Tuntutan yang sedemikian besar membuat bank sering terlalu fokus untuk melakukan kegiatan ekspansi kredit namun mengabaikan prinsip pemberian kredit yang sehat dan baik. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka

tingkat kesehatan bank akan menurun dan menuntun-nya pada likuidasi. Kredit yang disalurkan perbankan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016
(Miliar)

Tahun	Kepada pihak ketiga	Kepada bank lain	Jumlah
2012	2.707.862	17.812	2.725.674
2013	3.292.874	26.968	3.319.842
2014	3.674.308	32.192	3.706.501
2015	4.057.904	34.200	4.092.104
2016	4.377.195	36.220	4.413.414

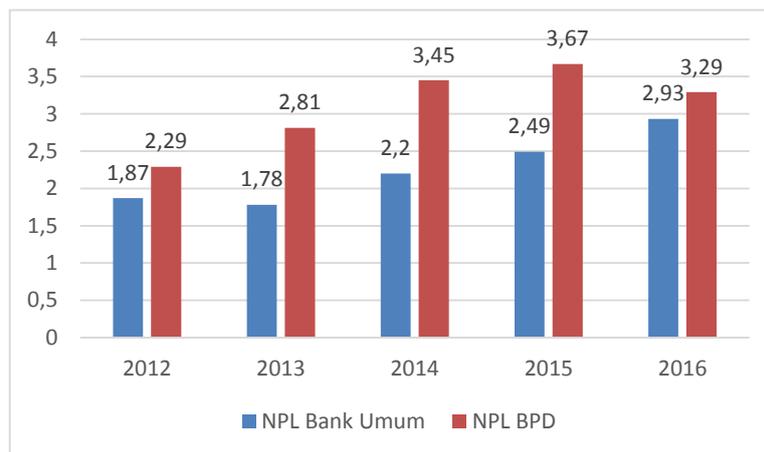
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2017

Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari tahun 2012 sebesar Rp. 2.725.674 miliar menjadi Rp 4.377.195 pada Januari 2016, jika dihubungkan dengan tabel sebelumnya tentu kenaikan jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di bank akan mengakibatkan kenaikan jumlah penyaluran dana oleh bank . Jika melihat komposisi penyaluran dana oleh bank dari tahun 2012 s/d Desember 2016 komposisi terbesar dari kegiatan penyaluran dana sektor perbankan di Indonesia adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank. Dari jumlah kredit tersebut merupakan kredit yang sehat namun sebagian diantaranya tentu terdapat kredit yang buruk. Kredit bermasalah atau macet dalam dunia perbankan sering disebut sebagai *Non Performing Loan (NPL)*, sebenarnya

merupakan hal yang biasa dalam bisnis perbankan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan lepas dari fungsi penyaluran dana melalui kredit, namun jika jumlah *NPL* mencapai angka yang melebihi tingkat kemampuan bank tentu akan mengakibatkan bencana bagi bank tersebut, hal itu dikarenakan terlalu besarnya tingkat *NPL* suatu bank akan menurunkan tingkat profitabilitas bank, selain itu tingkat likuiditas juga akan menurun dan dapat menyebabkan kondisi bank tidak sehat yang berujung pada kebangkrutan (likuidasi).

Dalam Surat Keputusan Direksi No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menilai kredit bermasalah atas dasar kualitasnya, dibagi menjadi lima golongan yaitu kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Masing masing kelompok diukur dengan kriteria utama yaitu prospek usaha, kemampuan membayar dan kondisi keuangan debitur. Beberapa tahun terakhir rata-rata tingkat *NPL* bank umum di Indonesia mengalami kenaikan. Dikutip dari media pemberitaan dalam bidang perbankan Infobank, tingkat *NPL* perbankan sendiri berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat *NPL* sebesar 2,49%, mengalami peningkatan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan Maret 2017 *NPL* kembali mengalami peningkatan menjadi 3,04% (Statistik Perbankan Indonesia). Namun diantara beberapa kelompok bank umum komersial di Indonesia, kelompok Bank Pembangunan Daerah atau BPD merupakan kelompok bank yang mempunyai rata-rata rasio *NPL* yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok bank secara umum yang mencakup semua jenis bank.

Pada akhir tahun 2016 rasio NPL Bank Pembangunan Daerah (BPD) berada di posisi 3,29% sedangkan rasio NPL pada bank secara umum berada di posisi 2,93% selain itu rasio NPL perbankan tertinggi di Indonesia pada saat ini dimiliki oleh salah satu BPD yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua yang mencapai 15,3%. Menurut Sukanto kepala Otoritas Jasa Keuangan regional 4 dalam paparannya di indonesia banking expo di Jakarta, hal ini merupakan efek dari keinginan dari kelompok Bank Pembangunan Daerah untuk mulai mengembangkan penyaluran kredit produktif ke masyarakat.(kontan.co.id – 24/9/17).

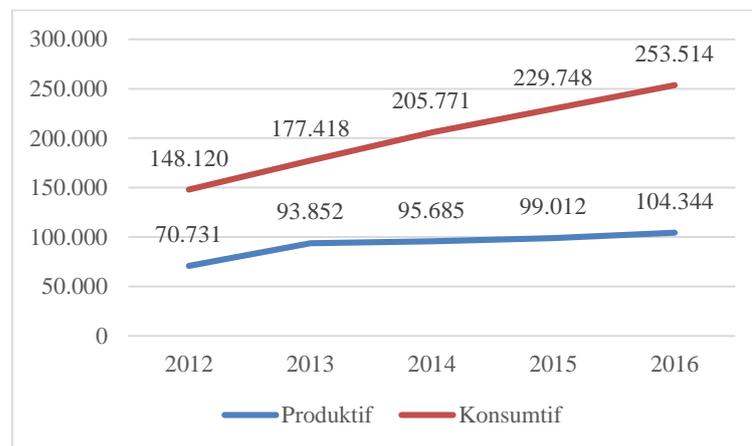


Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Persen)

Gambar 1.2
Grafik NPL Bank Umum dan BPD

Sejauh ini BPD masih menggantungkan penyaluran kredit ke sektor konsumsi sebesar 60-90% dari total penyaluran kredit. Keputusan untuk mengembangkan penyaluran kredit ke bidang produktif oleh BPD bukan malah memperbaiki kinerja namun malah memperburuk kinerja BPD sendiri. Hal tersebut

dipercaya disebabkan oleh ketidaksiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh BPD dalam mengelola atau mengidentifikasi risiko kredit sektor produktif .



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Miliar)

Gambar 1.3
Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Orientasi Penggunaan

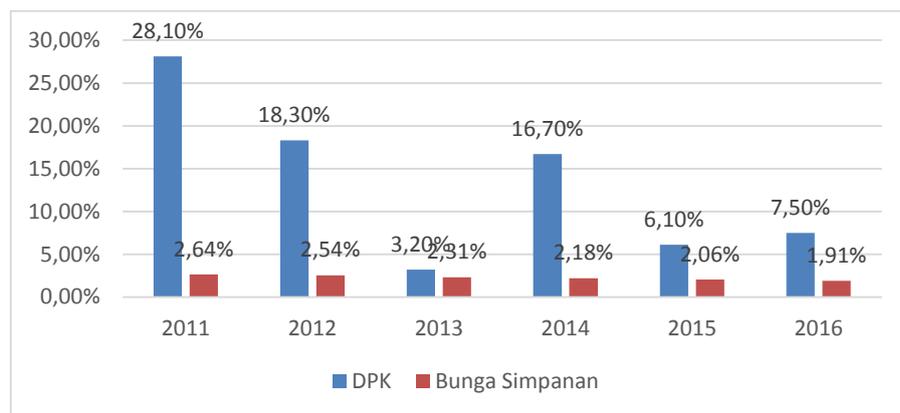
Tabel : 1.2
Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD dari tahun 2012 s/d 2016
(Miliar)

	2012	2013	2014	2015	2016
Total Kredit	218.851	264.541	301.456	328.759	357.859
NPL	5.025	7.444	10.406	12.070	11.801
Rasio NPL	2.2%	2,4%	3.4%	3.67%	3.29%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Perkembangan penyaluran kredit BPD terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun . Dapat dilihat dari Tabel 1.2 jumlah penyaluran kredit oleh BPD kepada pihak ketiga bukan bank dari tahun ketahun mengalami peningkatan ,

namun sejalan dengan itu jumlah NPL pun juga semakin meningkat, hanya pada tahun 2016 yang berlaku sebaliknya. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPD tidak lepas dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok bank BPD yang juga mengalami peningkatan meskipun prosentase pertumbuhannya mengalami tren negatif dari tahun ke tahun akibat dari penurunan rata rata suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD. Dari gambar 1.4 dapat dilihat tren negatif dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok BPD pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dimana hal tersebut disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 1.4

Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016

Kredit bermasalah yang besar dalam industri perbankan membawa dampak yang luas. Besarnya tingkat NPL dari sisi mikro dapat merugikan dan menghambat perkembangan usaha selain itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dilihat dari sudut pandang makro, mengingat dana yang dihimpun oleh bank digunakan

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk membuka kredit baru dan menutup kemungkinan bagi debitur lain untuk mendapatkan kredit. Peningkatan NPL dapat dipengaruhi oleh factor makro ekonomi, faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor eksternal baik bank maupun debitur. Jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, kondisi ekonomi nasional memiliki peran yang cukup besar terhadap tingkat risiko gagal bayar. Kondisi ekonomi yang lesu karena penurunan kemampuan sektor usaha untuk menghasilkan barang dan jasa akibat dari menurunnya konsumsi masyarakat tentu akan mempengaruhi pendapatan sektor usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kemampuan sektor usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari sisi intern bank tentunya faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya NPL adalah kelemahan pengelolaan kredit, agresifitas bank dalam menyalurkan kredit, jaminan yang tidak memadai atau tidak mencover kredit dan lain lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan guna memperoleh jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah faktor makro ekonomi (*Gross Domestic Product (GDP)* dan tingkat kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi operasional bank) berpengaruh terhadap NPL pada bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian - penelitian sebelumnya berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia adalah untuk mengetahui pengaruh factor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product (GDP)*, tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (tingkat pertumbuhan kredit, kualitas kredit , profitabilitas , dan efisiensi operasional bank) terhadap NPL

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan temuan dan bukti empiris yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai faktor internal bank yang secara signifikan dapat mempengaruhi arah hubungan terjadinya NPL pada bank perusahaan daerah di Indonesia
2. Memberikan penjelasan yang relevan kepada setiap pengambil kebijakan yang dalam hal ini para manajer keuangan bank dalam melakukan tugasnya dan menjaga nilai NPL dari bank tertentu untuk menjaga tingkat kesehatan bank
3. Menjadi acuan analisis bagi para akademisi untuk mendorong penelitian penelitian berikutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank

Menurut Grosse dan Hemple (2013:1) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber - sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu menurut F.E. Perry (2013:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Menurut Stuart (2013:1) , bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit , baik dengan alat - alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi memperlancar lalu lintas giral.
2. *Agent of Trust* , bank merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya dengan cara memelihara kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang cukup
3. *Agent of Development* , yaitu berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi
4. *Agent of Service* , bank turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*) ,jasa penagihan atau inkaso (*collection*) dan jasa kotak pengamanan (*safe deposit box*).

Menurut Rivai,dkk (2013:2), dalam bukunya *Bank and financial institution management*, Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua berikut ini :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan “menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk membangun koperasi,

pengembangan pengusaha golongan kecil, pengembangan ekspor non-migas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. (Rivai, 2007:322)

Menurut Hendro dan Rahardja (2014:123) berdasarkan kepemilikannya bank dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Bank Pemerintah

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat baik sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Bank swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya adalah milik swasta nasional dan swasta asing.

3. Bank Koperasi

Bank yang sebagian besarnya atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi

4. Bank asing

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing.

5. Bank campuran

Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Klasifikasi bank menurut kepemilikan di Indonesia berbeda dengan negara negara lain pada umumnya .Bank milik negara dibagi menjadi 2 jenis yaitu BUMN dan BPD. BPD adalah salah satu bank bentukan pemerintah yang pada awalnya di fokuskan dalam bidang pembangunan daerah. Pada 25 Mei 1960 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah (BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959

menjadi 22 bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang (1959) menjadi 17 cabang (1965).

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas ketentuan Bank Pembangunan Daerah menyatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan . Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. Sampai saat ini ada 26 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi.

2.1.2 Pengertian kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:1) perkataan kredit sesungguhnya berasal dari kata *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya jika seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Kredit diberikan

atas dasar kepercayaan , artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Pada dasarnya tujuan kredit adalah *profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur dan tujuan *safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU Perbankan No.10 th 1998)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dan mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan pemberian tingkat bunga yang berbeda beda sesuai risiko yang terkandung.

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. (Rivai, 2013:198)

Menurut Rivai (2013:211) kriteria kualitas kredit perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Pembayaran angsuran pokok dana atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutase rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

Kredit digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum lebih 90 hari
- b. Kadang kadang terjadi cerukan
- c. Mutase rekening relative aktif
- d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. didukung oleh pinjaman baru

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana tau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- d. Terjadi pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria berikut

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan tau bunga yang telah melampaui 270hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam Menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai risiko minimal dengan kata lain kredit dapat dikembalikan sepenuhnya, tepat waktu dan tidak menjadi kredit bermasalah. Namun dalam praktek bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan tidak semuanya lancar dan sehat, dan ketika bank gagal dalam mengelola risiko tersebut maka akan timbul

kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. *Non-performing loan (NPL)* adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi (latumaerissa,1996)

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004). *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004). Agar kinerja berapor biru maka setiap bank harus menjaga *NPL*-nya dibawah 5% (Infobank, 2017), hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. *NPL* dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Akibat tingginya *NPL* perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian kredit dengan membentuk cadangan kerugian kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis, sedangkan modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit dan dapat mempengaruhi kemampuan bank memperoleh

keuntungan dari pendapatan bunga. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Kredit macet dalam jumlah besar dalam industri perbankan membawa dampak yang cukup luas. Secara makro dampak dari besarnya tingkat NPL dapat memperlambat perekonomian negara mengingat peran bank sebagai salah satu penyalur sumber dana kepada masyarakat, jika kredit macet jumlahnya besar membuat bank akan lebih berhati-hati dan selektif untuk memberikan pinjaman sehingga standarisasi pinjaman meningkat, disisi lain jika kredit macet membuat likuiditas bank berkurang maka menghambat bank untuk membuka penyaluran kredit baru kepada masyarakat sehingga perekonomian menjadi lambat. Secara mikro besarnya kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena jumlah kredit macet yang terlalu besar akan menurunkan likuiditas bank yang kemudian mengurangi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.3 Determinan *non-performing loan*

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya non performing loan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor makroekonomi dan factor spesifik bank (Ghost, 2015) (Dimitros *et. al.*, 2016). Faktor makro ekonomi mempunyai dampak cukup signifikan terhadap NPL. Berikut adalah beberapa yang dapat mempengaruhi NPL.

Faktor makroekonomi

1. Tingkat *Gross Domestic Product*

Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara adalah *Gross Domestic Product* (GDP). Menurut (Sudremi 2007:103) “*Gross Domestic Product* merupakan nilai seluruh barang dan jasa akhir yang

diproduksi oleh seluruh input, baik faktor produksi milik warga negara Indonesia maupun milik warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia dalam periode tertentu”. Penurunan konsumsi masyarakat yang diikuti dengan penurunan tingkat investasi sektor usaha dan penurunan *GDP* riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara sehingga kegiatan perekonomian menjadi melambat . Hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya dari industri perbankan dengan kata lain menurunnya *GDP* dapat meningkatkan *NPL* .

2. Kurs

Kurs dalam hubungannya dengan *non-performing loan* digunakan sebagai proxy dari kebijakan moneter, kurs yang terdepresiasi mengakibatkan memburuknya kemampuan sektor usaha yang kemudian pada gilirannya akan meningkatkan kredit bermasalah bagi sistem perbankan . Nilai tukar yang terdepresiasi mengakibatkan penurunan neraca perusahaan sehingga melemahkan kemampuan investasi perusahaan di masa depan terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Fluktuasi nilai tukar mengakibatkan bank devisa mengalami kesulitan. Kewajiban dalam bentuk valas sering tidak dilindungnilaikan. Bank juga sering memberikan kredit dalam bentuk valas kepada perusahaan perusahaan yang tidak mendapatkan devisa. Akibatnya depresiasi nilai tukar rupiah akan menggelembungkan *non-performing loan* perbankan (Sugema, 2013) . Faktor kurs nilai tukar semakin besar dampaknya

kepada debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dan memasarkan produknya di dalam negeri dengan menggunakan mata uang nasional. Hal ini menyebabkan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk menanggungnya (Sutojo, 2000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin menurunnya nilai tukar mata uang, maka membuat kemampuan untuk membayar kewajiban dalam bentuk kredit beserta bunganya juga lemah, sehingga pada akhirnya meningkatkan NPL.

KURS = LN (Rata-rata kurs tengah tahunan terhadap US dollar).....(2.2)

Faktor spesifik bank

1. Pertumbuhan kredit

Ketika bank memutuskan untuk menaikkan jumlah penyaluran kredit maka bank akan menurunkan suku bunga pinjaman dan menurunkan standard pemberian kredit sehingga hal itu dapat menyebabkan penyaluran kredit kepada pihak yang berisiko tinggi untuk terjadinya gagal bayar atau *default* (Keeton,1999). Faktor ini diukur dengan menggunakan *loan to Deposit Ratio* sesuai dengan penelitian Dimitros (2016). Dengan nilai LDR yang tinggi tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 110% maka bank dianggap sehat, hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk kredit secara maksimal yang dinilai sebagai aset paling produktif. LDR yang tinggi berarti adanya penyaluran kredit yang tinggi pula. Dengan demikian risiko terjadinya NPL tinggi pula. Perhitungan LDR juga

menggambarkan risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank itu sendiri, semakin tinggi LDR maka semakin tinggi risiko likuiditas bank karena hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Variabel ini dihitung dengan rumus Total kredit dibandingkan dengan Total dana Pihak Seimanan Pihak III :

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.3)$$

Dengan meningkatnya rasio ini diharapkan akan meningkatkan NPL bank

2. Kualitas Aktiva Produktif

Besarnya rasio kualitas aktiva produktif menggambarkan kualitas kredit bank dan perilaku bank dalam mengatasi risiko kredit. Teori yang mendasari variabel ini adalah teori '*moral hazard*' oleh Keeton dan Morris (1987). Dalam penelitiannya mereka berpendapat bahwa bank dengan kualitas kredit yang lemah memiliki anggota yang cenderung melakukan tindakan bersifat *moral hazard* dengan meningkatkan risiko dari portofolio kredit mereka dan tentu akan meningkatkan risiko terjadinya *NPL*, kualitas kredit diukur menggunakan rasio KAP, semakin buruk kualitas kredit bank maka semakin tinggi rasio KAP yang pada akhirnya meningkatkan *NPL*. Pengukuran dari variabel ini dihitung dengan rumus :

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif diklasifikasikan}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

3. Profitabilitas bank

Tingkat profitabilitas bank adalah tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari berbagai jenis kegiatan bisnisnya. Bank yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tentu saja cenderung tidak

melakukan berbagai aktivitas yang memiliki resiko tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas bank akan menurunkan kecenderungan bank dalam mengambil tindakan tindakan berisiko dalam kebijakan kredit dan tentu menurunnya NPL . Hal ini sesuai dengan teori *bad management* oleh (Berger dan DeYoung, 1997). Dilain pihak meningkatnya profitabilitas juga dapat meningkatkan NPL hal tersebut dikemukakan oleh (Rajan, 1994) ketika kebijakan kredit bank tidak semata mata difokuskan untuk memaksimalkan laba, namun kebijakan kredit juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen bank untuk memperbaiki reputasi dan kinerja mereka dengan menerapkan kebijakan kredit liberal. Manajemen berusaha untuk meyakinkan pasar atau pemangku kepentingan mengenai kinerja kredit yang dilakukan oleh bank dengan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas saat ini namun hal tersebut akan berdampak pada peningkatan *NPL* di masa depan. Profitabilitas bank dapat dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.5)$$

4. Inefisiensi kegiatan operasional bank

Dampak dari efisiensi biaya operasional masih belum terlalu jelas, jika mengacu dari penelitian Berger dan DeYoung (1987), bank yang menggunakan sumber dana seminimal mungkin dalam melakukan pengawasan risiko pinjaman akan meningkatkan efisiensi biaya. Tingkat inefisiensi biaya operasional bank diukur menggunakan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini mengukur kualitas

manajemen bank dalam melakukan kegiatan operasional. Kualitas manajemen bank yang baik terlihat pada kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko yang muncul melalui kebijakan yang diterapkan. Semakin kecil rasio BOPO, menunjukkan bank mengalami peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan efisiensi kegiatan operasional bank karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya operasional dengan pendapatan operasional (Rivai,2013). BOPO dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.6)$$

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *NPL* sebagai berikut:

1. Ghosh (2015) meneliti mengenai faktor bank specific dan faktor ekonomi tingkat negara bagian yang mempengaruhi *NPL* di 50 negara bagian di Amerika. Sampel yang digunakan adalah seluruh bank yang terdaftar di setiap negara bagian yang tersedia di FDIC. Model analisis yang digunakan adalah *Fixed effect* dan *system-GMM estimation*. Hasil dari penelitian menunjukkan makin tingginya tingkat kapitalisasi bank, risiko likuiditas, lemahnya kualitas kredit, ketidakefisienan biaya dan ukuran industri perbankan secara signifikan meningkatkan *NPL* namun meningkatnya tingkat profitabilitas bank menurunkan tingkat *NPL* . Meningkatnya nilai *GDP* riil , pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara bagian

menurunkan *NPL*. sedangkan tingkat inflasi, tingkat pengangguran negara bagian dan tingkat hutang nasional secara signifikan meningkatkan *NPL*.

2. Dimitros *et. al.* (2016) meneliti mengenai determinan makroekonomi dan kinerja spesifik bank ,di negara negara Eropa periode 1990- 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan dan makroekonomi 15 negara eropa . Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *GMM estimation*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel makroekonomi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan *GDP* riil menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap *NPL*. Faktor spesifik bank terkait dengan kemampuan manajemen dan manajemen risiko menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan *NPL* dimasa depan, dan variabel pengaruh pajak pada pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*
3. Soebagio 2004 meneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya *non-performing loan* pada bank umum komersial di Indonesia periode 2000 – 2004. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan faktor makro ekonomi yang terdiri dari kurs, inflasi, dan GDP dimana kurs dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap *NPL* sedangkan GDP tidak berpengaruh signifikan. Faktor mikro yang terdiri dari CAR,KAP,tingkat bunga pinjaman, LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Tingkat pertumbuhan *GDP* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 2 : Tingkat Kurs berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 3 : Pertumbuhan kredit berpegaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 4 : Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 5 : Profitabilitas bank berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 6 : Inefisiensi operasional bank berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

2.3.2 Model analisis

Untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi (tingkat *GDP* dan tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (Pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank) terhadap *NPL*, maka akan digunakan model analisis regresi berganda sebagai metode estimasi dengan persamaan berikut:

$$(NPL_s)_{it} = \beta_1(RGDP)_t + \beta_2(KURS)_t + \beta_3(LDR)_{i,t} + \beta_4(KAP)_{i,t} + \beta_5(PROFIT)_{i,t} + \beta_6(BOPO)_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan :

$(NPL_s)_{it}$ = Prosentase dari *NPL* pada bank *i* periode *t*

$\beta_1(RGDP)_t$ = Pertumbuhan *GDP* riil pada periode *t*

$\beta_2(\text{KURS})_t =$ Tingkat kurs tengah pada periode t

$\beta_3(\text{LDR})_{i,t} =$ Tingkat loan to deposit ratio pada bank i periode t

$\beta_4(\text{KAP})_{i,t} =$ Tingkat kualitas aktiva produktif pada bank i periode t

$\beta_5(\text{PROFIT})_{i,t} =$ Tingkat return on asset ratio pada bank i periode t

$\beta_6(\text{BOPO})_{i,t} =$ Tingkat rasio beban operasional pada pendapatan operasional pada bank i periode t

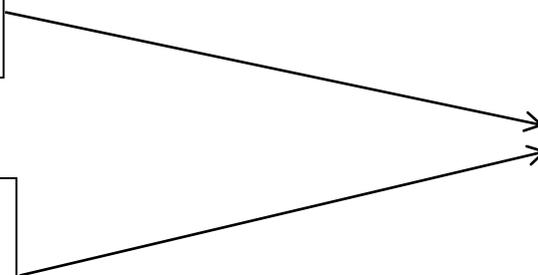
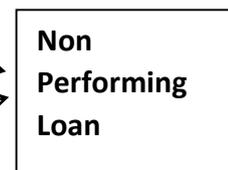
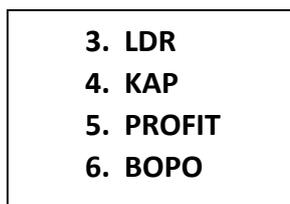
2.4 Kerangka berpikir

Sesuai dengan teori dan penelitian penelitian terdahulu dengan disesuaikan oleh kondisi yang ada di Indonesia maka variable-variabel yang mempengaruhi terjadinya NPL dapat digambarkan dengan pengembangan model sebagai berikut:

Faktor makroekonomi



Faktor spesifik bank



Gambar 2.1

Kerangka berpikir penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data-data yang terukur. Dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi variabel, definisi operasional dan teknik analisis.

3.2 Identifikasi variabel

Berdasarkan metode analisis penelitian dan hipotesis penelitian maka dapat diketahui variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen : faktor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product* dan Kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank)
2. Variabel dependen : *non-performing loan*

3.3 Definisi Operasional

Untuk memberi penjelasan mengenai gambaran variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi negara adalah mengukur *Gross domestic product* (GDP). Data *GDP* menggunakan data

laju pertumbuhan GDP menurut harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan merupakan data yang bersifat tahunan.

2. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Data kurs menggunakan rata rata kurs tengah terhadap US dollar tiap tahun. Tingkat kurs diperoleh menggunakan persamaan (2.2)
3. Pertumbuhan kredit dinilai dari total pinjaman dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh bank, rasio ini dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.3)
4. Kualitas aktiva produktif dinilai dari besarnya aktiva produktif yang diklasifikasikan atau dalam kategori (kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total aktiva produktif, rasio ini dapat diukur dengan rumus persamaan (2.4)
5. Profitabilitas bank dinilai menggunakan rasio profitabilitas *return on asset (ROA)* yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.5)
6. Inefisiensi operasional bank dinilai menggunakan rasio BOPO yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.6)
7. *Non-performing loan*, adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus persamaan (2.1)

3.4 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia berupa laporan keuangan perbankan yang terdapat dalam Laporan publikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan ojk.go.id dan data makroekonomi yang diperoleh melalui sumber website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia bps.go.id dan website resmi Bank Indonesia bi.go.id. Periode penelitian adalah tahun 2006 – 2016

3.5 Prosedur penentuan sampel

Sampel penelitian yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu, yang terdiri dari:

1. Bank yang diteliti adalah seluruh bank pembangunan daerah yang terdapat dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2006 – 2016.
2. Bank pembangunan daerah yang melaporkan laporannya pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2006-2016

3.6 Prosedur pengumpulan data

Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini serta penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik penelitian ini. Studi ini dilakukan

untuk memahami permasalahan dan mengetahui hasil penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebelumnya.

2. Survey lapangan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber dan diambil melalui berbagai webstie resmi yang menyangkut data yang diperlukan dalam penelitian.

3.7 Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Mengumpulkan variabel-variabel dalam penelitian untuk masing-masing bank pembangunan daerah selama periode tahun yang telah ditentukan yaitu tahun 2006-2016
2. Melakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah uji regresi berganda layak untuk dilakukan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain :

- a. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independennya.

Deteksi bebas adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan dua cara yaitu :

1. Besaran VIF (Variance Inflation Faktor) disekitar angka 1 dan angka Tolerance mendekati 1, dengan catatan bahwa angka Tolerance = $1 / \text{VIF}$ atau bisa juga $\text{VIF} = 1 / \text{Tolerance}$
2. Besaran koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas

b. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada prinsipnya menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Santoso, 2004). Selanjutnya dengan menggunakan Scatterplot Diagram, dapat dilakukan deteksi untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004). Untuk mendeteksi uji asumsi ini, dapat dilihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik Normal P-P Plof. Dasar pengambilan keputusannya adalah antara lain :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka bisa dikatakan terdapat problem autokorelasi. Deteksi untuk autokorelasi dengan cara :

1. Angka Durbin Watson dibawah -2 = tidak ada autokorelasi
 2. Angka Durbin Watson antara -2 sampai $+2$ = tidak ada autokorelasi
 3. Angka Durbin Watson diatas $+2$ = ada autokorelasi negatif
3. Melakukan analisis regresi kepada masing-masing variabel yang ditunjukkan pada persamaan (2.6) menggunakan aplikasi SPSS

4. Melakukan uji hipotesis menggunakan koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang dikehendaki adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_1 = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_1 : \beta_1 \neq 0$. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tahap pengujian uji t adalah sebagai berikut :

1. Menentukan formula *null hypothesis* statistik yang akan diuji dalam bentuk :

$H_{01} : \beta_1 \geq 0$; artinya tingkat GDP tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{11} : \beta_1 < 0$; artinya tingkat GDP berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{02} : \beta_1 \leq 0$; artinya kurs nilai tukar tidak berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{12} : \beta_1 > 0$; artinya kurs nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{03} : \beta_1 \leq 0$; artinya pertumbuhan kredit tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₃: $\beta_1 > 0$; artinya pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL

H0₄: $\beta_1 \leq 0$; artinya kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₄ : $\beta_1 > 0$; artinya kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap NPL

H0₅ : $\beta_1 \geq 0$; artinya profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

H1₅ : $\beta_1 < 0$; artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap NPL

H0₆ : $\beta_1 \leq 0$; artinya inefisiensi manajemen bank tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₆ : $\beta_1 > 0$; artinya inefisiensi manajemen bank berpengaruh positif terhadap NPL .

2. Merumuskan besar tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 5%, maka H₀ diterima. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 5% maka H₀ ditolak.
3. Menentukan koefisien determinan (R^2) yang menggambarkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin besar (mendekati 1) maka semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua bank pembangunan daerah (BPD) yang tercatat dalam Direktori Perbankan Indonesia tahun 2006-2016. Jumlah observasi dalam penelitian ini dalam jangka waktu 2006-2016 sebanyak 264. Data observasi lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian, akan dijabarkan hasil analisis data berdasarkan pengamatan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian dengan model analisis regresi linier berganda yang meliputi, jumlah observasi (N), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel *non-performing loan* dalam penelitian ini merupakan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas aktiva produktif (KAP), tingkat profitabilitas (PROFIT), tingkat efektifitas operasional (BOPO), tingkat pertumbuhan kredit (LDR), tingkat GDP (GDP), nilai tukar (KURS). Deskripsi statistik variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09 %	15,03 %	2,51 %	2,14470
GDP	264	4,63 %	6,49 %	5,64 %	,64307
KURS	264	9,08	9,51	9,25	,15150
LDR	264	36,50 %	241,54 %	95,84 %	28,62980
KAP	264	,06 %	10,99 %	1,76 %	1,54908
PROFIT	264	,01 %	13,86 %	4,15 %	2,02094
BOPO	264	54,45 %	180,09 %	91,05 %	33,14668

Sumber :Data Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai *NPL* terendah dalam sampel sebesar 0.09% hal ini mengindikasikan bahwa BPD telah mampu mengelola penyaluran dana dalam bentuk kredit secara baik dan selektif sehingga kredit bermasalah dapat diminimalisir. Nilai *NPL* tertinggi sebesar 15,03% mengindikasikan bahwa terdapat BPD yang dikategorikan tidak sehat dalam penyaluran kredit akibat dari tingginya nilai kredit macet yang dimiliki oleh BPD. Rata rata *NPL* BPD sebesar 2,51% yang berarti rata rata BPD telah mampu mengelola kredit secara baik karena rasio *NPL* berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Nilai GDP terendah sebesar 4,63% yang berarti menurunnya kinerja ekonomi Indonesia seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Nilai GDP tertinggi sebesar 6,49% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan didorong oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri. Rata-rata GDP

sebesar 5,64% yang mengindikasikan bahwa rata rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong rendah.

Nilai tukar mata uang terendah sebesar 9,08 tertinggi sebesar 9,51 dan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar 9,25. Semakin tinggi nilai tukar, maka rupiah sedang mengalami depresiasi nilai, hal itu dapat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengurangi kegiatan konsumsinya yang pada akhirnya ekonomi negara menjadi lesu. Kemampuan sektor usaha untuk mendapatkan hasil usaha menurun yang diikuti dengan menurunnya kemampuan sektor usaha untuk membayar hutang kembali .

Nilai LDR terendah sebesar 36,50% hal ini menunjukkan kemampuan BPD dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dalam kondisi baik. Nilai tertinggi LDR sebesar 241,54% , yang menunjukkan jumlah kredit yang diberikan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah deposito yang disimpan di BPD. Rata rata LDR BPD adalah 95,84 % yang mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola likuiditasnya dengan baik .

Nilai KAP terendah sebesar 0,06%, tertinggi adalah 10,99% . Tingginya rasio ini menggambarkan lemahnya kemampuan BPD dalam mengelola komposisi kreditnya sehingga tingkat kualitas kredit yang diklasifikasikan (kurang lancar, diragukan dan macet) tinggi. Rata rata komposisi kualitas kredit sebesar 1,76% hal ini mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola kualitas kredit mereka dengan baik.

Nilai profitabilitas terendah sebesar 0,01% dan tertinggi sebesar 13,86% semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besarnya tingkat profitabilitas bank, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk mendapat keuntungan. Rata-rata profitabilitas BPD sebesar 4,11% .

Nilai BOPO terendah sebesar 54,45% menunjukkan bahwa bank memiliki pendapatan melalui kegiatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban operasionalnya. Nilai BOPO tertinggi yaitu sebesar 180,09%, yang berarti bank menanggung beban operasional yang sangat tinggi. Rata-rata BOPO sebesar 91,05%.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Identifikasi statistik yang dapat dilakukan untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan menghitung *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*. Pada model regresi, apabila nilai *tolerance value* kurang dari 0,10 dan *VIF* lebih dari 10 dapat dikatakan bahwa telah terjadi multikolinieritas. Berdasarkan lampiran 4, menunjukkan bahwa nilai *tolerance value* lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti bergelombang atau meleber kemudian menyempit, maka terjadi Heterokedastisitas. Jika data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 6, titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil output statistik pada lampiran 5, diperoleh hasil perhitungan *Durbin-Watson (D-W)* sebesar 1,441. Nilai tersebut berada diantara nilai $-2 < dw < +2$. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal

atau mendekati normal ketika data menyebar disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dari grafik Normal P-P Plot. Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 3, model penelitian memenuhi uji normalitas.

4.4 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Analisa dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda yang dilakukan untuk melihat pengaruh faktor makroekonomi yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan GDP dan Kurs, serta faktor spesifik bank yang diukur dengan LDR, KAP, PROFIT, dan BOPO. Data diolah menggunakan program *IBM Statistic version 23*, dan hasil analisis regresi dijabarkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Variabel	Unstandardized Coeficient		Standardized Coeficient	Sig. t
	B	Std. Error	Beta	
Konstanta	3,871	3,183		0,225
GDP	-0,116	0,067	-0,035	0,086
KURS	-0,306	0,311	-0,022	0,326
LDR	-0,017	0,001	-0,227	0,000*
KAP	1,344	0,018	0,971	0,000*
PROFIT	0,020	0,018	0,018	0,273
BOPO	0,014	0,001	0,222	0,000*
R Square	0,960			

Keterangan : *Signifikan jika sig.t < 0,05

Sumber : Data hasil output spss

Berdasarkan penjabaran pada tabel 4.2, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel KAP, PROFIT, KURS dan BOPO memiliki pengaruh yang positif terhadap NPL, artinya semakin tinggi nilai KAP, PROFIT, KURS dan BOPO maka semakin meningkat pula NPL dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel KAP dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 ; sedangkan variabel PROFIT dan KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Variabel LDR dan GDP memiliki pengaruh negatif terhadap NPL artinya semakin tinggi nilai LDR, dan GDP maka akan menurunkan nilai NPL. Variabel GDP dan tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan sedangkan variabel LDR memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikan kurang dari 0,05.

Nilai R Square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R square pada hasil analisis ini adalah 0,961, artinya 96% variabel NPL dapat dijelaskan oleh variabel GDP , KURS, LDR, KAP, PROFIT, BOPO dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dijabarkan pada tabel 4.2 , variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional yang mengalami peningkatan akan berdampak menurunkan risiko kredit perbankan yang diukur menggunakan NPL. Pertumbuhan GDP akan meningkatkan aktivitas ekonomi , pendapatan masyarakat mengalami peningkatan , penjualan oleh perusahaan juga akan

mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kredit di bank sehingga menurunkan rasio NPL. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimitrios *et. al.* (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini disebabkan oleh data GDP yang sedikit dan tidak berfluktuasi menyebabkan GDP kurang berpengaruh signifikan.

Variabel KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan NPL pada Bank Pembangunan Daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Soebagio (2005) yang menyatakan perubahan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat NPL pada perbankan terutama bagi debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dikarenakan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk memikulnya. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur.

Variabel LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Rasio LDR menunjukkan preferensi risiko yang dimiliki bank dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rivai, 2013). LDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sesuai dengan hasil penelitian Soebagio (2005) mengutip analisis Kadarusman *et. al.* (2004), terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.

Variabel KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Sebagaimana dikutip oleh Ghosh (2015) penelitian Keeton & Morris (1987) Komposisi kualitas kredit memiliki peran penting sebagai indikator gambaran risiko bank. Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan NPL bank. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik komposisi atau kualitas dari portofolio kredit yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio KAP, maka semakin mengurangi terjadinya NPL.

Variabel PROFIT memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi NPL pada BPD. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian (Ghosh,2015) dan (Dimitrios; *et. al.* 2016) yang menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL bank, namun sesuai dengan model dari (Rajan, 1994) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap NPL ketika penentuan kebijakan kredit bank tidak

berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba. Manajemen bank dapat meningkatkan profitabilitas masa kini dengan mengorbankan kualitas kredit dimasa mendatang dengan cara memperpanjang waktu kredit sehingga debitur yang menunggak pada periode yang seharusnya memasuki kategori diklasifikasikan tidak masuk dalam perhitungan, memberi kredit baru pada debitur yang tidak mampu membayar sehingga mereka seakan akan mampu membayar kredit mereka secara lancar (Rajan, 1994).

Variabel BOPO memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. (Rivai, 2013). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya NPL dapat dihindarkan. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai BOPO, semakin rendah pula NPL yang dimiliki BPD.

BAB 5**SIMPULAN DAN SARAN****5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 264 observasi penelitian pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada tahun 2006 – 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Gros domestic product* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *NPL*, karena peningkatan sektor ekonomi pada suatu negara akan meningkatkan kemampuan debitur dalam melunasi pembayaran kredit pada bank sehingga dapat menurunkan *NPL*
2. Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *NPL*. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan terhadap hasil ini adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur..
3. Variabel kualitas aktiva produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPL* Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan *NPL* bank.
4. Variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi *NPL* pada BPD sehingga terdapat indikasi

pengambilan keputusan oleh manajemen dalam penentuan kebijakan kredit bank tidak berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba

5. Variabel pertumbuhan kredit yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.
6. Variabel inefisiensi operasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL karena semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya berdampak pada penurunan NPL.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pada bank khususnya BPD yang tentu memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai.
2. Manajemen BPD harus lebih baik dalam menentukan kebijakan kredit bank dan aspek ke hati-hatian dalam penyaluran kredit kepada calon debitur selalu dikedepankan sehingga kredit macet dapat dihindarkan.
3. Bagi BPD harus lebih meningkatkan kemampuan manajemen jika ingin merubah prioritas aktivitas kredit pada sektor produktif yang tentu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor konsumtif, sehingga risiko gagal bayar oleh debitur dapat dihindarkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto agar lebih spesifik dalam mengukur kondisi perekonomian daerah sebagai faktor *non-performing loan* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., T., 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, M., 2004. Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Gramedia
- Berg, T., Koziol, P., 2015. An analysis of the consistency of banks' internal ratings
- Darmawan., 2004. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan. Keputusan Jangka Panjang, Edisi III, Cetakan I. Yogyakarta :Liberty
- Dimitros. A.O., Helen. L., Mike. T., 2016. Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries
- Firdaus dan Ariyanti. 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Cetakan Kelima, Bandung : Alfabeta
- Ghosh, A., 2015. Banking-industry spesific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states
- Hendro, R., 2014. Bank dan Institusi keuangan non-bank di Indonesia, Jakarta : UPP STIM YKPN
- Keeton, W., 1999. Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses? Federal Reserve Bank of Kansas City Econ Rev., Second Quarter., pp. 57–75.
- Keeton, W., Morris, C., 1987. Why do banks' loan losses differ ? Federal Reserve Bank of Kansas City. Econ. Rev.,3-21
- Latumaerissa., 1996. Esensi-Esensi Perbankan Internasional Cetakan Pertama., Jakarta : Bumi Aksara
- Mohamad, K., 2017. “Omong Besar Pertumbuhan Kredit”, Majalah InfoBank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta
- Rajan, R., 1994. Why bank policies fluctuate: a theory and some evidence. Q. J. Econ. 109, 399-411
- Rivai., B., Sudarto., veithzal., 2013. Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Santoso, S., 2004. Buku Latihan : SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Siamat, D.,1995. Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta
- Soebagio, H., 2005. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank mum Komersial, Universitas Diponegoro , Semarang
- Sudremi, Y., 2007. Pengetahuan Sosial Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta
- Wirjosukarto, D., 2017. “Menilai Jeroan Bank Dengan Empat Pendekatan”, Majalah Infobank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Perhitungan Seluruh Variabel Penelitian Periode 2006-2016

No	Nama	Tahun	NPL	KAP	ROA	BOPO	LDR	GDP	KURS
1	BPD Jatim	2006	1,04	0,44	8,21	143,26	83,88	5,50	9,123
2	BPD Jatim	2007	1,12	0,47	7,62	137,63	80,86	6,35	9,120
3	BPD Jatim	2008	1,41	0,66	7,49	135,62	96,15	6,01	9,178
4	BPD Jatim	2009	1,05	0,76	3,75	66,04	69,67	4,63	9,249
5	BPD Jatim	2010	0,65	0,51	5,57	59,38	80,70	6,22	9,114
6	BPD Jatim	2011	0,97	0,77	4,97	60,02	80,11	6,49	9,080
7	BPD Jatim	2012	2,95	2,21	3,34	68,89	83,55	6,26	9,147
8	BPD Jatim	2013	3,44	2,95	3,82	70,28	84,98	5,73	9,255
9	BPD Jatim	2014	3,31	2,64	3,52	69,63	86,54	5,06	9,382
10	BPD Jatim	2015	4,29	3,59	2,67	76,11	82,92	4,88	9,507
11	BPD Jatim	2016	4,77	3,70	2,98	72,22	90,48	5,03	9,508
12	BPD Jabar	2006	0,86	0,61	6,48	152,58	163,00	5,50	9,123
13	BPD Jabar	2007	1,11	0,73	7,52	159,58	154,69	6,35	9,120
14	BPD Jabar	2008	1,48	0,99	5,80	154,15	168,46	6,01	9,178
15	BPD Jabar	2009	1,97	1,25	3,24	77,30	82,47	4,63	9,249
16	BPD Jabar	2010	1,86	1,11	3,15	76,60	71,14	6,22	9,114
17	BPD Jabar	2011	1,21	0,73	2,65	80,02	72,95	6,49	9,080
18	BPD Jabar	2012	2,07	1,27	2,46	80,02	74,09	6,26	9,147
19	BPD Jabar	2013	2,83	2,21	2,61	79,41	96,47	5,73	9,255
20	BPD Jabar	2014	4,15	3,35	1,94	85,94	93,18	5,06	9,382
21	BPD Jabar	2015	2,91	2,22	2,04	83,31	88,13	4,88	9,507
22	BPD Jabar	2016	1,69	1,26	2,22	82,70	86,70	5,03	9,508
23	BPD Jateng	2006	1,13	0,72	8,43	142,14	127,54	5,50	9,123
24	BPD Jateng	2007	1,00	0,66	3,04	145,71	136,07	6,35	9,120
25	BPD Jateng	2008	0,65	0,56	8,35	148,18	178,21	6,01	9,178
26	BPD Jateng	2009	0,26	0,27	4,04	71,33	89,18	4,63	9,249
27	BPD Jateng	2010	0,53	0,41	2,83	79,61	74,13	6,22	9,114
28	BPD Jateng	2011	1,04	0,72	2,67	79,11	70,17	6,49	9,080
29	BPD Jateng	2012	0,80	0,67	2,73	76,35	82,26	6,26	9,147
30	BPD Jateng	2013	0,72	0,59	3,01	72,88	86,96	5,73	9,255
31	BPD Jateng	2014	0,93	0,79	2,84	75,67	88,57	5,06	9,382
32	BPD Jateng	2015	1,26	1,09	2,60	76,05	90,54	4,88	9,507

33	BPD Jateng	2016	1,45	1,26	2,60	76,18	95,05	5,03	9,508
34	BPD DKI	2009	5,76	2,76	1,41	88,46	57,25	4,63	9,249
35	BPD DKI	2010	3,73	1,89	2,24	83,02	70,48	6,22	9,114
36	BPD DKI	2011	3,12	2,22	2,32	79,74	73,03	6,49	9,080
37	BPD DKI	2012	3,20	2,19	1,87	81,43	73,50	6,26	9,147
38	BPD DKI	2013	2,38	1,77	3,15	74,99	92,50	5,73	9,255
39	BPD DKI	2014	4,38	3,08	2,10	80,26	92,57	5,06	9,382
40	BPD DKI	2015	7,96	5,23	0,89	90,99	91,14	4,88	9,507
41	BPD DKI	2016	5,35	4,14	2,29	77,82	87,41	5,03	9,508
42	BPD DIY	2006	2,50	1,46	6,99	148,68	121,10	5,50	9,123
43	BPD DIY	2007	2,65	1,47	5,85	154,96	104,12	6,35	9,120
44	BPD DIY	2008	2,50	1,58	5,78	154,78	129,06	6,01	9,178
45	BPD DIY	2009	1,36	0,82	3,23	75,15	79,33	4,63	9,249
46	BPD DIY	2010	1,39	0,97	2,79	73,53	70,24	6,22	9,114
47	BPD DIY	2011	1,19	0,91	2,69	74,96	78,71	6,49	9,080
48	BPD DIY	2012	0,84	0,69	2,56	74,85	71,89	6,26	9,147
49	BPD DIY	2013	0,90	0,67	2,71	72,75	73,67	5,73	9,255
50	BPD DIY	2014	1,23	0,94	2,88	72,64	80,34	5,06	9,382
51	BPD DIY	2015	1,05	0,78	2,94	71,89	80,99	4,88	9,507
52	BPD DIY	2016	3,40	2,33	3,05	70,15	80,84	5,03	9,508
53	BPD Aceh	2006	2,30	0,55	5,12	147,52	44,10	5,50	9,123
54	BPD Aceh	2007	1,63	0,43	6,13	138,74	50,42	6,35	9,120
55	BPD Aceh	2008	1,98	0,67	6,16	139,25	69,59	6,01	9,178
56	BPD Aceh	2009	1,69	0,83	3,06	71,39	61,79	4,63	9,249
57	BPD Aceh	2010	7,02	5,17	1,80	92,98	81,74	6,22	9,114
58	BPD Aceh	2011	3,69	2,90	2,91	77,36	91,42	6,49	9,080
59	BPD Aceh	2012	3,30	2,64	3,66	71,51	89,89	6,26	9,147
60	BPD Aceh	2013	2,78	2,15	3,44	70,72	86,80	5,73	9,255
61	BPD Aceh	2014	2,58	1,98	3,13	74,11	92,38	5,06	9,382
62	BPD Aceh	2015	2,30	1,64	2,48	76,07	84,05	4,88	9,507
63	BPD Aceh	2016	1,39	0,93	2,83	83,05	84,59	5,03	9,508
64	BPD Sumut	2006	6,94	3,79	6,98	158,21	100,47	5,50	9,123
65	BPD Sumut	2007	4,63	2,58	6,82	154,92	99,94	6,35	9,120
66	BPD Sumut	2009	2,47	2,19	4,42	69,86	97,87	4,63	9,249
67	BPD Sumut	2010	3,02	2,72	4,55	68,65	91,04	6,22	9,114
68	BPD Sumut	2011	2,56	1,93	3,26	75,99	78,56	6,49	9,080
69	BPD Sumut	2012	2,81	2,47	2,99	77,76	101,90	6,26	9,147
70	BPD Sumut	2013	3,83	3,47	3,37	74,22	107,31	5,73	9,255
71	BPD Sumut	2014	5,47	4,73	2,60	80,30	95,89	5,06	9,382

72	BPD Sumut	2015	5,00	4,28	2,31	82,16	94,08	4,88	9,507
73	BPD Sumut	2016	4,70	4,03	2,74	79,54	93,89	5,03	9,508
74	BPD Sumsel	2006	5,80	2,86	2,85	175,75	79,96	5,50	9,123
75	BPD Sumsel	2007	4,75	1,68	2,86	171,44	79,21	6,35	9,120
76	BPD Sumsel	2008	4,28	1,49	3,52	165,53	97,72	6,01	9,178
77	BPD Sumsel	2009	2,42	1,75	2,51	78,09	79,03	4,63	9,249
78	BPD Sumsel	2010	1,33	1,17	2,71	80,81	71,17	6,22	9,114
79	BPD Sumsel	2011	1,46	1,27	2,56	80,64	75,19	6,49	9,080
80	BPD Sumsel	2012	6,82	5,25	1,90	82,28	75,98	6,26	9,147
81	BPD Sumsel	2014	7,10	5,86	2,13	81,54	85,97	5,06	9,382
82	BPD Sumsel	2015	6,17	3,75	2,18	81,44	95,43	4,88	9,507
83	BPD Riau	2007	3,04	0,75	6,21	135,48	47,11	6,35	9,120
84	BPD Riau	2008	2,86	0,97	5,38	141,23	73,24	6,01	9,178
85	BPD Riau	2009	1,38	0,91	2,68	73,83	88,24	4,63	9,249
86	BPD Riau	2010	2,45	1,63	3,98	68,93	75,42	6,22	9,114
87	BPD Riau	2011	2,57	1,79	2,62	75,15	65,74	6,49	9,080
88	BPD Riau	2012	2,95	1,85	2,95	75,07	66,49	6,26	9,147
89	BPD Riau	2013	2,81	1,92	3,00	69,12	87,60	5,73	9,255
90	BPD Riau	2014	2,79	1,80	3,37	70,59	77,72	5,06	9,382
91	BPD Riau	2015	4,12	3,56	1,69	83,86	112,61	4,88	9,507
92	BPD Riau	2016	4,16	3,39	2,75	75,44	125,19	5,03	9,508
93	BPD Sumbar	2006	8,08	5,90	7,38	149,16	165,14	5,50	9,123
94	BPD Sumbar	2007	7,70	5,34	5,94	154,61	144,98	6,35	9,120
95	BPD Sumbar	2008	7,66	5,91	6,00	153,07	168,71	6,01	9,178
96	BPD Sumbar	2009	3,30	2,59	2,71	79,85	87,72	4,63	9,249
97	BPD Sumbar	2010	3,31	2,47	3,51	76,34	84,41	6,22	9,114
98	BPD Sumbar	2011	2,76	2,23	2,68	78,82	91,69	6,49	9,080
99	BPD Sumbar	2012	2,69	2,31	2,65	77,62	100,35	6,26	9,147
100	BPD Sumbar	2013	2,29	1,91	2,64	78,27	99,13	5,73	9,255
101	BPD Sumbar	2014	2,52	2,06	1,94	84,51	98,34	5,06	9,382
102	BPD Sumbar	2015	2,74	2,24	2,28	81,75	99,24	4,88	9,507
103	BPD Sumbar	2016	3,07	2,48	2,19	81,75	98,02	5,03	9,508
104	BPD Jambi	2006	2,01	1,01	8,13	133,08	91,03	5,50	9,123
105	BPD Jambi	2007	1,32	0,76	6,88	144,84	97,75	6,35	9,120
106	BPD Jambi	2008	0,89	0,68	8,31	133,71	149,49	6,01	9,178
107	BPD Jambi	2009	0,56	0,46	5,16	62,94	97,64	4,63	9,249
108	BPD Jambi	2010	0,40	0,33	5,21	57,55	84,09	6,22	9,114
109	BPD Jambi	2011	0,36	0,24	3,28	61,16	66,55	6,49	9,080
110	BPD Jambi	2012	0,33	0,24	3,58	63,32	82,29	6,26	9,147

111	BPD Jambi	2013	0,41	0,35	4,14	62,07	110,13	5,73	9,255
112	BPD Jambi	2014	0,48	0,35	3,14	71,45	100,83	5,06	9,382
113	BPD Jambi	2015	1,10	0,77	2,43	77,26	106,00	4,88	9,507
114	BPD Jambi	2016	0,40	0,26	2,92	71,89	103,09	5,03	9,508
115	BPD Bengkulu	2006	4,24	3,69	6,54	147,24	122,97	5,50	9,123
116	BPD Bengkulu	2007	3,57	3,00	5,32	151,21	122,31	6,35	9,120
117	BPD Bengkulu	2008	2,47	2,02	6,39	146,90	167,39	6,01	9,178
118	BPD Bengkulu	2009	1,52	1,13	3,14	75,16	129,59	4,63	9,249
119	BPD Bengkulu	2010	1,66	1,51	4,60	70,24	89,20	6,22	9,114
120	BPD Bengkulu	2011	0,67	0,64	3,17	78,12	75,14	6,49	9,080
121	BPD Bengkulu	2012	0,22	0,18	3,41	73,27	93,27	6,26	9,147
122	BPD Bengkulu	2013	0,38	0,32	4,01	68,99	105,04	5,73	9,255
123	BPD Bengkulu	2014	0,39	0,29	3,70	72,41	86,06	5,06	9,382
124	BPD Bengkulu	2015	0,39	0,31	2,88	77,06	91,38	4,88	9,507
125	BPD Bengkulu	2016	0,33	0,24	2,78	77,72	93,95	5,03	9,508
126	BPD Lampung	2006	2,36	1,71	5,83	159,10	129,93	5,50	9,123
127	BPD Lampung	2007	2,32	1,97	5,26	159,06	174,04	6,35	9,120
128	BPD Lampung	2009	1,47	1,18	3,26	76,32	99,36	4,63	9,249
129	BPD Lampung	2010	1,20	0,68	5,18	66,13	89,46	6,22	9,114
130	BPD Lampung	2011	0,87	0,46	3,13	73,69	80,23	6,49	9,080
131	BPD Lampung	2012	0,74	0,40	2,80	75,05	91,73	6,26	9,147
132	BPD Lampung	2013	0,76	0,60	1,89	80,86	110,56	5,73	9,255
133	BPD Lampung	2014	1,06	0,86	3,89	112,96	112,96	5,06	9,382
134	BPD Lampung	2015	1,12	0,74	3,25	68,73	87,66	4,88	9,507
135	BPD Lampung	2016	1,25	0,92	2,85	74,08	101,06	5,03	9,508
136	BPD Kalbar	2006	1,46	0,63	6,87	160,67	89,42	5,50	9,123
137	BPD Kalbar	2007	0,78	0,32	3,88	169,26	85,34	6,35	9,120
138	BPD Kalbar	2008	0,34	0,17	4,69	164,62	114,64	6,01	9,178
139	BPD Kalbar	2009	0,09	0,06	3,80	81,35	87,76	4,63	9,249
140	BPD Kalbar	2010	0,13	0,06	4,17	70,23	84,34	6,22	9,114
141	BPD Kalbar	2011	0,15	0,11	3,45	76,97	77,51	6,49	9,080
142	BPD Kalbar	2012	0,17	0,13	3,33	71,33	86,80	6,26	9,147
143	BPD Kalbar	2013	0,35	0,29	3,42	70,12	87,20	5,73	9,255
144	BPD Kalbar	2014	0,48	0,42	3,19	71,77	87,09	5,06	9,382
145	BPD Kalbar	2015	0,56	0,46	2,91	73,20	82,70	4,88	9,507
146	BPD Kalbar	2016	0,70	0,57	2,88	72,80	86,69	5,03	9,508
147	BPD Kalsel	2006	5,76	3,02	5,97	149,65	68,45	5,50	9,123
148	BPD Kalsel	2007	5,07	2,02	5,82	146,89	65,42	6,35	9,120
149	BPD Kalsel	2008	3,48	1,58	5,67	152,55	89,58	6,01	9,178

150	BPD Kalsel	2009	1,21	0,80	3,77	65,87	67,96	4,63	9,249
151	BPD Kalsel	2010	1,12	0,75	4,68	68,74	77,32	6,22	9,114
152	BPD Kalsel	2011	0,96	0,62	2,81	74,68	63,30	6,49	9,080
153	BPD Kalsel	2012	1,83	0,62	1,27	79,40	55,77	6,26	9,147
154	BPD Kalsel	2013	1,80	1,52	2,33	76,00	85,38	5,73	9,255
155	BPD Kalsel	2014	3,86	2,83	2,68	75,15	91,44	5,06	9,382
156	BPD Kalsel	2015	4,33	3,32	2,20	79,62	100,55	4,88	9,507
157	BPD Kalsel	2016	4,23	3,69	2,60	79,91	106,53	5,03	9,508
158	BPD Kaltim	2006	2,88	0,55	6,88	132,46	40,84	5,50	9,123
159	BPD Kaltim	2007	3,24	0,65	6,63	133,31	41,95	6,35	9,120
160	BPD Kaltim	2008	3,55	0,93	7,89	120,16	57,73	6,01	9,178
161	BPD Kaltim	2009	1,37	0,93	3,81	63,69	69,11	4,63	9,249
162	BPD Kaltim	2010	3,30	2,36	5,23	55,29	81,69	6,22	9,114
163	BPD Kaltim	2011	2,90	2,24	3,70	63,86	59,95	6,49	9,080
164	BPD Kaltim	2012	7,45	4,93	2,50	68,19	56,78	6,26	9,147
165	BPD Kaltim	2013	6,74	4,56	2,78	71,30	90,77	5,73	9,255
166	BPD Kaltim	2014	10,36	6,54	2,60	80,39	78,54	5,06	9,382
167	BPD Kaltim	2015	10,35	7,23	1,56	85,30	103,54	4,88	9,507
168	BPD Kaltim	2016	8,46	7,08	2,99	78,97	101,17	5,03	9,508
169	BPD Kalteng	2009	1,82	1,05	2,34	68,47	85,13	4,63	9,249
170	BPD Kalteng	2010	1,12	0,97	3,89	64,24	88,72	6,22	9,114
171	BPD Kalteng	2011	0,81	0,72	3,88	63,31	68,74	6,49	9,080
172	BPD Kalteng	2012	0,84	0,77	3,41	69,93	71,88	6,26	9,147
173	BPD Kalteng	2013	0,81	0,67	3,52	64,63	77,45	5,73	9,255
174	BPD Kalteng	2014	0,82	0,70	4,09	61,07	79,82	5,06	9,382
175	BPD Kalteng	2015	0,47	0,47	4,34	59,52	106,34	4,88	9,507
176	BPD Kalteng	2016	0,41	0,39	4,24	64,04	99,63	5,03	9,508
177	BPD Sulsel	2006	4,27	2,28	10,45	115,15	134,10	5,50	9,123
178	BPD Sulsel	2007	3,11	3,37	11,24	116,67	144,02	6,35	9,120
179	BPD Sulsel	2009	2,40	1,90	5,56	57,09	114,79	4,63	9,249
180	BPD Sulsel	2010	2,02	1,68	5,58	65,81	109,98	6,22	9,114
181	BPD Sulsel	2011	2,06	1,75	4,49	70,65	87,37	6,49	9,080
182	BPD Sulsel	2012	2,09	1,55	4,36	63,56	78,73	6,26	9,147
183	BPD Sulsel	2013	1,19	1,05	4,20	68,06	113,69	5,73	9,255
184	BPD Sulsel	2014	0,86	0,75	4,71	65,25	108,63	5,06	9,382
185	BPD Sulsel	2015	0,65	0,58	4,90	63,82	117,17	4,88	9,507
186	BPD Sulsel	2016	0,51	0,47	4,96	60,13	103,00	5,03	9,508
187	BPD Sultra	2007	3,34	3,21	13,86	102,10	110,06	6,35	9,120
188	BPD Sultra	2010	5,75	3,64	6,62	64,75	97,52	6,22	9,114

189	BPD Sultra	2011	2,24	1,31	7,44	54,45	83,68	6,49	9,080
190	BPD Sultra	2012	1,33	0,75	5,10	59,56	92,02	6,26	9,147
191	BPD Sultra	2013	1,64	1,26	4,43	62,60	96,71	5,73	9,255
192	BPD Sultra	2014	2,86	2,35	4,13	71,67	111,84	5,06	9,382
193	BPD Sultra	2015	2,90	2,50	3,41	76,41	94,44	4,88	9,507
194	BPD Sultra	2016	2,30	1,78	3,87	73,42	97,72	5,03	9,508
195	BPD Sulteng	2009	8,81	6,05	4,34	65,13	100,44	4,63	9,249
196	BPD Sulteng	2012	4,49	2,88	1,59	80,60	107,27	6,26	9,147
197	BPD Sulteng	2013	2,92	2,12	3,39	65,87	128,43	5,73	9,255
198	BPD Sulteng	2014	1,40	1,18	3,73	69,27	120,44	5,06	9,382
199	BPD Sulteng	2015	1,71	1,12	3,10	71,60	80,62	4,88	9,507
200	BPD Sulteng	2016	1,36	0,94	2,91	72,82	91,11	5,03	9,508
201	BPD Sulut	2006	2,13	1,04	11,62	147,66	125,93	5,50	9,123
202	BPD Sulut	2007	2,37	1,36	7,61	162,04	133,28	6,35	9,120
203	BPD Sulut	2008	2,94	1,83	5,57	166,82	163,24	6,01	9,178
204	BPD Sulut	2009	0,51	0,37	1,89	89,84	104,98	4,63	9,249
205	BPD Sulut	2010	0,98	0,77	3,04	85,09	100,25	6,22	9,114
206	BPD Sulut	2011	1,26	0,98	2,01	84,96	99,78	6,49	9,080
207	BPD Sulut	2012	0,81	0,72	2,95	77,45	109,62	6,26	9,147
208	BPD Sulut	2013	0,54	0,46	2,16	75,56	112,94	5,73	9,255
209	BPD Sulut	2014	1,29	1,07	3,48	83,76	90,10	5,06	9,382
210	BPD Sulut	2015	0,97	0,86	1,56	87,35	95,09	4,88	9,507
211	BPD Sulut	2016	0,94	0,85	2,00	86,68	103,68	5,03	9,508
212	BPD Bali	2006	2,88	2,20	9,80	134,85	167,53	5,50	9,123
213	BPD Bali	2007	2,82	2,19	9,11	138,57	161,94	6,35	9,120
214	BPD Bali	2008	2,24	1,83	8,65	143,49	170,96	6,01	9,178
215	BPD Bali	2009	0,68	0,66	4,26	66,72	103,75	4,63	9,249
216	BPD Bali	2010	0,57	0,44	3,98	68,96	93,31	6,22	9,114
217	BPD Bali	2011	0,57	0,45	3,54	69,74	82,73	6,49	9,080
218	BPD Bali	2012	0,45	0,34	4,28	62,82	80,60	6,26	9,147
219	BPD Bali	2013	0,33	0,26	3,97	63,03	87,87	5,73	9,255
220	BPD Bali	2014	0,35	0,28	3,92	64,89	96,41	5,06	9,382
221	BPD Bali	2015	1,96	1,59	3,33	69,67	97,32	4,88	9,507
222	BPD Bali	2016	1,47	1,22	3,76	66,51	102,75	5,03	9,508
223	BPD NTT	2006	1,19	1,11	9,43	131,72	140,74	5,50	9,123
224	BPD NTT	2007	1,48	1,31	8,77	133,81	152,58	6,35	9,120
225	BPD NTT	2008	2,08	1,86	8,98	134,41	198,05	6,01	9,178
226	BPD NTT	2009	1,50	1,36	4,05	70,68	122,79	4,63	9,249
227	BPD NTT	2010	2,49	1,84	4,30	72,10	91,77	6,22	9,114

228	BPD NTT	2011	1,20	0,93	4,19	71,04	92,95	6,49	9,080
229	BPD NTT	2012	1,20	0,87	3,65	71,57	93,45	6,26	9,147
230	BPD NTT	2013	1,30	1,00	3,96	67,13	96,36	5,73	9,255
231	BPD NTT	2014	1,52	1,16	3,72	69,24	87,68	5,06	9,382
232	BPD NTT	2015	2,32	1,87	3,44	69,28	90,09	4,88	9,507
233	BPD NTT	2016	2,34	2,11	2,94	75,72	107,39	5,03	9,508
234	BPD NTB	2006	2,84	2,49	6,03	160,28	189,11	5,50	9,123
235	BPD NTB	2007	5,46	4,72	5,22	170,44	200,74	6,35	9,120
236	BPD NTB	2008	7,02	5,83	7,48	161,15	241,54	6,01	9,178
237	BPD NTB	2009	4,07	3,83	4,39	75,02	115,50	4,63	9,249
238	BPD NTB	2010	2,92	2,41	6,27	72,43	102,23	6,22	9,114
239	BPD NTB	2011	2,17	2,01	5,71	68,81	101,45	6,49	9,080
240	BPD NTB	2012	1,98	1,75	5,62	64,32	108,41	6,26	9,147
241	BPD NTB	2013	1,73	1,50	5,10	64,19	105,56	5,73	9,255
242	BPD NTB	2014	1,46	1,14	4,61	66,00	99,78	5,06	9,382
243	BPD NTB	2015	1,31	1,19	4,27	67,19	100,87	4,88	9,507
244	BPD NTB	2016	1,20	1,11	3,95	68,69	97,66	5,03	9,508
245	BPD Maluku	2006	9,68	6,15	2,46	180,09	101,78	5,50	9,123
246	BPD Maluku	2008	7,31	4,08	4,84	162,54	113,17	6,01	9,178
247	BPD Maluku	2009	3,00	2,41	3,78	73,88	94,56	4,63	9,249
248	BPD Maluku	2010	3,62	2,89	3,63	75,30	102,68	6,22	9,114
249	BPD Maluku	2011	2,48	1,60	4,52	70,14	82,44	6,49	9,080
250	BPD Maluku	2012	2,67	1,61	3,25	73,90	78,61	6,26	9,147
251	BPD Maluku	2013	2,46	1,73	3,34	72,78	90,86	5,73	9,255
252	BPD Maluku	2014	2,38	1,97	0,01	99,56	92,26	5,06	9,382
253	BPD Maluku	2015	2,37	1,69	3,56	70,98	85,28	4,88	9,507
254	BPD Maluku	2016	1,95	1,27	3,15	71,84	86,87	5,03	9,508
255	BPD Papua	2006	3,96	0,95	6,22	156,44	52,44	5,50	9,123
256	BPD Papua	2007	3,91	0,78	5,98	147,93	40,69	6,35	9,120
257	BPD Papua	2008	3,38	0,79	6,44	141,31	49,99	6,01	9,178
258	BPD Papua	2009	1,81	0,56	3,23	69,72	36,50	4,63	9,249
259	BPD Papua	2010	0,95	0,33	2,86	70,67	43,88	6,22	9,114
260	BPD Papua	2011	1,09	0,45	3,01	69,44	48,01	6,49	9,080
261	BPD Papua	2012	0,84	0,51	2,81	74,15	71,65	6,26	9,147
262	BPD Papua	2013	1,14	0,78	2,86	72,01	84,48	5,73	9,255
263	BPD Papua	2014	7,33	5,13	1,02	91,38	80,12	5,06	9,382
264	BPD Papua	2016	15,03	10,99	1,28	91,14	85,76	5,03	9,508

Lampiran 2

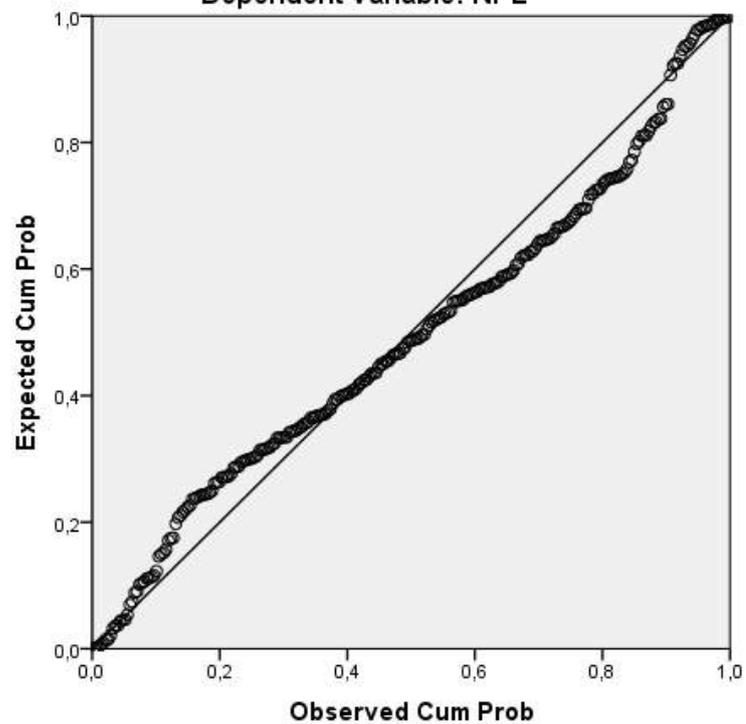
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09	15,03	2,5094	2,14470
GDP	264	4,63	6,49	5,6372	,64307
LnKURS	264	9,08	9,51	9,2469	,15150
LDR	264	36,50	241,54	95,8415	28,62980
KAP	264	,06	10,99	1,7560	1,54908
ROA	264	,01	13,86	4,1052	2,02094
BOPO	264	54,45	180,09	91,0494	33,14668
Valid N (listwise)	264				

Lampiran 3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: NPL



Lampiran 4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,871	3,183		1,216	,225		
GDP	-,116	,067	-,035	-1,725	,086	,375	2,664
LnKURS	-,306	,311	-,022	-,984	,326	,318	3,144
LDR	-,017	,001	-,227	-15,062	,000	,671	1,490
KAP	1,344	,018	,971	73,046	,000	,866	1,155
ROA	,020	,018	,018	1,099	,273	,540	1,853
BOPO	,014	,001	,222	14,070	,000	,612	1,633

a. Dependent Variable: NPL

Lampiran 5

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,960	,43025	1,433

a. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

b. Dependent Variable: NPL

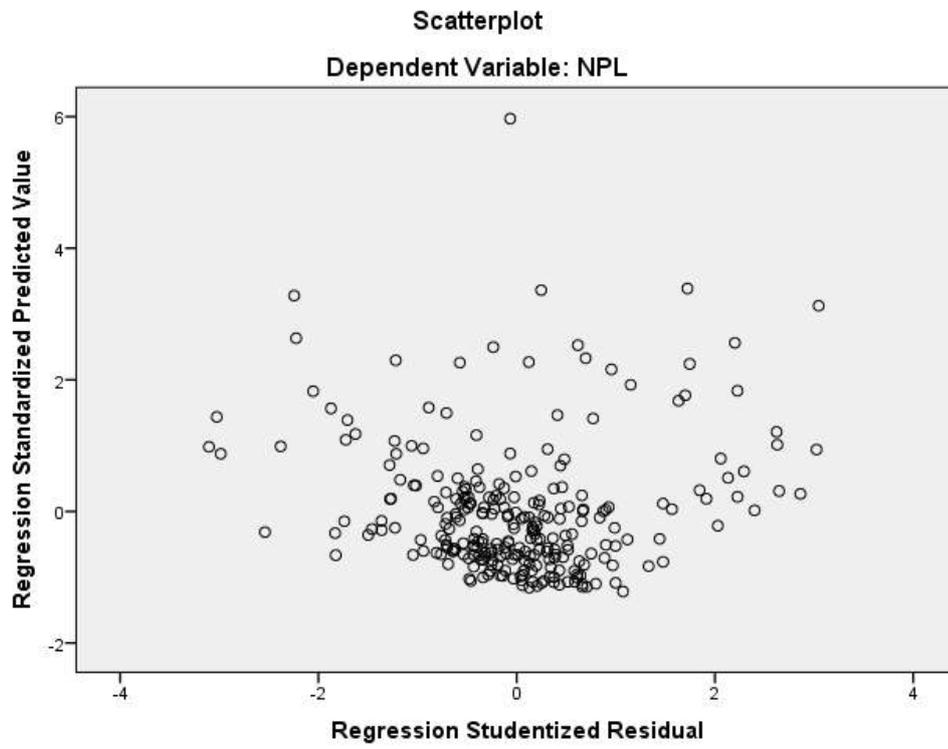
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1162,154	6	193,692	1046,343	,000 ^b
	Residual	47,574	257	,185		
	Total	1209,728	263			

a. Dependent Variable: NPL

b. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

Lampiran 6



**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MANAJEMEN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN**



**DIAJUKAN OLEH
CB HAGANA RESMIPUTRA
NIM: 041411233068**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2018

SKRIPSI

**DETERMINAN NON-PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2016**

DIAJUKAN OLEH

CB HAGANA RESMIPUTRA

NIM: 041411233068

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



CHORRY SULIATYOWATI SE., M.Sc.
NIP: 198504102008122001

TANGGAL ²⁶⁻⁷⁻²⁰¹⁸

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. MASMIRA KURNIAWATI, SE., M.Si.
NIP: 19750323.2006042001

TANGGAL ²⁷⁻⁷⁻²⁰¹⁸

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (CB Hagana Resmiputra, 041411233068), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Juni 2018



CB Hagana Resmiputra

NIM. 041411233068

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Allah Bapa segala puji dan rasa syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kami anugerah terindah dan kasihnya sehingga mampu menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang juga menjadi awal dalam perjalanan hidup untuk berjuang menggapai cita cita dan membahagiakan kedua orang tua. Tanpa kuasa dan kasih-Mu saya tidak akan bisa sampai pada titik ini , dan kiranya Engkau senantiasa membimbing , memberkati dan mengasihi hamba-Mu ini .

Tidaklah mudah menyelesaikan tugas akhir ini , oleh karena itu saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tulisan ini tidak akan terselesaikan, dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu perkenankan saya untuk mengucapkan beriburibu terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu saya selama proses penulisan ini dan semasa menjalankan studi sebagai mahasiswa.

Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada ibu Chorry Sulistyowat , M.sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada seluruh dosen program studi manajemen Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga telah banyak menginspirasi saya hingga saat ini dan terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Antonius Haribowo

Resmipoetro S.H dan Ibu Anastasia Evy Roosiany S.Ak yang telah mendukung dan mendoakan saya hingga sampai pada titik ini.

Ucapan terimakasih juga saya berikan kepada teman teman grup KAMPRET, teman teman seperjuangan di kontrakan Kertajaya, dan terutama sahabat sahabat saya Angga, yoga, eky, dito yang telah banyak membantu saya dalam berbagai macam hal, baik dukungan materiil maupun inmateriil yang sangat membantu saya dalam menjalankan studi dan proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saya memohon saran, kritik dan masukan yang membangun agar bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Saya sebagai penulis memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan, kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non Performing Loan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel makro (*Gross Domestic Product* dan Kurs), variabel rasio spesifik bank (Pertumbuhan kredit, Kualitas aktiva produktif, profitabilitas, efisiensi operasional bank) terhadap rasio *Non Performing Loan* pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan publikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resmi OJK dan situs resmi Badan Pusat Statistik. Periode penelitian dimulai dari bulan Desember 2006 sampai dengan Desember 2016. Hasil studi penelitian menunjukkan secara individual variabel *Gross Domestic Product*, Kurs dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya NPL, sedangkan variabel kualitas aktiva produktif, inefisiensi operasional, dan pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh yang signifikan pada level signifikansi 5%.

Kata kunci : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, Determinan NPL

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the factors that influence the occurrence of Non Performing Loan in the Group of Regional Development Banks in Indonesia. Hypothesis testing is done by multiple regression analysis technique to know the effect of macro variable (Gross Domestic Product and Kurs), Bank's Specific Loan to Deposit Ratio, Earning Asset Quality, Return on Asset, Operational Revenue Operating Expense) to Non Performing Loan ratio at Regional Development Banks in Indonesia The source of data used in this study comes from publication reports available in the Financial Services Authority through the official website of the Financial Services Authority and the official website of the Central Bureau of Statistics. The research period starts from December 2006 to December 2016 The result of research study showed individually variable of Gross Domestic Product, Kurs and profitability variable did not have significant effect to NPL, while credit quality, operation inefficiency, and credit growth variable have significant influence to non performing loan at 5% significant level

Key-words : Non-Performing Loan, Bank Pembangunan Daerah, NPL Determinant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank.....	10
2.1.2 Pengertian kredit	14
2.1.3 Determinan non-performing loan.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.3 Hipotesis dan Model Analisis	26
2.3.1 Hipotesis.....	26
2.3.2 Model analisis	26
2.4 Kerangka berpikir	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan penelitian	28

3.2	Identifikasi variabel	28
3.3	Definisi Operasional	28
3.4	Jenis dan sumber data	29
3.5	Prosedur penentuan sampel.....	30
3.6	Prosedur pengumpulan data.....	30
3.7	Teknik analisis	31
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
4.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	39
4.4	Analisis Model dan Pengujian Hipotesis	41
4.5	Pembahasan.....	42
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1	Simpulan	47
5.2	Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL		HAL
Tabel 1.1 :	Tabel Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016	3
Tabel 1.2 :	Tabel Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD tahun 2012 s/d 2016.....	6
Tabel 4.1 :	Deskripsi Statistik Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.2 :	Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).....	41

DAFTAR GAMBAR		HAL
Gambar 1.1:	Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial tahun 2012 s/d 2016.....	2
Gambar 1.2 :	Grafik NPL Bank Umum dan BPD Tahun 2012 s/d 2016.....	5
Gambar 1.3 :	Grafik Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis dan Orientasi Penggunaan tahun 2012 s/d 2016.....	6
Gambar 1.4 :	Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016.....	7
Gambar 2.1 :	Kerangka berpikir penelitian.....	7

BAB 1

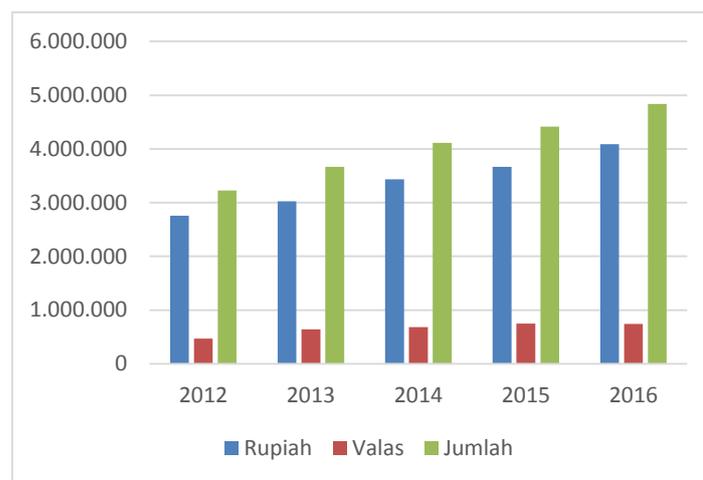
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia berjalan sangat cepat, hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah bank, jumlah transaksi, jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat, ragam layanan dan beragam aspek yang terdapat pada bisnis perbankan dimasa sekarang ini. Pada tahun 2012 jumlah dana yang telah disalurkan oleh perbankan di Indonesia mencapai 3.225.198 miliar rupiah. Terus mengalami peningkatan tiap tahun-nya hingga pada awal tahun 2016 dana yang telah disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat mencapai 4.836.758 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh perbankan untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan sektor pembangunan dan pergerakan perekonomian di Indonesia. Disamping itu harapan masyarakat akan ketersediaan dana dan kualitas pelayan perbankan menjadi prioritas sehingga diperlukannya lingkungan bisnis sektor perbankan yang sehat, kuat dan tangguh sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (*Commercial Bank*), Bank Syariah (*Sharia Bank*), dan Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia, 2016). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Dana pihak ketiga yang dihimpun bank mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh sektor perbankan membuat bank harus menanggung biaya penyimpanan dana yang cukup besar pula jika dana tersebut tidak dimanfaatkan dan disalurkan ke pihak ketiga yang membutuhkan. Oleh karena itu bank menyalurkan kembali dana simpanan tersebut dalam bentuk kredit untuk memperoleh *spread* (selisih bunga) sehingga beban biaya penyimpanan dana dapat tergantikan. Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun sektor perbankan Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan Desember 2016.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Milliar)

Gambar 1.1

Grafik penghimpunan DPK oleh bank umum komersial dari tahun 2012 s/d 2016

Tuntutan yang sedemikian besar membuat bank sering terlalu fokus untuk melakukan kegiatan ekspansi kredit namun mengabaikan prinsip pemberian kredit yang sehat dan baik. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka

tingkat kesehatan bank akan menurun dan menuntun-nya pada likuidasi. Kredit yang disalurkan perbankan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Penyaluran kredit oleh bank umum tahun 2012 s/d 2016
(Miliar)

Tahun	Kepada pihak ketiga	Kepada bank lain	Jumlah
2012	2.707.862	17.812	2.725.674
2013	3.292.874	26.968	3.319.842
2014	3.674.308	32.192	3.706.501
2015	4.057.904	34.200	4.092.104
2016	4.377.195	36.220	4.413.414

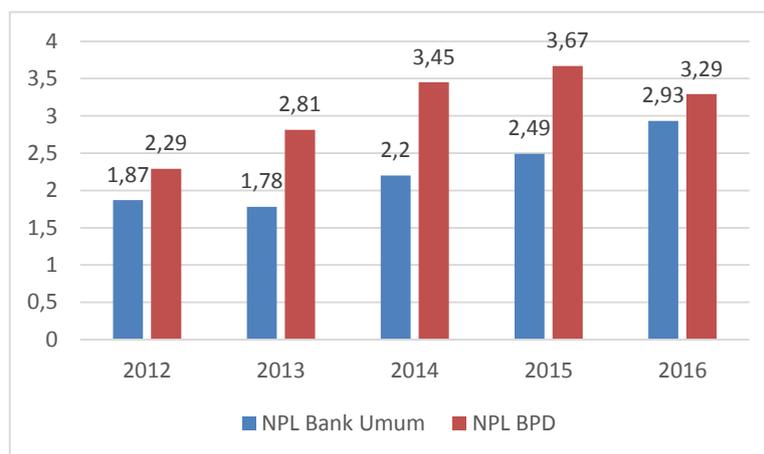
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2017

Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari tahun 2012 sebesar Rp. 2.725.674 miliar menjadi Rp 4.377.195 pada Januari 2016, jika dihubungkan dengan tabel sebelumnya tentu kenaikan jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di bank akan mengakibatkan kenaikan jumlah penyaluran dana oleh bank . Jika melihat komposisi penyaluran dana oleh bank dari tahun 2012 s/d Desember 2016 komposisi terbesar dari kegiatan penyaluran dana sektor perbankan di Indonesia adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank. Dari jumlah kredit tersebut merupakan kredit yang sehat namun sebagian diantaranya tentu terdapat kredit yang buruk. Kredit bermasalah atau macet dalam dunia perbankan sering disebut sebagai *Non Performing Loan (NPL)*, sebenarnya

merupakan hal yang biasa dalam bisnis perbankan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan lepas dari fungsi penyaluran dana melalui kredit, namun jika jumlah *NPL* mencapai angka yang melebihi tingkat kemampuan bank tentu akan mengakibatkan bencana bagi bank tersebut, hal itu dikarenakan terlalu besarnya tingkat *NPL* suatu bank akan menurunkan tingkat profitabilitas bank, selain itu tingkat likuiditas juga akan menurun dan dapat menyebabkan kondisi bank tidak sehat yang berujung pada kebangkrutan (likuidasi).

Dalam Surat Keputusan Direksi No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menilai kredit bermasalah atas dasar kualitasnya, dibagi menjadi lima golongan yaitu kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Masing masing kelompok diukur dengan kriteria utama yaitu prospek usaha, kemampuan membayar dan kondisi keuangan debitur. Beberapa tahun terakhir rata-rata tingkat *NPL* bank umum di Indonesia mengalami kenaikan. Dikutip dari media pemberitaan dalam bidang perbankan Infobank, tingkat *NPL* perbankan sendiri berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat *NPL* sebesar 2,49%, mengalami peningkatan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan Maret 2017 *NPL* kembali mengalami peningkatan menjadi 3,04% (Statistik Perbankan Indonesia). Namun diantara beberapa kelompok bank umum komersial di Indonesia, kelompok Bank Pembangunan Daerah atau BPD merupakan kelompok bank yang mempunyai rata-rata rasio *NPL* yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok bank secara umum yang mencakup semua jenis bank.

Pada akhir tahun 2016 rasio NPL Bank Pembangunan Daerah (BPD) berada di posisi 3,29% sedangkan rasio NPL pada bank secara umum berada di posisi 2,93% selain itu rasio NPL perbankan tertinggi di Indonesia pada saat ini dimiliki oleh salah satu BPD yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua yang mencapai 15,3%. Menurut Sukanto kepala Otoritas Jasa Keuangan regional 4 dalam paparannya di indonesia banking expo di Jakarta, hal ini merupakan efek dari keinginan dari kelompok Bank Pembangunan Daerah untuk mulai mengembangkan penyaluran kredit produktif ke masyarakat.(kontan.co.id – 24/9/17).

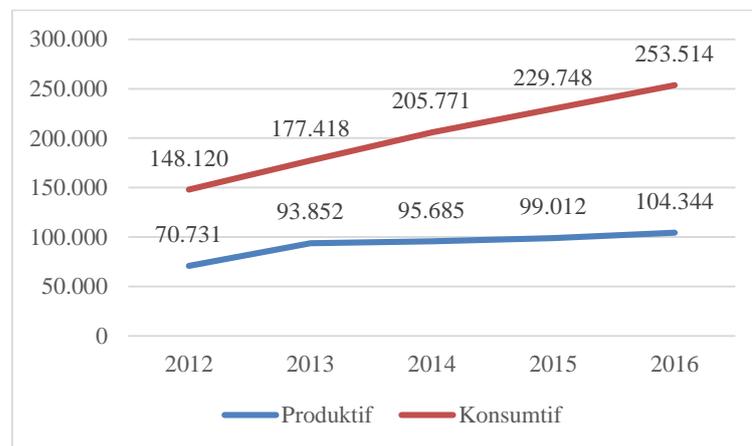


Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Persen)

Gambar 1.2
Grafik NPL Bank Umum dan BPD

Sejauh ini BPD masih menggantungkan penyaluran kredit ke sektor konsumsi sebesar 60-90% dari total penyaluran kredit. Keputusan untuk mengembangkan penyaluran kredit ke bidang produktif oleh BPD bukan malah memperbaiki kinerja namun malah memperburuk kinerja BPD sendiri. Hal tersebut

dipercaya disebabkan oleh ketidaksiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh BPD dalam mengelola atau mengidentifikasi risiko kredit sektor produktif .



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016 (Miliar)

Gambar 1.3
 Kredit BPD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Orientasi Penggunaan

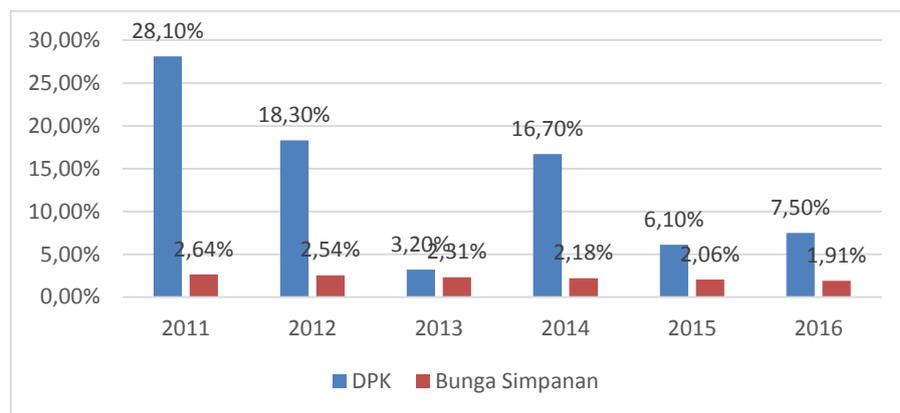
Tabel : 1.2
 Perkembangan kredit dan tingkat NPL BPD dari tahun 2012 s/d 2016 (Miliar)

	2012	2013	2014	2015	2016
Total Kredit	218.851	264.541	301.456	328.759	357.859
NPL	5.025	7.444	10.406	12.070	11.801
Rasio NPL	2.2%	2,4%	3.4%	3.67%	3.29%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Perkembangan penyaluran kredit BPD terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun . Dapat dilihat dari Tabel 1.2 jumlah penyaluran kredit oleh BPD kepada pihak ketiga bukan bank dari tahun ketahun mengalami peningkatan ,

namun sejalan dengan itu jumlah NPL pun juga semakin meningkat, hanya pada tahun 2016 yang berlaku sebaliknya. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPD tidak lepas dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok bank BPD yang juga mengalami peningkatan meskipun prosentase pertumbuhannya mengalami tren negatif dari tahun ke tahun akibat dari penurunan rata rata suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD. Dari gambar 1.4 dapat dilihat tren negatif dari pertumbuhan penghimpunan DPK oleh kelompok BPD pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dimana hal tersebut disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh kelompok BPD.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 1.4
Grafik pertumbuhan penghimpunan DPK oleh BPD dari tahun 2012 s/d 2016

Kredit bermasalah yang besar dalam industri perbankan membawa dampak yang luas. Besarnya tingkat NPL dari sisi mikro dapat merugikan dan menghambat perkembangan usaha selain itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dilihat dari sudut pandang makro, mengingat dana yang dihimpun oleh bank digunakan

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk membuka kredit baru dan menutup kemungkinan bagi debitur lain untuk mendapatkan kredit. Peningkatan NPL dapat dipengaruhi oleh factor makro ekonomi, faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor eksternal baik bank maupun debitur. Jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi , kondisi ekonomi nasional memiliki peran yang cukup besar terhadap tingkat risiko gagal bayar. Kondisi ekonomi yang lesu karena penurunan kemampuan sektor usaha untuk menghasilkan barang dan jasa akibat dari menurunnya konsumsi masyarakat tentu akan mempengaruhi pendapatan sektor usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kemampuan sektor usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari sisi intern bank tentunya faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya NPL adalah kelemahan pengelolaan kredit , agresifitas bank dalam menyalurkan kredit , jaminan yang tidak memadai atau tidak mencover kredit dan lain lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan guna memperoleh jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah faktor makro ekonomi (*Gross Domestic Product (GDP)* dan tingkat kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi operasional bank) berpengaruh terhadap NPL pada bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian - penelitian sebelumnya berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia adalah untuk mengetahui pengaruh factor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product (GDP)*, tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (tingkat pertumbuhan kredit, kualitas kredit , profitabilitas , dan efisiensi operasional bank) terhadap NPL

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan temuan dan bukti empiris yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai faktor internal bank yang secara signifikan dapat mempengaruhi arah hubungan terjadinya NPL pada bank perusahaan daerah di Indonesia
2. Memberikan penjelasan yang relevan kepada setiap pengambil kebijakan yang dalam hal ini para manajer keuangan bank dalam melakukan tugasnya dan menjaga nilai NPL dari bank tertentu untuk menjaga tingkat kesehatan bank
3. Menjadi acuan analisis bagi para akademisi untuk mendorong penelitian penelitian berikutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian, fungsi dan jenis bank

Menurut Grosse dan Hemple (2013:1) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber - sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu menurut F.E. Perry (2013:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Menurut Stuart (2013:1) , bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit , baik dengan alat - alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi memperlancar lalu lintas giral.
2. *Agent of Trust* , bank merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya dengan cara memelihara kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang cukup
3. *Agent of Development* , yaitu berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi
4. *Agent of Service* , bank turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*) ,jasa penagihan atau inkaso (*collection*) dan jasa kotak pengamanan (*safe deposit box*).

Menurut Rivai,dkk (2013:2), dalam bukunya *Bank and financial institution management*, Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua berikut ini :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan “menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk membangun koperasi,

pengembangan pengusaha golongan kecil, pengembangan ekspor non-migas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. (Rivai, 2007:322)

Menurut Hendro dan Rahardja (2014:123) berdasarkan kepemilikannya bank dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Bank Pemerintah

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat baik sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Bank swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya adalah milik swasta nasional dan swasta asing.

3. Bank Koperasi

Bank yang sebagian besarnya atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi

4. Bank asing

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing.

5. Bank campuran

Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Klasifikasi bank menurut kepemilikan di Indonesia berbeda dengan negara negara lain pada umumnya .Bank milik negara dibagi menjadi 2 jenis yaitu BUMN dan BPD. BPD adalah salah satu bank bentukan pemerintah yang pada awalnya di fokuskan dalam bidang pembangunan daerah. Pada 25 Mei 1960 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah (BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959

menjadi 22 bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang (1959) menjadi 17 cabang (1965).

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas ketentuan Bank Pembangunan Daerah menyatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan . Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. Sampai saat ini ada 26 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi.

2.1.2 Pengertian kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:1) perkataan kredit sesungguhnya berasal dari kata *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seadainya jika seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Kredit diberikan

atas dasar kepercayaan , artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Pada dasarnya tujuan kredit adalah *profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur dan tujuan *safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU Perbankan No.10 th 1998)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dan mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan pemberian tingkat bunga yang berbeda beda sesuai risiko yang terkandung.

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. (Rivai, 2013:198)

Menurut Rivai (2013:211) kriteria kualitas kredit perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Pembayaran angsuran pokok dana atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutase rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

Kredit digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum lebih 90 hari
- b. Kadang kadang terjadi cerukan
- c. Mutase rekening relative aktif
- d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. didukung oleh pinjaman baru

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana tau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- d. Terjadi pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dana atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria berikut

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan tau bunga yang telah melampaui 270hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam Menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai risiko minimal dengan kata lain kredit dapat dikembalikan sepenuhnya, tepat waktu dan tidak menjadi kredit bermasalah. Namun dalam praktek bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan tidak semuanya lancar dan sehat, dan ketika bank gagal dalam mengelola risiko tersebut maka akan timbul

kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. *Non-performing loan (NPL)* adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi (latumaerissa,1996)

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004). *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004). Agar kinerja berapor biru maka setiap bank harus menjaga *NPL*-nya dibawah 5% (Infobank, 2017), hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. *NPL* dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Akibat tingginya *NPL* perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian kredit dengan membentuk cadangan kerugian kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis, sedangkan modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit dan dapat mempengaruhi kemampuan bank memperoleh

keuntungan dari pendapatan bunga. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Kredit macet dalam jumlah besar dalam industri perbankan membawa dampak yang cukup luas. Secara makro dampak dari besarnya tingkat NPL dapat memperlambat perekonomian negara mengingat peran bank sebagai salah satu penyalur sumber dana kepada masyarakat, jika kredit macet jumlahnya besar membuat bank akan lebih berhati-hati dan selektif untuk memberikan pinjaman sehingga standarisasi pinjaman meningkat, disisi lain jika kredit macet membuat likuiditas bank berkurang maka menghambat bank untuk membuka penyaluran kredit baru kepada masyarakat sehingga perekonomian menjadi lambat. Secara mikro besarnya kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena jumlah kredit macet yang terlalu besar akan menurunkan likuiditas bank yang kemudian mengurangi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.3 Determinan *non-performing loan*

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya non performing loan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor makroekonomi dan factor spesifik bank (Ghost, 2015) (Dimitros *et. al.*, 2016). Faktor makro ekonomi mempunyai dampak cukup signifikan terhadap NPL. Berikut adalah beberapa yang dapat mempengaruhi NPL.

Faktor makroekonomi

1. Tingkat *Gross Domestic Product*

Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara adalah *Gross Domestic Product* (GDP). Menurut (Sudremi 2007:103) “*Gross Domestic Product* merupakan nilai seluruh barang dan jasa akhir yang

diproduksi oleh seluruh input, baik faktor produksi milik warga negara Indonesia maupun milik warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia dalam periode tertentu”. Penurunan konsumsi masyarakat yang diikuti dengan penurunan tingkat investasi sektor usaha dan penurunan *GDP* riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara sehingga kegiatan perekonomian menjadi melambat . Hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya dari industri perbankan dengan kata lain menurunnya *GDP* dapat meningkatkan *NPL* .

2. Kurs

Kurs dalam hubungannya dengan *non-performing loan* digunakan sebagai proxy dari kebijakan moneter, kurs yang terdepresiasi mengakibatkan memburuknya kemampuan sektor usaha yang kemudian pada gilirannya akan meningkatkan kredit bermasalah bagi sistem perbankan . Nilai tukar yang terdepresiasi mengakibatkan penurunan neraca perusahaan sehingga melemahkan kemampuan investasi perusahaan di masa depan terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Fluktuasi nilai tukar mengakibatkan bank devisa mengalami kesulitan. Kewajiban dalam bentuk valas sering tidak dilindungi. Bank juga sering memberikan kredit dalam bentuk valas kepada perusahaan perusahaan yang tidak mendapatkan devisa. Akibatnya depresiasi nilai tukar rupiah akan menggelembungkan *non-performing loan* perbankan (Sugema, 2013) . Faktor kurs nilai tukar semakin besar dampaknya

kepada debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dan memasarkan produknya di dalam negeri dengan menggunakan mata uang nasional. Hal ini menyebabkan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk menanggungnya (Sutojo, 2000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin menurunnya nilai tukar mata uang, maka membuat kemampuan untuk membayar kewajiban dalam bentuk kredit beserta bunganya juga lemah, sehingga pada akhirnya meningkatkan NPL.

KURS = LN (Rata-rata kurs tengah tahunan terhadap US dollar).....(2.2)

Faktor spesifik bank

1. Pertumbuhan kredit

Ketika bank memutuskan untuk menaikkan jumlah penyaluran kredit maka bank akan menurunkan suku bunga pinjaman dan menurunkan standard pemberian kredit sehingga hal itu dapat menyebabkan penyaluran kredit kepada pihak yang berisiko tinggi untuk terjadinya gagal bayar atau *default* (Keeton,1999). Faktor ini diukur dengan menggunakan *loan to Deposit Ratio* sesuai dengan penelitian Dimitros (2016). Dengan nilai LDR yang tinggi tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 110% maka bank dianggap sehat, hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk kredit secara maksimal yang dinilai sebagai aset paling produktif. LDR yang tinggi berarti adanya penyaluran kredit yang tinggi pula. Dengan demikian risiko terjadinya NPL tinggi pula. Perhitungan LDR juga

menggambarkan risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank itu sendiri, semakin tinggi LDR maka semakin tinggi risiko likuiditas bank karena hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Variabel ini dihitung dengan rumus Total kredit dibandingkan dengan Total dana Pihak Seimanan Pihak III :

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.3)$$

Dengan meningkatnya rasio ini diharapkan akan meningkatkan NPL bank

2. Kualitas Aktiva Produktif

Besarnya rasio kualitas aktiva produktif menggambarkan kualitas kredit bank dan perilaku bank dalam mengatasi risiko kredit. Teori yang mendasari variabel ini adalah teori '*moral hazard*' oleh Keeton dan Morris (1987). Dalam penelitiannya mereka berpendapat bahwa bank dengan kualitas kredit yang lemah memiliki anggota yang cenderung melakukan tindakan bersifat *moral hazard* dengan meningkatkan risiko dari portofolio kredit mereka dan tentu akan meningkatkan risiko terjadinya *NPL*, kualitas kredit di ukur menggunakan rasio KAP, semakin buruk kualitas kredit bank maka semakin tinggi rasio KAP yang pada akhirnya meningkatkan *NPL*. Pengukuran dari variabel ini dihitung dengan rumus :

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif diklasifikasikan}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

3. Profitabilitas bank

Tingkat profitabilitas bank adalah tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari berbagai jenis kegiatan bisnisnya. Bank yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tentu saja cenderung tidak

melakukan berbagai aktivitas yang memiliki resiko tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas bank akan menurunkan kecenderungan bank dalam mengambil tindakan berisiko dalam kebijakan kredit dan tentu menurunnya NPL . Hal ini sesuai dengan teori *bad management* oleh (Berger dan DeYoung, 1997). Di lain pihak meningkatnya profitabilitas juga dapat meningkatkan NPL hal tersebut dikemukakan oleh (Rajan, 1994) ketika kebijakan kredit bank tidak semata mata difokuskan untuk memaksimalkan laba, namun kebijakan kredit juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen bank untuk memperbaiki reputasi dan kinerja mereka dengan menerapkan kebijakan kredit liberal. Manajemen berusaha untuk meyakinkan pasar atau pemangku kepentingan mengenai kinerja kredit yang dilakukan oleh bank dengan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas saat ini namun hal tersebut akan berdampak pada peningkatan *NPL* di masa depan. Profitabilitas bank dapat dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.5)$$

4. Inefisiensi kegiatan operasional bank

Dampak dari efisiensi biaya operasional masih belum terlalu jelas, jika mengacu dari penelitian Berger dan DeYoung (1987), bank yang menggunakan sumber dana seminimal mungkin dalam melakukan pengawasan risiko pinjaman akan meningkatkan efisiensi biaya. Tingkat inefisiensi biaya operasional bank diukur menggunakan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini mengukur kualitas

manajemen bank dalam melakukan kegiatan operasional. Kualitas manajemen bank yang baik terlihat pada kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko yang muncul melalui kebijakan yang diterapkan. Semakin kecil rasio BOPO, menunjukkan bank mengalami peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan efisiensi kegiatan operasional bank karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya operasional dengan pendapatan operasional (Rivai,2013). BOPO dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.6)$$

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *NPL* sebagai berikut:

1. Ghosh (2015) meneliti mengenai faktor bank specific dan faktor ekonomi tingkat negara bagian yang mempengaruhi *NPL* di 50 negara bagian di Amerika. Sampel yang digunakan adalah seluruh bank yang terdaftar di setiap negara bagian yang tersedia di FDIC. Model analisis yang digunakan adalah *Fixed effect* dan *system-GMM estimation*. Hasil dari penelitian menunjukkan makin tingginya tingkat kapitalisasi bank, risiko likuiditas, lemahnya kualitas kredit, ketidakefisienan biaya dan ukuran industri perbankan secara signifikan meningkatkan *NPL* namun meningkatnya tingkat profitabilitas bank menurunkan tingkat *NPL* . Meningkatnya nilai *GDP* riil , pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara bagian

menurunkan *NPL*. sedangkan tingkat inflasi, tingkat pengangguran negara bagian dan tingkat hutang nasional secara signifikan meningkatkan *NPL*.

2. Dimitros *et. al.* (2016) meneliti mengenai determinan makroekonomi dan kinerja spesifik bank ,di negara negara Eropa periode 1990- 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan dan makroekonomi 15 negara eropa . Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *GMM estimation*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel makroekonomi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan *GDP* riil menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap *NPL*. Faktor spesifik bank terkait dengan kemampuan manajemen dan manajemen risiko menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan *NPL* dimasa depan, dan variabel pengaruh pajak pada pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*
3. Soebagio 2004 meneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya *non-performing loan* pada bank umum komersial di Indonesia periode 2000 – 2004. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan faktor makro ekonomi yang terdiri dari kurs, inflasi, dan GDP dimana kurs dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap *NPL* sedangkan GDP tidak berpengaruh signifikan. Faktor mikro yang terdiri dari CAR,KAP,tingkat bunga pinjaman, LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *NPL*.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Tingkat pertumbuhan *GDP* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 2 : Tingkat Kurs berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 3 : Pertumbuhan kredit berpegaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 4 : Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 5 : Profitabilitas bank berpengaruh negatif terhadap terjadinya *NPL*

Hipotesis 6 : Inefisiensi operasional bank berpengaruh positif terhadap terjadinya *NPL*

2.3.2 Model analisis

Untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi (tingkat *GDP* dan tingkat inflasi) dan faktor spesifik bank (Pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank) terhadap *NPL*, maka akan digunakan model analisis regresi berganda sebagai metode estimasi dengan persamaan berikut:

$$(NPL_s)_{it} = \beta_1(RGDP)_t + \beta_2(KURS)_t + \beta_3(LDR)_{i,t} + \beta_4(KAP)_{i,t} + \beta_5(PROFIT)_{i,t} + \beta_6(BOPO)_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan :

$(NPL_s)_{it}$ = Prosentase dari *NPL* pada bank *i* periode *t*

$\beta_1(RGDP)_t$ = Pertumbuhan *GDP* riil pada periode *t*

$\beta_2(\text{KURS})_t =$ Tingkat kurs tengah pada periode t

$\beta_3(\text{LDR})_{i,t} =$ Tingkat loan to deposit ratio pada bank i periode t

$\beta_4(\text{KAP})_{i,t} =$ Tingkat kualitas aktiva produktif pada bank i periode t

$\beta_5(\text{PROFIT})_{i,t} =$ Tingkat return on asset ratio pada bank i periode t

$\beta_6(\text{BOPO})_{i,t} =$ Tingkat rasio beban operasional pada pendapatan operasional pada bank i periode t

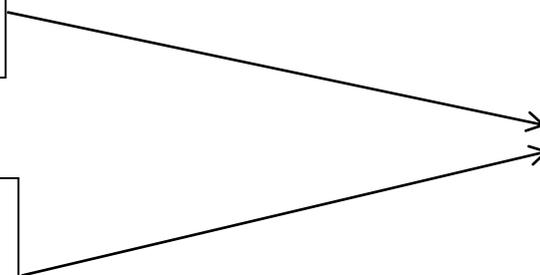
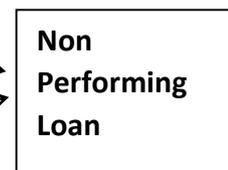
2.4 Kerangka berpikir

Sesuai dengan teori dan penelitian penelitian terdahulu dengan disesuaikan oleh kondisi yang ada di Indonesia maka variable-variabel yang mempengaruhi terjadinya NPL dapat digambarkan dengan pengembangan model sebagai berikut:

Faktor makroekonomi



Faktor spesifik bank



Gambar 2.1

Kerangka berpikir penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data-data yang terukur. Dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi variabel, definisi operasional dan teknik analisis.

3.2 Identifikasi variabel

Berdasarkan metode analisis penelitian dan hipotesis penelitian maka dapat diketahui variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen : faktor makroekonomi (tingkat *Gross Domestic Product* dan Kurs) dan faktor spesifik bank (pertumbuhan kredit, kualitas kredit, profitabilitas dan efisiensi operasional bank)
2. Variabel dependen : *non-performing loan*

3.3 Definisi Operasional

Untuk memberi penjelasan mengenai gambaran variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi negara adalah mengukur *Gross domestic product* (GDP). Data *GDP* menggunakan data

laju pertumbuhan GDP menurut harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan merupakan data yang bersifat tahunan.

2. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Data kurs menggunakan rata rata kurs tengah terhadap US dollar tiap tahun. Tingkat kurs diperoleh menggunakan persamaan (2.2)
3. Pertumbuhan kredit dinilai dari total pinjaman dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh bank, rasio ini dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.3)
4. Kualitas aktiva produktif dinilai dari besarnya aktiva produktif yang diklasifikasikan atau dalam kategori (kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total aktiva produktif, rasio ini dapat diukur dengan rumus persamaan (2.4)
5. Profitabilitas bank dinilai menggunakan rasio profitabilitas *return on asset (ROA)* yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.5)
6. Inefisiensi operasional bank dinilai menggunakan rasio BOPO yang dapat diukur menggunakan rumus persamaan (2.6)
7. *Non-performing loan*, adalah kredit yang pembayaran kembali pinjaman pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang memiliki risiko atau bahkan kemungkinan untuk rugi. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus persamaan (2.1)

3.4 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia berupa laporan keuangan perbankan yang terdapat dalam Laporan publikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan ojk.go.id dan data makroekonomi yang diperoleh melalui sumber website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia bps.go.id dan website resmi Bank Indonesia bi.go.id. Periode penelitian adalah tahun 2006 – 2016

3.5 Prosedur penentuan sampel

Sampel penelitian yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu, yang terdiri dari:

1. Bank yang diteliti adalah seluruh bank pembangunan daerah yang terdapat dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2006 – 2016.
2. Bank pembangunan daerah yang melaporkan laporannya pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2006-2016

3.6 Prosedur pengumpulan data

Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini serta penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik penelitian ini. Studi ini dilakukan

untuk memahami permasalahan dan mengetahui hasil penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebelumnya.

2. Survey lapangan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber dan diambil melalui berbagai webstie resmi yang menyangkut data yang diperlukan dalam penelitian.

3.7 Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Mengumpulkan variabel-variabel dalam penelitian untuk masing-masing bank pembangunan daerah selama periode tahun yang telah ditentukan yaitu tahun 2006-2016
2. Melakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah uji regresi berganda layak untuk dilakukan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain :

- a. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independennya.

Deteksi bebas adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan dua cara yaitu :

1. Besaran VIF (Variance Inflation Faktor) disekitar angka 1 dan angka Tolerance mendekati 1, dengan catatan bahwa angka Tolerance = $1 / \text{VIF}$ atau bisa juga $\text{VIF} = 1 / \text{Tolerance}$
 2. Besaran koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas
- b. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada prinsipnya menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Santoso, 2004). Selanjutnya dengan menggunakan Scatterplot Diagram, dapat dilakukan deteksi untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas
 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas
- c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004). Untuk mendeteksi uji asumsi ini, dapat dilihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik Normal P-P Plof. Dasar pengambilan keputusannya adalah antara lain :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka bisa dikatakan terdapat problem autokorelasi. Deteksi untuk autokorelasi dengan cara :

1. Angka Durbin Watson dibawah -2 = tidak ada autokorelasi
 2. Angka Durbin Watson antara -2 sampai $+2$ = tidak ada autokorelasi
 3. Angka Durbin Watson diatas $+2$ = ada autokorelasi negatif
3. Melakukan analisis regresi kepada masing-masing variabel yang ditunjukkan pada persamaan (2.6) menggunakan aplikasi SPSS

4. Melakukan uji hipotesis menggunakan koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang dikehendaki adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_1 = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_1 : \beta_1 \neq 0$. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tahap pengujian uji t adalah sebagai berikut :

1. Menentukan formula *null hypothesis* statistik yang akan diuji dalam bentuk :

$H_{01} : \beta_1 \geq 0$; artinya tingkat GDP tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{11} : \beta_1 < 0$; artinya tingkat GDP berpengaruh negatif terhadap NPL

$H_{02} : \beta_1 \leq 0$; artinya kurs nilai tukar tidak berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{12} : \beta_1 > 0$; artinya kurs nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPL

$H_{03} : \beta_1 \leq 0$; artinya pertumbuhan kredit tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₃: $\beta_1 > 0$; artinya pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL

H0₄: $\beta_1 \leq 0$; artinya kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₄ : $\beta_1 > 0$; artinya kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap NPL

H0₅ : $\beta_1 \geq 0$; artinya profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap NPL

H1₅ : $\beta_1 < 0$; artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap NPL

H0₆ : $\beta_1 \leq 0$; artinya inefisiensi manajemen bank tidak berpengaruh positif terhadap NPL

H1₆ : $\beta_1 > 0$; artinya inefisiensi manajemen bank berpengaruh positif terhadap NPL .

2. Merumuskan besar tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 5%, maka H₀ diterima. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 5% maka H₀ ditolak.
3. Menentukan koefisien determinan (R^2) yang menggambarkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin besar (mendekati 1) maka semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua bank pembangunan daerah (BPD) yang tercatat dalam Direktori Perbankan Indonesia tahun 2006-2016. Jumlah observasi dalam penelitian ini dalam jangka waktu 2006-2016 sebanyak 264. Data observasi lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian, akan dijabarkan hasil analisis data berdasarkan pengamatan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian dengan model analisis regresi linier berganda yang meliputi, jumlah observasi (N), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel *non-performing loan* dalam penelitian ini merupakan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas aktiva produktif (KAP), tingkat profitabilitas (PROFIT), tingkat efektifitas operasional (BOPO), tingkat pertumbuhan kredit (LDR), tingkat GDP (GDP), nilai tukar (KURS). Deskripsi statistik variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09 %	15,03 %	2,51 %	2,14470
GDP	264	4,63 %	6,49 %	5,64 %	,64307
KURS	264	9,08	9,51	9,25	,15150
LDR	264	36,50 %	241,54 %	95,84 %	28,62980
KAP	264	,06 %	10,99 %	1,76 %	1,54908
PROFIT	264	,01 %	13,86 %	4,15 %	2,02094
BOPO	264	54,45 %	180,09 %	91,05 %	33,14668

Sumber :Data Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai *NPL* terendah dalam sampel sebesar 0.09% hal ini mengindikasikan bahwa BPD telah mampu mengelola penyaluran dana dalam bentuk kredit secara baik dan selektif sehingga kredit bermasalah dapat diminimalisir. Nilai *NPL* tertinggi sebesar 15,03% mengindikasikan bahwa terdapat BPD yang dikategorikan tidak sehat dalam penyaluran kredit akibat dari tingginya nilai kredit macet yang dimiliki oleh BPD. Rata rata *NPL* BPD sebesar 2,51% yang berarti rata rata BPD telah mampu mengelola kredit secara baik karena rasio *NPL* berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Nilai GDP terendah sebesar 4,63% yang berarti menurunnya kinerja ekonomi Indonesia seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Nilai GDP tertinggi sebesar 6,49% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan didorong oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri. Rata-rata GDP

sebesar 5,64% yang mengindikasikan bahwa rata rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong rendah.

Nilai tukar mata uang terendah sebesar 9,08 tertinggi sebesar 9,51 dan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar 9,25. Semakin tinggi nilai tukar, maka rupiah sedang mengalami depresiasi nilai, hal itu dapat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengurangi kegiatan konsumsinya yang pada akhirnya ekonomi negara menjadi lesu. Kemampuan sektor usaha untuk mendapatkan hasil usaha menurun yang diikuti dengan menurunnya kemampuan sektor usaha untuk membayar hutang kembali .

Nilai LDR terendah sebesar 36,50% hal ini menunjukkan kemampuan BPD dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dalam kondisi baik. Nilai tertinggi LDR sebesar 241,54% , yang menunjukkan jumlah kredit yang diberikan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah deposito yang disimpan di BPD. Rata rata LDR BPD adalah 95,84 % yang mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola likuiditasnya dengan baik .

Nilai KAP terendah sebesar 0,06%, tertinggi adalah 10,99% . Tingginya rasio ini menggambarkan lemahnya kemampuan BPD dalam mengelola komposisi kreditnya sehingga tingkat kualitas kredit yang diklasifikasikan (kurang lancar, diragukan dan macet) tinggi. Rata rata komposisi kualitas kredit sebesar 1,76% hal ini mengindikasikan rata rata BPD telah mampu mengelola kualitas kredit mereka dengan baik.

Nilai profitabilitas terendah sebesar 0,01% dan tertinggi sebesar 13,86% semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besarnya tingkat profitabilitas bank, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk mendapat keuntungan. Rata-rata profitabilitas BPD sebesar 4,11% .

Nilai BOPO terendah sebesar 54,45% menunjukkan bahwa bank memiliki pendapatan melalui kegiatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban operasionalnya. Nilai BOPO tertinggi yaitu sebesar 180,09%, yang berarti bank menanggung beban operasional yang sangat tinggi. Rata-rata BOPO sebesar 91,05%.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas, sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Identifikasi statistik yang dapat dilakukan untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan menghitung *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*. Pada model regresi, apabila nilai *tolerance value* kurang dari 0,10 dan *VIF* lebih dari 10 dapat dikatakan bahwa telah terjadi multikolinieritas. Berdasarkan lampiran 4, menunjukkan bahwa nilai *tolerance value* lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti bergelombang atau meleber kemudian menyempit, maka terjadi Heterokedastisitas. Jika data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 6, titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil output statistik pada lampiran 5, diperoleh hasil perhitungan *Durbin-Watson (D-W)* sebesar 1,441. Nilai tersebut berada diantara nilai $-2 < dw < +2$. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal

atau mendekati normal ketika data menyebar disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dari grafik Normal P-P Plot. Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 3, model penelitian memenuhi uji normalitas.

4.4 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Analisa dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda yang dilakukan untuk melihat pengaruh faktor makroekonomi yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan GDP dan Kurs, serta faktor spesifik bank yang diukur dengan LDR, KAP, PROFIT, dan BOPO. Data diolah menggunakan program *IBM Statistic version 23*, dan hasil analisis regresi dijabarkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
 Hasil analisis determinan NPL pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	Sig. t
	B	Std. Error	Beta	
Konstanta	3,871	3,183		0,225
GDP	-0,116	0,067	-0,035	0,086
KURS	-0,306	0,311	-0,022	0,326
LDR	-0,017	0,001	-0,227	0,000*
KAP	1,344	0,018	0,971	0,000*
PROFIT	0,020	0,018	0,018	0,273
BOPO	0,014	0,001	0,222	0,000*
R Square	0,960			

Keterangan : *Signifikan jika sig.t < 0,05

Sumber : Data hasil output spss

Berdasarkan penjabaran pada tabel 4.2, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel KAP, PROFIT, KURS dan BOPO memiliki pengaruh yang positif terhadap NPL, artinya semakin tinggi nilai KAP, PROFIT, KURS dan BOPO maka semakin meningkat pula NPL dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel KAP dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 ; sedangkan variabel PROFIT dan KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL karena memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Variabel LDR dan GDP memiliki pengaruh negatif terhadap NPL artinya semakin tinggi nilai LDR, dan GDP maka akan menurunkan nilai NPL. Variabel GDP dan tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan sedangkan variabel LDR memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikan kurang dari 0,05.

Nilai R Square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R square pada hasil analisis ini adalah 0,961, artinya 96% variabel NPL dapat dijelaskan oleh variabel GDP , KURS, LDR, KAP, PROFIT, BOPO dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dijabarkan pada tabel 4.2 , variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional yang mengalami peningkatan akan berdampak menurunkan risiko kredit perbankan yang diukur menggunakan NPL. Pertumbuhan GDP akan meningkatkan aktivitas ekonomi , pendapatan masyarakat mengalami peningkatan , penjualan oleh perusahaan juga akan

mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kredit di bank sehingga menurunkan rasio NPL. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimitrios *et. al.* (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, hal ini disebabkan oleh data GDP yang sedikit dan tidak berfluktuasi menyebabkan GDP kurang berpengaruh signifikan.

Variabel KURS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan NPL pada Bank Pembangunan Daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Soebagio (2005) yang menyatakan perubahan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat NPL pada perbankan terutama bagi debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dikarenakan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat hingga melampaui batas kemampuan debitur untuk memikulnya. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur.

Variabel LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Rasio LDR menunjukkan preferensi risiko yang dimiliki bank dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rivai, 2013). LDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sesuai dengan hasil penelitian Soebagio (2005) mengutip analisis Kadarusman *et. al.* (2004), terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.

Variabel KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Sebagaimana dikutip oleh Ghosh (2015) penelitian Keeton & Morris (1987) Komposisi kualitas kredit memiliki peran penting sebagai indikator gambaran risiko bank. Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan NPL bank. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik komposisi atau kualitas dari portofolio kredit yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio KAP, maka semakin mengurangi terjadinya NPL.

Variabel PROFIT memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi NPL pada BPD. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian (Ghosh,2015) dan (Dimitrios; *et. al.* 2016) yang menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL bank, namun sesuai dengan model dari (Rajan, 1994) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap NPL ketika penentuan kebijakan kredit bank tidak

berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba. Manajemen bank dapat meningkatkan profitabilitas masa kini dengan mengorbankan kualitas kredit dimasa mendatang dengan cara memperpanjang waktu kredit sehingga debitur yang menunggak pada periode yang seharusnya memasuki kategori diklasifikasikan tidak masuk dalam perhitungan, memberi kredit baru pada debitur yang tidak mampu membayar sehingga mereka seakan akan mampu membayar kredit mereka secara lancar (Rajan, 1994).

Variabel BOPO memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. (Rivai, 2013). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya NPL dapat dihindarkan. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai BOPO, semakin rendah pula NPL yang dimiliki BPD.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 264 observasi penelitian pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada tahun 2006 – 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Gros domestic product* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *NPL*, karena peningkatan sektor ekonomi pada suatu negara akan meningkatkan kemampuan debitur dalam melunasi pembayaran kredit pada bank sehingga dapat menurunkan *NPL*
2. Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *NPL*. Faktor penyebab yang memiliki probabilitas paling memungkinkan untuk menjadi alasan terhadap hasil ini adalah aktifitas penyaluran kredit oleh BPD sebagian besar merupakan kredit dengan mata uang rupiah, sehingga perubahan nilai mata uang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bayar debitur..
3. Variabel kualitas aktiva produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPL* Bank dengan kualitas kredit yang buruk cenderung memiliki portofolio kredit yang berisiko tinggi sehingga hal tersebut berakibat meningkatkan *NPL* bank.
4. Variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi *NPL* pada BPD sehingga terdapat indikasi

pengambilan keputusan oleh manajemen dalam penentuan kebijakan kredit bank tidak berfokus pada memaksimalkan aktiva produktif untuk meningkatkan laba , melainkan berfokus pada mempertahankan reputasi manajemen dengan membentuk persepsi para pemangku kepentingan dan pasar mengenai kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi kredit dan meningkatkan laba

5. Variabel pertumbuhan kredit yang tinggi menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga risiko terjadinya NPL pun semakin tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, terdapat indikasi bahwa meningkatnya nilai LDR pada BPD tidak disebabkan oleh pertumbuhan total kredit melainkan oleh melambatnya penghimpunan simpanan dana pihak ketiga oleh bank yang disebabkan oleh menurunnya bunga bank.
6. Variabel inefisiensi operasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL karena semakin kecil BOPO menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya terutama dalam penilaian risiko kredit . Manajemen semakin cakap dan tepat dalam menentukan bunga yang diberikan kepada debitur sesuai dengan risiko yang dimilikinya, sehingga bunga tidak melampaui batas kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya berdampak pada penurunan NPL.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pada bank khususnya BPD yang tentu memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai.
2. Manajemen BPD harus lebih baik dalam menentukan kebijakan kredit bank dan aspek ke hati-hatian dalam penyaluran kredit kepada calon debitur selalu dikedepankan sehingga kredit macet dapat dihindarkan.
3. Bagi BPD harus lebih meningkatkan kemampuan manajemen jika ingin merubah prioritas aktivitas kredit pada sektor produktif yang tentu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor konsumtif, sehingga risiko gagal bayar oleh debitur dapat dihindarkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto agar lebih spesifik dalam mengukur kondisi perekonomian daerah sebagai faktor *non-performing loan* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., T., 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, M., 2004. Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Gramedia
- Berg, T., Koziol, P., 2015. An analysis of the consistency of banks' internal ratings
- Darmawan., 2004. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan. Keputusan Jangka Panjang, Edisi III, Cetakan I. Yogyakarta :Liberty
- Dimitros. A.O., Helen. L., Mike. T., 2016. Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries
- Firdaus dan Ariyanti. 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Cetakan Kelima, Bandung : Alfabeta
- Ghosh, A., 2015. Banking-industry spesific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states
- Hendro, R., 2014. Bank dan Institusi keuangan non-bank di Indonesia, Jakarta : UPP STIM YKPN
- Keeton, W., 1999. Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses? Federal Reserve Bank of Kansas City Econ Rev., Second Quarter., pp. 57–75.
- Keeton, W., Morris, C., 1987. Why do banks' loan losses differ ? Federal Reserve Bank of Kansas City. Econ. Rev.,3-21
- Latumaerissa., 1996. Esensi-Esensi Perbankan Internasional Cetakan Pertama., Jakarta : Bumi Aksara
- Mohamad, K., 2017. “Omong Besar Pertumbuhan Kredit”, Majalah InfoBank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta
- Rajan, R., 1994. Why bank policies fluctuate: a theory and some evidence. Q. J. Econ. 109, 399-411
- Rivai., B., Sudarto., veithzal., 2013. Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Santoso, S., 2004. Buku Latihan : SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Siamat, D.,1995. Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta
- Soebagio, H., 2005. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank mum Komersial, Universitas Diponegoro , Semarang
- Sudremi, Y., 2007. Pengetahuan Sosial Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta
- Wirjosukarto, D., 2017. “Menilai Jeroan Bank Dengan Empat Pendekatan”, Majalah Infobank, No.466 , Juli 2017, Vol.XXXIX, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Perhitungan Seluruh Variabel Penelitian Periode 2006-2016

No	Nama	Tahun	NPL	KAP	ROA	BOPO	LDR	GDP	KURS
1	BPD Jatim	2006	1,04	0,44	8,21	143,26	83,88	5,50	9,123
2	BPD Jatim	2007	1,12	0,47	7,62	137,63	80,86	6,35	9,120
3	BPD Jatim	2008	1,41	0,66	7,49	135,62	96,15	6,01	9,178
4	BPD Jatim	2009	1,05	0,76	3,75	66,04	69,67	4,63	9,249
5	BPD Jatim	2010	0,65	0,51	5,57	59,38	80,70	6,22	9,114
6	BPD Jatim	2011	0,97	0,77	4,97	60,02	80,11	6,49	9,080
7	BPD Jatim	2012	2,95	2,21	3,34	68,89	83,55	6,26	9,147
8	BPD Jatim	2013	3,44	2,95	3,82	70,28	84,98	5,73	9,255
9	BPD Jatim	2014	3,31	2,64	3,52	69,63	86,54	5,06	9,382
10	BPD Jatim	2015	4,29	3,59	2,67	76,11	82,92	4,88	9,507
11	BPD Jatim	2016	4,77	3,70	2,98	72,22	90,48	5,03	9,508
12	BPD Jabar	2006	0,86	0,61	6,48	152,58	163,00	5,50	9,123
13	BPD Jabar	2007	1,11	0,73	7,52	159,58	154,69	6,35	9,120
14	BPD Jabar	2008	1,48	0,99	5,80	154,15	168,46	6,01	9,178
15	BPD Jabar	2009	1,97	1,25	3,24	77,30	82,47	4,63	9,249
16	BPD Jabar	2010	1,86	1,11	3,15	76,60	71,14	6,22	9,114
17	BPD Jabar	2011	1,21	0,73	2,65	80,02	72,95	6,49	9,080
18	BPD Jabar	2012	2,07	1,27	2,46	80,02	74,09	6,26	9,147
19	BPD Jabar	2013	2,83	2,21	2,61	79,41	96,47	5,73	9,255
20	BPD Jabar	2014	4,15	3,35	1,94	85,94	93,18	5,06	9,382
21	BPD Jabar	2015	2,91	2,22	2,04	83,31	88,13	4,88	9,507
22	BPD Jabar	2016	1,69	1,26	2,22	82,70	86,70	5,03	9,508
23	BPD Jateng	2006	1,13	0,72	8,43	142,14	127,54	5,50	9,123
24	BPD Jateng	2007	1,00	0,66	3,04	145,71	136,07	6,35	9,120
25	BPD Jateng	2008	0,65	0,56	8,35	148,18	178,21	6,01	9,178
26	BPD Jateng	2009	0,26	0,27	4,04	71,33	89,18	4,63	9,249
27	BPD Jateng	2010	0,53	0,41	2,83	79,61	74,13	6,22	9,114
28	BPD Jateng	2011	1,04	0,72	2,67	79,11	70,17	6,49	9,080
29	BPD Jateng	2012	0,80	0,67	2,73	76,35	82,26	6,26	9,147
30	BPD Jateng	2013	0,72	0,59	3,01	72,88	86,96	5,73	9,255
31	BPD Jateng	2014	0,93	0,79	2,84	75,67	88,57	5,06	9,382
32	BPD Jateng	2015	1,26	1,09	2,60	76,05	90,54	4,88	9,507

33	BPD Jateng	2016	1,45	1,26	2,60	76,18	95,05	5,03	9,508
34	BPD DKI	2009	5,76	2,76	1,41	88,46	57,25	4,63	9,249
35	BPD DKI	2010	3,73	1,89	2,24	83,02	70,48	6,22	9,114
36	BPD DKI	2011	3,12	2,22	2,32	79,74	73,03	6,49	9,080
37	BPD DKI	2012	3,20	2,19	1,87	81,43	73,50	6,26	9,147
38	BPD DKI	2013	2,38	1,77	3,15	74,99	92,50	5,73	9,255
39	BPD DKI	2014	4,38	3,08	2,10	80,26	92,57	5,06	9,382
40	BPD DKI	2015	7,96	5,23	0,89	90,99	91,14	4,88	9,507
41	BPD DKI	2016	5,35	4,14	2,29	77,82	87,41	5,03	9,508
42	BPD DIY	2006	2,50	1,46	6,99	148,68	121,10	5,50	9,123
43	BPD DIY	2007	2,65	1,47	5,85	154,96	104,12	6,35	9,120
44	BPD DIY	2008	2,50	1,58	5,78	154,78	129,06	6,01	9,178
45	BPD DIY	2009	1,36	0,82	3,23	75,15	79,33	4,63	9,249
46	BPD DIY	2010	1,39	0,97	2,79	73,53	70,24	6,22	9,114
47	BPD DIY	2011	1,19	0,91	2,69	74,96	78,71	6,49	9,080
48	BPD DIY	2012	0,84	0,69	2,56	74,85	71,89	6,26	9,147
49	BPD DIY	2013	0,90	0,67	2,71	72,75	73,67	5,73	9,255
50	BPD DIY	2014	1,23	0,94	2,88	72,64	80,34	5,06	9,382
51	BPD DIY	2015	1,05	0,78	2,94	71,89	80,99	4,88	9,507
52	BPD DIY	2016	3,40	2,33	3,05	70,15	80,84	5,03	9,508
53	BPD Aceh	2006	2,30	0,55	5,12	147,52	44,10	5,50	9,123
54	BPD Aceh	2007	1,63	0,43	6,13	138,74	50,42	6,35	9,120
55	BPD Aceh	2008	1,98	0,67	6,16	139,25	69,59	6,01	9,178
56	BPD Aceh	2009	1,69	0,83	3,06	71,39	61,79	4,63	9,249
57	BPD Aceh	2010	7,02	5,17	1,80	92,98	81,74	6,22	9,114
58	BPD Aceh	2011	3,69	2,90	2,91	77,36	91,42	6,49	9,080
59	BPD Aceh	2012	3,30	2,64	3,66	71,51	89,89	6,26	9,147
60	BPD Aceh	2013	2,78	2,15	3,44	70,72	86,80	5,73	9,255
61	BPD Aceh	2014	2,58	1,98	3,13	74,11	92,38	5,06	9,382
62	BPD Aceh	2015	2,30	1,64	2,48	76,07	84,05	4,88	9,507
63	BPD Aceh	2016	1,39	0,93	2,83	83,05	84,59	5,03	9,508
64	BPD Sumut	2006	6,94	3,79	6,98	158,21	100,47	5,50	9,123
65	BPD Sumut	2007	4,63	2,58	6,82	154,92	99,94	6,35	9,120
66	BPD Sumut	2009	2,47	2,19	4,42	69,86	97,87	4,63	9,249
67	BPD Sumut	2010	3,02	2,72	4,55	68,65	91,04	6,22	9,114
68	BPD Sumut	2011	2,56	1,93	3,26	75,99	78,56	6,49	9,080
69	BPD Sumut	2012	2,81	2,47	2,99	77,76	101,90	6,26	9,147
70	BPD Sumut	2013	3,83	3,47	3,37	74,22	107,31	5,73	9,255
71	BPD Sumut	2014	5,47	4,73	2,60	80,30	95,89	5,06	9,382

72	BPD Sumut	2015	5,00	4,28	2,31	82,16	94,08	4,88	9,507
73	BPD Sumut	2016	4,70	4,03	2,74	79,54	93,89	5,03	9,508
74	BPD Sumsel	2006	5,80	2,86	2,85	175,75	79,96	5,50	9,123
75	BPD Sumsel	2007	4,75	1,68	2,86	171,44	79,21	6,35	9,120
76	BPD Sumsel	2008	4,28	1,49	3,52	165,53	97,72	6,01	9,178
77	BPD Sumsel	2009	2,42	1,75	2,51	78,09	79,03	4,63	9,249
78	BPD Sumsel	2010	1,33	1,17	2,71	80,81	71,17	6,22	9,114
79	BPD Sumsel	2011	1,46	1,27	2,56	80,64	75,19	6,49	9,080
80	BPD Sumsel	2012	6,82	5,25	1,90	82,28	75,98	6,26	9,147
81	BPD Sumsel	2014	7,10	5,86	2,13	81,54	85,97	5,06	9,382
82	BPD Sumsel	2015	6,17	3,75	2,18	81,44	95,43	4,88	9,507
83	BPD Riau	2007	3,04	0,75	6,21	135,48	47,11	6,35	9,120
84	BPD Riau	2008	2,86	0,97	5,38	141,23	73,24	6,01	9,178
85	BPD Riau	2009	1,38	0,91	2,68	73,83	88,24	4,63	9,249
86	BPD Riau	2010	2,45	1,63	3,98	68,93	75,42	6,22	9,114
87	BPD Riau	2011	2,57	1,79	2,62	75,15	65,74	6,49	9,080
88	BPD Riau	2012	2,95	1,85	2,95	75,07	66,49	6,26	9,147
89	BPD Riau	2013	2,81	1,92	3,00	69,12	87,60	5,73	9,255
90	BPD Riau	2014	2,79	1,80	3,37	70,59	77,72	5,06	9,382
91	BPD Riau	2015	4,12	3,56	1,69	83,86	112,61	4,88	9,507
92	BPD Riau	2016	4,16	3,39	2,75	75,44	125,19	5,03	9,508
93	BPD Sumbar	2006	8,08	5,90	7,38	149,16	165,14	5,50	9,123
94	BPD Sumbar	2007	7,70	5,34	5,94	154,61	144,98	6,35	9,120
95	BPD Sumbar	2008	7,66	5,91	6,00	153,07	168,71	6,01	9,178
96	BPD Sumbar	2009	3,30	2,59	2,71	79,85	87,72	4,63	9,249
97	BPD Sumbar	2010	3,31	2,47	3,51	76,34	84,41	6,22	9,114
98	BPD Sumbar	2011	2,76	2,23	2,68	78,82	91,69	6,49	9,080
99	BPD Sumbar	2012	2,69	2,31	2,65	77,62	100,35	6,26	9,147
100	BPD Sumbar	2013	2,29	1,91	2,64	78,27	99,13	5,73	9,255
101	BPD Sumbar	2014	2,52	2,06	1,94	84,51	98,34	5,06	9,382
102	BPD Sumbar	2015	2,74	2,24	2,28	81,75	99,24	4,88	9,507
103	BPD Sumbar	2016	3,07	2,48	2,19	81,75	98,02	5,03	9,508
104	BPD Jambi	2006	2,01	1,01	8,13	133,08	91,03	5,50	9,123
105	BPD Jambi	2007	1,32	0,76	6,88	144,84	97,75	6,35	9,120
106	BPD Jambi	2008	0,89	0,68	8,31	133,71	149,49	6,01	9,178
107	BPD Jambi	2009	0,56	0,46	5,16	62,94	97,64	4,63	9,249
108	BPD Jambi	2010	0,40	0,33	5,21	57,55	84,09	6,22	9,114
109	BPD Jambi	2011	0,36	0,24	3,28	61,16	66,55	6,49	9,080
110	BPD Jambi	2012	0,33	0,24	3,58	63,32	82,29	6,26	9,147

111	BPD Jambi	2013	0,41	0,35	4,14	62,07	110,13	5,73	9,255
112	BPD Jambi	2014	0,48	0,35	3,14	71,45	100,83	5,06	9,382
113	BPD Jambi	2015	1,10	0,77	2,43	77,26	106,00	4,88	9,507
114	BPD Jambi	2016	0,40	0,26	2,92	71,89	103,09	5,03	9,508
115	BPD Bengkulu	2006	4,24	3,69	6,54	147,24	122,97	5,50	9,123
116	BPD Bengkulu	2007	3,57	3,00	5,32	151,21	122,31	6,35	9,120
117	BPD Bengkulu	2008	2,47	2,02	6,39	146,90	167,39	6,01	9,178
118	BPD Bengkulu	2009	1,52	1,13	3,14	75,16	129,59	4,63	9,249
119	BPD Bengkulu	2010	1,66	1,51	4,60	70,24	89,20	6,22	9,114
120	BPD Bengkulu	2011	0,67	0,64	3,17	78,12	75,14	6,49	9,080
121	BPD Bengkulu	2012	0,22	0,18	3,41	73,27	93,27	6,26	9,147
122	BPD Bengkulu	2013	0,38	0,32	4,01	68,99	105,04	5,73	9,255
123	BPD Bengkulu	2014	0,39	0,29	3,70	72,41	86,06	5,06	9,382
124	BPD Bengkulu	2015	0,39	0,31	2,88	77,06	91,38	4,88	9,507
125	BPD Bengkulu	2016	0,33	0,24	2,78	77,72	93,95	5,03	9,508
126	BPD Lampung	2006	2,36	1,71	5,83	159,10	129,93	5,50	9,123
127	BPD Lampung	2007	2,32	1,97	5,26	159,06	174,04	6,35	9,120
128	BPD Lampung	2009	1,47	1,18	3,26	76,32	99,36	4,63	9,249
129	BPD Lampung	2010	1,20	0,68	5,18	66,13	89,46	6,22	9,114
130	BPD Lampung	2011	0,87	0,46	3,13	73,69	80,23	6,49	9,080
131	BPD Lampung	2012	0,74	0,40	2,80	75,05	91,73	6,26	9,147
132	BPD Lampung	2013	0,76	0,60	1,89	80,86	110,56	5,73	9,255
133	BPD Lampung	2014	1,06	0,86	3,89	112,96	112,96	5,06	9,382
134	BPD Lampung	2015	1,12	0,74	3,25	68,73	87,66	4,88	9,507
135	BPD Lampung	2016	1,25	0,92	2,85	74,08	101,06	5,03	9,508
136	BPD Kalbar	2006	1,46	0,63	6,87	160,67	89,42	5,50	9,123
137	BPD Kalbar	2007	0,78	0,32	3,88	169,26	85,34	6,35	9,120
138	BPD Kalbar	2008	0,34	0,17	4,69	164,62	114,64	6,01	9,178
139	BPD Kalbar	2009	0,09	0,06	3,80	81,35	87,76	4,63	9,249
140	BPD Kalbar	2010	0,13	0,06	4,17	70,23	84,34	6,22	9,114
141	BPD Kalbar	2011	0,15	0,11	3,45	76,97	77,51	6,49	9,080
142	BPD Kalbar	2012	0,17	0,13	3,33	71,33	86,80	6,26	9,147
143	BPD Kalbar	2013	0,35	0,29	3,42	70,12	87,20	5,73	9,255
144	BPD Kalbar	2014	0,48	0,42	3,19	71,77	87,09	5,06	9,382
145	BPD Kalbar	2015	0,56	0,46	2,91	73,20	82,70	4,88	9,507
146	BPD Kalbar	2016	0,70	0,57	2,88	72,80	86,69	5,03	9,508
147	BPD Kalsel	2006	5,76	3,02	5,97	149,65	68,45	5,50	9,123
148	BPD Kalsel	2007	5,07	2,02	5,82	146,89	65,42	6,35	9,120
149	BPD Kalsel	2008	3,48	1,58	5,67	152,55	89,58	6,01	9,178

150	BPD Kalsel	2009	1,21	0,80	3,77	65,87	67,96	4,63	9,249
151	BPD Kalsel	2010	1,12	0,75	4,68	68,74	77,32	6,22	9,114
152	BPD Kalsel	2011	0,96	0,62	2,81	74,68	63,30	6,49	9,080
153	BPD Kalsel	2012	1,83	0,62	1,27	79,40	55,77	6,26	9,147
154	BPD Kalsel	2013	1,80	1,52	2,33	76,00	85,38	5,73	9,255
155	BPD Kalsel	2014	3,86	2,83	2,68	75,15	91,44	5,06	9,382
156	BPD Kalsel	2015	4,33	3,32	2,20	79,62	100,55	4,88	9,507
157	BPD Kalsel	2016	4,23	3,69	2,60	79,91	106,53	5,03	9,508
158	BPD Kaltim	2006	2,88	0,55	6,88	132,46	40,84	5,50	9,123
159	BPD Kaltim	2007	3,24	0,65	6,63	133,31	41,95	6,35	9,120
160	BPD Kaltim	2008	3,55	0,93	7,89	120,16	57,73	6,01	9,178
161	BPD Kaltim	2009	1,37	0,93	3,81	63,69	69,11	4,63	9,249
162	BPD Kaltim	2010	3,30	2,36	5,23	55,29	81,69	6,22	9,114
163	BPD Kaltim	2011	2,90	2,24	3,70	63,86	59,95	6,49	9,080
164	BPD Kaltim	2012	7,45	4,93	2,50	68,19	56,78	6,26	9,147
165	BPD Kaltim	2013	6,74	4,56	2,78	71,30	90,77	5,73	9,255
166	BPD Kaltim	2014	10,36	6,54	2,60	80,39	78,54	5,06	9,382
167	BPD Kaltim	2015	10,35	7,23	1,56	85,30	103,54	4,88	9,507
168	BPD Kaltim	2016	8,46	7,08	2,99	78,97	101,17	5,03	9,508
169	BPD Kalteng	2009	1,82	1,05	2,34	68,47	85,13	4,63	9,249
170	BPD Kalteng	2010	1,12	0,97	3,89	64,24	88,72	6,22	9,114
171	BPD Kalteng	2011	0,81	0,72	3,88	63,31	68,74	6,49	9,080
172	BPD Kalteng	2012	0,84	0,77	3,41	69,93	71,88	6,26	9,147
173	BPD Kalteng	2013	0,81	0,67	3,52	64,63	77,45	5,73	9,255
174	BPD Kalteng	2014	0,82	0,70	4,09	61,07	79,82	5,06	9,382
175	BPD Kalteng	2015	0,47	0,47	4,34	59,52	106,34	4,88	9,507
176	BPD Kalteng	2016	0,41	0,39	4,24	64,04	99,63	5,03	9,508
177	BPD Sulsel	2006	4,27	2,28	10,45	115,15	134,10	5,50	9,123
178	BPD Sulsel	2007	3,11	3,37	11,24	116,67	144,02	6,35	9,120
179	BPD Sulsel	2009	2,40	1,90	5,56	57,09	114,79	4,63	9,249
180	BPD Sulsel	2010	2,02	1,68	5,58	65,81	109,98	6,22	9,114
181	BPD Sulsel	2011	2,06	1,75	4,49	70,65	87,37	6,49	9,080
182	BPD Sulsel	2012	2,09	1,55	4,36	63,56	78,73	6,26	9,147
183	BPD Sulsel	2013	1,19	1,05	4,20	68,06	113,69	5,73	9,255
184	BPD Sulsel	2014	0,86	0,75	4,71	65,25	108,63	5,06	9,382
185	BPD Sulsel	2015	0,65	0,58	4,90	63,82	117,17	4,88	9,507
186	BPD Sulsel	2016	0,51	0,47	4,96	60,13	103,00	5,03	9,508
187	BPD Sultra	2007	3,34	3,21	13,86	102,10	110,06	6,35	9,120
188	BPD Sultra	2010	5,75	3,64	6,62	64,75	97,52	6,22	9,114

189	BPD Sultra	2011	2,24	1,31	7,44	54,45	83,68	6,49	9,080
190	BPD Sultra	2012	1,33	0,75	5,10	59,56	92,02	6,26	9,147
191	BPD Sultra	2013	1,64	1,26	4,43	62,60	96,71	5,73	9,255
192	BPD Sultra	2014	2,86	2,35	4,13	71,67	111,84	5,06	9,382
193	BPD Sultra	2015	2,90	2,50	3,41	76,41	94,44	4,88	9,507
194	BPD Sultra	2016	2,30	1,78	3,87	73,42	97,72	5,03	9,508
195	BPD Sulteng	2009	8,81	6,05	4,34	65,13	100,44	4,63	9,249
196	BPD Sulteng	2012	4,49	2,88	1,59	80,60	107,27	6,26	9,147
197	BPD Sulteng	2013	2,92	2,12	3,39	65,87	128,43	5,73	9,255
198	BPD Sulteng	2014	1,40	1,18	3,73	69,27	120,44	5,06	9,382
199	BPD Sulteng	2015	1,71	1,12	3,10	71,60	80,62	4,88	9,507
200	BPD Sulteng	2016	1,36	0,94	2,91	72,82	91,11	5,03	9,508
201	BPD Sulut	2006	2,13	1,04	11,62	147,66	125,93	5,50	9,123
202	BPD Sulut	2007	2,37	1,36	7,61	162,04	133,28	6,35	9,120
203	BPD Sulut	2008	2,94	1,83	5,57	166,82	163,24	6,01	9,178
204	BPD Sulut	2009	0,51	0,37	1,89	89,84	104,98	4,63	9,249
205	BPD Sulut	2010	0,98	0,77	3,04	85,09	100,25	6,22	9,114
206	BPD Sulut	2011	1,26	0,98	2,01	84,96	99,78	6,49	9,080
207	BPD Sulut	2012	0,81	0,72	2,95	77,45	109,62	6,26	9,147
208	BPD Sulut	2013	0,54	0,46	2,16	75,56	112,94	5,73	9,255
209	BPD Sulut	2014	1,29	1,07	3,48	83,76	90,10	5,06	9,382
210	BPD Sulut	2015	0,97	0,86	1,56	87,35	95,09	4,88	9,507
211	BPD Sulut	2016	0,94	0,85	2,00	86,68	103,68	5,03	9,508
212	BPD Bali	2006	2,88	2,20	9,80	134,85	167,53	5,50	9,123
213	BPD Bali	2007	2,82	2,19	9,11	138,57	161,94	6,35	9,120
214	BPD Bali	2008	2,24	1,83	8,65	143,49	170,96	6,01	9,178
215	BPD Bali	2009	0,68	0,66	4,26	66,72	103,75	4,63	9,249
216	BPD Bali	2010	0,57	0,44	3,98	68,96	93,31	6,22	9,114
217	BPD Bali	2011	0,57	0,45	3,54	69,74	82,73	6,49	9,080
218	BPD Bali	2012	0,45	0,34	4,28	62,82	80,60	6,26	9,147
219	BPD Bali	2013	0,33	0,26	3,97	63,03	87,87	5,73	9,255
220	BPD Bali	2014	0,35	0,28	3,92	64,89	96,41	5,06	9,382
221	BPD Bali	2015	1,96	1,59	3,33	69,67	97,32	4,88	9,507
222	BPD Bali	2016	1,47	1,22	3,76	66,51	102,75	5,03	9,508
223	BPD NTT	2006	1,19	1,11	9,43	131,72	140,74	5,50	9,123
224	BPD NTT	2007	1,48	1,31	8,77	133,81	152,58	6,35	9,120
225	BPD NTT	2008	2,08	1,86	8,98	134,41	198,05	6,01	9,178
226	BPD NTT	2009	1,50	1,36	4,05	70,68	122,79	4,63	9,249
227	BPD NTT	2010	2,49	1,84	4,30	72,10	91,77	6,22	9,114

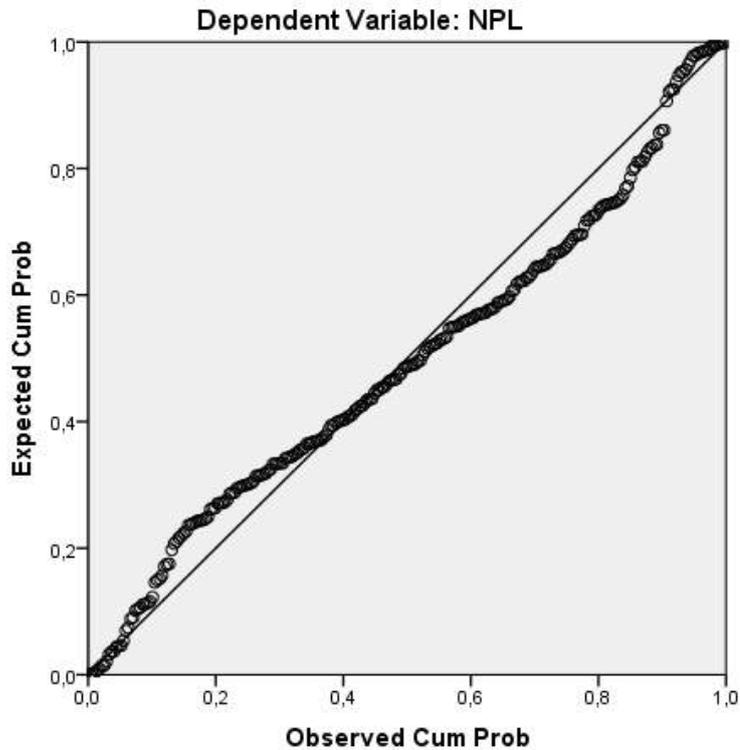
228	BPD NTT	2011	1,20	0,93	4,19	71,04	92,95	6,49	9,080
229	BPD NTT	2012	1,20	0,87	3,65	71,57	93,45	6,26	9,147
230	BPD NTT	2013	1,30	1,00	3,96	67,13	96,36	5,73	9,255
231	BPD NTT	2014	1,52	1,16	3,72	69,24	87,68	5,06	9,382
232	BPD NTT	2015	2,32	1,87	3,44	69,28	90,09	4,88	9,507
233	BPD NTT	2016	2,34	2,11	2,94	75,72	107,39	5,03	9,508
234	BPD NTB	2006	2,84	2,49	6,03	160,28	189,11	5,50	9,123
235	BPD NTB	2007	5,46	4,72	5,22	170,44	200,74	6,35	9,120
236	BPD NTB	2008	7,02	5,83	7,48	161,15	241,54	6,01	9,178
237	BPD NTB	2009	4,07	3,83	4,39	75,02	115,50	4,63	9,249
238	BPD NTB	2010	2,92	2,41	6,27	72,43	102,23	6,22	9,114
239	BPD NTB	2011	2,17	2,01	5,71	68,81	101,45	6,49	9,080
240	BPD NTB	2012	1,98	1,75	5,62	64,32	108,41	6,26	9,147
241	BPD NTB	2013	1,73	1,50	5,10	64,19	105,56	5,73	9,255
242	BPD NTB	2014	1,46	1,14	4,61	66,00	99,78	5,06	9,382
243	BPD NTB	2015	1,31	1,19	4,27	67,19	100,87	4,88	9,507
244	BPD NTB	2016	1,20	1,11	3,95	68,69	97,66	5,03	9,508
245	BPD Maluku	2006	9,68	6,15	2,46	180,09	101,78	5,50	9,123
246	BPD Maluku	2008	7,31	4,08	4,84	162,54	113,17	6,01	9,178
247	BPD Maluku	2009	3,00	2,41	3,78	73,88	94,56	4,63	9,249
248	BPD Maluku	2010	3,62	2,89	3,63	75,30	102,68	6,22	9,114
249	BPD Maluku	2011	2,48	1,60	4,52	70,14	82,44	6,49	9,080
250	BPD Maluku	2012	2,67	1,61	3,25	73,90	78,61	6,26	9,147
251	BPD Maluku	2013	2,46	1,73	3,34	72,78	90,86	5,73	9,255
252	BPD Maluku	2014	2,38	1,97	0,01	99,56	92,26	5,06	9,382
253	BPD Maluku	2015	2,37	1,69	3,56	70,98	85,28	4,88	9,507
254	BPD Maluku	2016	1,95	1,27	3,15	71,84	86,87	5,03	9,508
255	BPD Papua	2006	3,96	0,95	6,22	156,44	52,44	5,50	9,123
256	BPD Papua	2007	3,91	0,78	5,98	147,93	40,69	6,35	9,120
257	BPD Papua	2008	3,38	0,79	6,44	141,31	49,99	6,01	9,178
258	BPD Papua	2009	1,81	0,56	3,23	69,72	36,50	4,63	9,249
259	BPD Papua	2010	0,95	0,33	2,86	70,67	43,88	6,22	9,114
260	BPD Papua	2011	1,09	0,45	3,01	69,44	48,01	6,49	9,080
261	BPD Papua	2012	0,84	0,51	2,81	74,15	71,65	6,26	9,147
262	BPD Papua	2013	1,14	0,78	2,86	72,01	84,48	5,73	9,255
263	BPD Papua	2014	7,33	5,13	1,02	91,38	80,12	5,06	9,382
264	BPD Papua	2016	15,03	10,99	1,28	91,14	85,76	5,03	9,508

Lampiran 2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	264	,09	15,03	2,5094	2,14470
GDP	264	4,63	6,49	5,6372	,64307
LnKURS	264	9,08	9,51	9,2469	,15150
LDR	264	36,50	241,54	95,8415	28,62980
KAP	264	,06	10,99	1,7560	1,54908
ROA	264	,01	13,86	4,1052	2,02094
BOPO	264	54,45	180,09	91,0494	33,14668
Valid N (listwise)	264				

Lampiran 3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,871	3,183		1,216	,225		
GDP	-,116	,067	-,035	-1,725	,086	,375	2,664
LnKURS	-,306	,311	-,022	-,984	,326	,318	3,144
LDR	-,017	,001	-,227	-15,062	,000	,671	1,490
KAP	1,344	,018	,971	73,046	,000	,866	1,155
ROA	,020	,018	,018	1,099	,273	,540	1,853
BOPO	,014	,001	,222	14,070	,000	,612	1,633

a. Dependent Variable: NPL

Lampiran 5

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,960	,43025	1,433

a. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

b. Dependent Variable: NPL

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1162,154	6	193,692	1046,343	,000 ^b
	Residual	47,574	257	,185		
	Total	1209,728	263			

a. Dependent Variable: NPL

b. Predictors: (Constant), BOPO, KAP, GDP, LDR, ROA, LnKURS

Lampiran 6

